



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR 10.K/MB.01/DJB.T/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA
KESELAMATAN PERTAMBANGAN

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk memberikan petunjuk teknis penilaian Tingkat Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan sebagai bagian dari Penelahaan Awal dalam Elemen II Perencanaan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Petunjuk Teknis Penilaian Tingkat Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan;

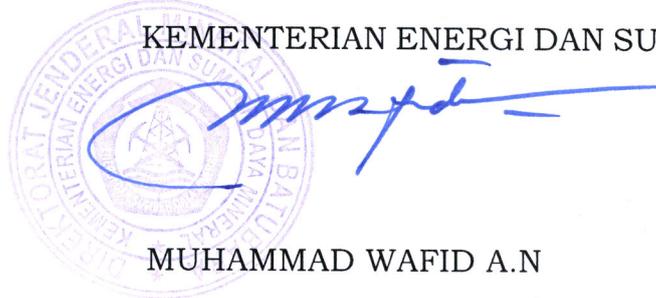
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA KESELAMATAN PERTAMBANGAN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penilaian Tingkat Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2023

Plt. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



MUHAMMAD WAFID A.N

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Gubernur seluruh Indonesia
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi seluruh Indonesia

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 10.K/MB.01/DJB.T/2023
TANGGAL : 22 Juni 2023

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA
KESELAMATAN PERTAMBANGAN

A. Pendahuluan

1. Umum

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan.
- b. Bahwa sesuai dengan Lampiran IV Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan, penilaian, dan pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara, Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan khusus pada pengolahan dan/atau pemurnian ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk teknis oleh Direktur Jenderal.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan Petunjuk Teknis Penilaian Tingkat Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan sebagai bagian dari Penelahaan Awal dalam Elemen II Perencanaan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral

dan Batubara;

- b. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada Pemegang IUP, IUPK, IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak/Perjanjian, KK, PKP2B, atau IUJP dalam menilai tingkat pencapaian kinerja Keselamatan Pertambangan sesuai ketentuan penerapan Elemen II Perencanaan Sub Elemen II.1 Penelahaan Awal dari Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta pedoman dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan Elemen II Perencanaan Sub Elemen II.1 Penelahaan Awal dari Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
- b. Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan serangkaian instruksi tertulis dalam menilai tingkat pencapaian kinerja Keselamatan Pertambangan sesuai ketentuan penerapan Elemen II Perencanaan Sub Elemen II.1 Penelahaan Awal dari Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam rangka konsistensi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kegiatan usaha Pertambangan mineral dan batubara.

4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

- a. Panduan Penilaian Tingkat Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan
- b. Panduan Penyusunan Program Peningkatan Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan

5. Sistematika

- a. Pendahuluan
- b. Pengertian

- c. Ketentuan Umum
- d. Kriteria Penilaian Tingkat Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan
- e. Gambaran Umum Penilaian Tingkat Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan
- f. Metode Pengumpulan Data Penilaian Tingkat Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan
- g. Panduan Penyusunan Program Peningkatan Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan
- h. Penutup

B. Pengertian

1. Keselamatan Pertambangan yang selanjutnya disingkat KP adalah segala kegiatan yang meliputi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja Pertambangan dan keselamatan operasional Pertambangan.
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Pekerja agar selamat dan sehat melalui upaya pengelolaan keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Keselamatan Operasi Pertambangan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif melalui upaya, antara lain pengelolaan sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan Pertambangan, pengamanan instalasi, kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan Pertambangan, kompetensi tenaga teknik, dan evaluasi laporan hasil kajian teknis Pertambangan
4. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
5. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

6. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disingkat WIUPK wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
7. Kepala Inspektur Tambang, yang selanjutnya disebut KaIT, adalah pejabat yang secara *ex officio* menduduki jabatan Direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan Pertambangan mineral dan batubara pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan mineral dan batubara.
8. Inspektur Tambang, yang selanjutnya disingkat IT adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik Pertambangan yang baik.
9. Kepala Teknik Tambang, yang selanjutnya disingkat KTT, adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan Pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional Pertambangan sesuai dengan kaidah teknik Pertambangan yang baik.
10. Penanggung Jawab Operasional, yang selanjutnya disingkat PJO, adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan jasa pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan, dan bertanggung jawab kepada KTT atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik.
11. Pekerja adalah seseorang yang bekerja di pemegang IUP, IUPK, IPR, atau perusahaan jasa Pertambangan.
12. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang menimbulkan korban manusia dan/atau harta benda.
13. Kecelakaan Tambang adalah kecelakaan yang memenuhi 5 (lima) kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.
14. Kejadian Berbahaya adalah kejadian yang dapat membahayakan jiwa atau terhalangnya produksi.
15. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja sesuai dengan peraturan perundangan.
16. Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja adalah kejadian meninggalnya Pekerja yang disebabkan oleh penyakit ketika Pekerja melakukan

kegiatan Pertambangan, terjadi pada jam kerja, atau terjadi dalam wilayah kegiatan usaha Pertambangan atau wilayah proyek.

17. Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten adalah tenaga Pertambangan yang memiliki pengetahuan, kemampuan, pengalaman, atau sertifikasi kompetensi bagi area kerja yang telah memiliki standar kompetensi kerja yang berlaku wajib di bidang eksplorasi/geologi, survei/pemetaan, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan, dan/atau reklamasi dan pascatambang yang diakui Pemerintah.
18. Kepala Kapal Keruk adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi di kapal keruk yang memimpin, mengatur, mengawasi pekerjaan termasuk pekerjaan lain yang berkaitan dengan pengoperasian kapal keruk dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional Pertambangan sesuai dengan kaidah teknik Pertambangan yang baik.

C. Ketentuan Umum

1. Penilaian tingkat pencapaian kinerja Keselamatan Pertambangan merupakan bagian dari proses penelahaan awal yang wajib dilakukan oleh perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan dalam tahap perencanaan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan. Tingkatan tersebut mencakup: tingkat dasar, tingkat reaktif, tingkat terencana, tingkat proaktif, dan tingkat *resilient*.
2. Penilaian tingkat pencapaian kinerja Keselamatan Pertambangan tersebut dilakukan oleh perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan sebagai bagian dari Penelahaan Awal dalam Elemen Perencanaan SMKP dengan mengacu kepada hasil kajian terhadap tingkat partisipasi pekerja, tanggung jawab pimpinan unit kerja, analisis dan statistik kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan kejadian berbahaya serta upaya-upaya pengendalian yang telah dilakukan.
3. Perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan membentuk Tim Penilai untuk melaksanakan penilaian tingkat pencapaian kinerja Keselamatan Pertambangan, yang wajib

beranggotakan auditor internal SMKP yang memiliki nomor registrasi dari Kepala Inspektur Tambang dan perwakilan dari pekerja tambang yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang relevan (*subject matter expert*). Perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan dapat menyertakan Tenaga Ahli di dalam Tim Penilai, dengan mempertimbangkan kebutuhan terhadap keindependenan dan kompetensi untuk proses penilaian Tingkat Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan, dan hasil konsultasi dengan Instansi Pembina Sektor.

4. Pimpinan perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan wajib memastikan pelaksanaan penilaian tingkat pencapaian kinerja Keselamatan Pertambangan dilaksanakan dengan prinsip etika dan integritas, serta dapat mempertanggungjawabkan kebenaran dari hasil penilaian tersebut.
5. Hasil dari penilaian tingkat pencapaian kinerja Keselamatan Pertambangan tersebut wajib menjadi salah satu pertimbangan bagi perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan untuk menyusun program Keselamatan Pertambangan, di luar program pokok yang wajib dilakukan, dalam rangka upaya meningkatkan kinerja penerapan Keselamatan Pertambangan secara berkelanjutan sesuai tujuan yang ditetapkan.
6. Pimpinan tertinggi perusahaan melakukan tinjauan terhadap kemajuan dan perkembangan tingkat pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan pada Rapat Tinjauan Manajemen Penerapan SMKP. Hasil tinjauan tersebut dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan terkait penilaian ulang tingkat pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan.
7. Perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan dapat melakukan penilaian ulang pada tahun berikutnya terhadap item pengukuran yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat Tinjauan Manajemen Penerapan SMKP.
8. Apabila berdasarkan hasil pengukuran didapatkan hasil Tingkat Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan masih di kategori tingkat dasar dan tingkat reaktif, maka perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan wajib melakukan penilaian ulang

terhadap seluruh indikator penilaian Tingkat Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan pada tahun penilaian berikutnya.

9. Apabila berdasarkan hasil pengukuran didapatkan hasil capaian indikator yang masih di kategori tingkat dasar dan tingkat reaktif, maka perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan wajib melakukan penilaian ulang terhadap indikator tersebut pada tahun penilaian berikutnya.
10. Perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan wajib melakukan penilaian ulang terhadap seluruh atau sebagian item pengukuran Tingkat Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan apabila terdapat perubahan dari faktor internal dan/atau faktor eksternal yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Keselamatan Pertambangan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Dalam hal terjadinya perubahan jajaran manajemen puncak pada struktur organisasi perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan maka wajib dilakukan penilaian ulang paling sedikit terhadap indikator Tanggung Jawab Pimpinan Unit Kerja dan terhadap parameter pada indikator lainnya yang terkait pada tahun penilaian berikutnya;
 - b. Dalam hal terjadinya tingkat pergantian karyawan masuk, keluar, dan perpindahan lebih dari 30% (tiga puluh) persen pada perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan dalam periode waktu satu tahun setelah dilakukan penilaian, maka wajib dilakukan penilaian ulang paling sedikit terhadap indikator Partisipasi Pekerja dan terhadap parameter pada indikator lainnya yang terkait pada tahun penilaian berikutnya;
 - c. Dalam hal terjadinya perubahan signifikan pada proses bisnis utama termasuk perubahan metode penambangan dan pemanfaatan teknologi baru pada perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan, maka wajib dilakukan penilaian ulang paling sedikit terhadap indikator Upaya-Upaya Pengendalian yang Dilakukan dan terhadap parameter pada indikator lainnya yang terkait pada tahun penilaian berikutnya; dan
 - d. Dalam hal terjadinya kecelakaan tambang berakibat mati, kejadian

berbahaya serupa yang berulang, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan Penyakit Akibat Kerja, maka wajib dilakukan penilaian ulang terhadap indikator-indikator yang berkaitan dengan faktor kontribusi penyebab terjadinya kasus-kasus tersebut berdasarkan hasil investigasi pada tahun penilaian berikutnya.

11. Perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan wajib melakukan penilaian ulang terhadap seluruh indikator penilaian Tingkat Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan maksimum 3 (tiga) tahun sejak terakhir dilakukannya penilaian terhadap seluruh indikator penilaian Tingkat Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan.
12. Kepala Inspektur Tambang dapat meminta perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan untuk melakukan penilaian ulang Tingkat Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan berdasarkan hasil evaluasi.

D. Deskripsi Indikator Tingkat Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan

1. Partisipasi Pekerja Tambang

Partisipasi Pekerja Tambang merupakan ukuran yang menunjukkan peran serta aktif pekerja tambang dalam menjalankan program Keselamatan Pertambangan.

Kriteria pekerja tambang mencakup:

- Pekerja tambang dari semua perusahaan dalam satu sistem kerja (pemegang izin, kontraktor, dan sub kontraktor);
- Pekerja tambang dari seluruh level jabatan: Kepala Teknik Tambang (KTT) untuk perusahaan pertambangan atau Penanggung Jawab Operasional (PJO) untuk perusahaan jasa pertambangan, pimpinan departemen/bagian/ seksi, pengawas operasional, pengawas teknis, pekerja non pengawas, termasuk non-staf; dan
- Pekerja tambang dari seluruh unit atau departemen/bagian, termasuk bagian administrasi.

Parameter utama dari indikator Partisipasi Pekerja Tambang adalah sebagai berikut:

- a. Kepedulian dan Perilaku Individu terhadap Risiko Keselamatan Pertambangan; dan
- b. Keterlibatan Pekerja dalam Pengelolaan Keselamatan Pertambangan

2. Tanggung Jawab Pimpinan Unit Kerja

Tanggung Jawab Pimpinan Unit Kerja merupakan ukuran yang menunjukkan pencapaian pelaksanaan tugas pimpinan unit yang berkaitan dengan Keselamatan Pertambangan di tempat kerja, baik sebagai individu maupun fungsi di dalam organisasi.

Pimpinan unit kerja yang dimaksud mencakup:

- Manajemen puncak perusahaan;
- Kepala Teknik Tambang (KTT) untuk perusahaan pertambangan atau Penanggung Jawab Operasional (PJO) untuk perusahaan jasa pertambangan;
- Pimpinan departemen/bagian, seksi, bagian ataupun kelompok kerja tertentu, baik permanen maupun sementara; dan
- Pengawas Operasional dan Pengawas Teknis dari setiap area dan/atau kegiatan operasional.

Parameter utama dari indikator Tanggung Jawab Pimpinan Unit Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi Kebijakan Keselamatan Pertambangan;
- b. Kepemimpinan dan Komitmen Keselamatan Pertambangan;
- c. Kepatuhan dan Penegakan Peraturan Perundangan aspek Keselamatan Pertambangan;
- d. Penetapan Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan dalam Keselamatan Pertambangan;
- e. Manajemen Strategi dan Operasi Keselamatan Pertambangan;
- f. Informasi, Komunikasi, Pendampingan, dan Konsultasi Keselamatan Pertambangan;
- g. Pengendalian Mutu Keselamatan Pertambangan dalam Kegiatan Operasional; dan
- h. Penjaminan Mutu Keselamatan Pertambangan melalui Audit Internal SMKP.

3. Analisis dan Statistik Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan Kejadian Berbahaya

Analisis dan Statistik Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan Kejadian Berbahaya merupakan ukuran yang menunjukkan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terkait pemantauan dan pengukuran kinerja pengelolaan Keselamatan Pertambangan di tempat kerja berdasarkan indikator hasil akhir, serta analisis, evaluasi dan tindak lanjutnya, yang mencakup data Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan Kejadian Berbahaya.

Parameter utama dari indikator Analisis dan Statistik Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan Kejadian Berbahaya adalah sebagai berikut:

- a. Analisis Terhadap Data Kasus Keselamatan Pertambangan;
 - b. Investigasi Kasus Keselamatan Pertambangan;
 - c. Statistik Kinerja Keselamatan Pertambangan Berdasarkan Indikator Tertinggal; dan
 - d. Pembelajaran Organisasi.
4. Upaya-Upaya Pengendalian yang Dilakukan

Upaya-Upaya Pengendalian yang Dilakukan merupakan ukuran yang menunjukkan penerapan upaya pengelolaan risiko dan program Keselamatan Pertambangan di tempat kerja yang perlu dan relevan dengan karakteristik operasi perusahaan, yang mencakup program pokok dan penunjang (inovasi), serta dapat bersifat insidental dan kontinu.

Parameter utama dari indikator upaya Pengendalian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengendalian Risiko Keselamatan Pertambangan Berbasis Tata Kelola;
- b. Manajemen Kesehatan Kerja Pertambangan;
- c. Manajemen Lingkungan Kerja Pertambangan;

- d. Manajemen Rekayasa & Desain Proses;
- e. Manajemen Aset (Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan) untuk Pemenuhan Persyaratan Keselamatan Pertambangan;
- f. Manajemen Keandalan Pekerja dalam Pengelolaan Keselamatan Pertambangan;
- g. Manajemen Perubahan; dan
- h. Manajemen Keadaan Darurat.

Parameter pendukung dari indikator Upaya-Upaya Pengendalian yang Dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen Perusahaan Jasa Pertambangan; dan
- b. Manajemen Dokumen & Rekaman Keselamatan Pertambangan.

E. Kriteria Penilaian Tingkat Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan
Penetapan tingkat pencapaian kinerja Keselamatan Pertambangan sebagai bagian dari Penelahaan Awal Perencanaan SMKP dilakukan oleh perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan melalui mekanisme pengukuran atau penilaian terhadap pencapaian keberhasilan tiap-tiap indikator, yang digambarkan dalam bentuk angka (kuantitatif) hasil pengukuran kumulatif dari seluruh indikator dalam bentuk angka.

Penetapan kategori tingkat pencapaian adalah berdasarkan hal berikut:

- Nilai Pencapaian <0.50 : Tingkat Dasar
- Nilai Pencapaian 0.50 s.d. 0.69 : Tingkat Reaktif
- Nilai Pencapaian 0.70 s.d. 0.79 : Tingkat Terencana
- Nilai Pencapaian 0.80 s.d. 0.89 : Tingkat Proaktif
- Nilai Pencapaian 0.90 s.d. 1 : Tingkat *Resilient*

Angka tingkat pencapaian kinerja Keselamatan Pertambangan tersebut diperoleh melalui serangkaian mekanisme penilaian tiap item dengan dimensi kuantitatif dan kualitatif dari masing-masing parameter dan indikator, yang diolah dan dianalisis dengan kriteria penilaian yang dinarasikan melalui rubrik yang ditetapkan pada matriks penilaian.

Dalam menetapkan nilai masing-masing indikator, ditetapkan pembobotan nilai sebagai berikut:

Tabel Pembobotan Indikator Pengukuran

INDIKATOR	PARAMETER	DIMENSI	BOBOT	
Partisipasi Pekerja Tambang	Kepedulian dan Perilaku Individu terhadap Risiko Keselamatan Pertambangan	Kualitatif	0.15	0.05
	Keterlibatan Pekerja dalam Pengelolaan Keselamatan Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif		0.10
Tanggung Jawab Pimpinan Unit Kerja	Implementasi Kebijakan Keselamatan Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif	0.35	0.05
	Kepemimpinan dan Komitmen Keselamatan Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif		0.05
	Kepatuhan dan Penegakan Peraturan Keselamatan Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif		0.05
	Penetapan Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan dalam Keselamatan Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif		0.04
	Manajemen Strategi dan Operasi Keselamatan Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif		0.04
	Informasi, Komunikasi, Pendampingan, Konsultasi Keselamatan Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif		0.04
	Pengendalian Mutu Keselamatan Pertambangan dalam Kegiatan Operasional	Kualitatif Kuantitatif		0.04
	Penjaminan Mutu Keselamatan Pertambangan melalui Audit Internal SMKP	Kualitatif Kuantitatif		0.04
Analisis dan Statistik Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan Kejadian Berbahaya	Analisis Terhadap Data Kasus Keselamatan Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif	0.20	0.05
	Investigasi Kasus Keselamatan Pertambangan	Kualitatif		0.05
	Statistik Kinerja Keselamatan Pertambangan Berdasarkan Indikator Tertinggal	Kuantitatif		0.05
	Pembelajaran Organisasi	Kualitatif Kuantitatif		0.05
Upaya-Upaya Pengendalian yang Dilakukan	Pengendalian Risiko Keselamatan Pertambangan Berbasis Tata Kelola	Kualitatif Kuantitatif	0.30	0.04
	Manajemen Kesehatan Kerja Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif		0.03
	Manajemen Lingkungan Kerja Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif		0.03
	Manajemen Rekayasa & Desain Proses	Kualitatif Kuantitatif		0.04
	Manajemen Aset Keselamatan Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif		0.04
	Manajemen Keandalan Pekerja dalam Pengelolaan Keselamatan Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif		0.03
	Manajemen Perubahan	Kualitatif		0.04

		Kuantitatif	
	Manajemen Keadaan Darurat	Kualitatif Kuantitatif	0.03
	Manajemen Perusahaan Jasa Pertambangan	Kuantitatif	0.01
	Manajemen Dokumen & Rekaman Keselamatan Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif	0.01

Pemberian skor masing-masing indikator dilakukan untuk setiap item pengukuran setiap parameter, yakni sebagai berikut:

1. Partisipasi Pekerja Tambang

A. Parameter: Kepedulian dan Perilaku Individu terhadap Risiko dan Kepedulian

Item pengukuran:

- 1) Kesadaran Pekerja terhadap Risiko Keselamatan Pertambangan;
- 2) Komitmen dan Inisiatif Pekerja dalam Pengelolaan Keselamatan Pertambangan;
- 3) Kedisiplinan Pekerja di Dalam Pekerjaan dan di Luar Pekerjaan;
- 4) Aktualisasi Nilai-Nilai Inti Perusahaan (*Core Values*) oleh Pekerja; dan
- 5) Aktualisasi Aturan Emas Keselamatan Pertambangan (*Golden Rules*) Perusahaan oleh Pekerja.

B. Parameter: Keterlibatan Pekerja dalam Pengelolaan Keselamatan Pertambangan

Item pengukuran:

- 1) Kehadiran Pekerja dalam Pekerjaan di Hari Kerja;
- 2) Kehadiran Pekerja dalam Kegiatan Keselamatan Pertambangan;
- 3) Peran Pekerja dalam Kegiatan Keselamatan Pertambangan;
- 4) Keterlibatan Perwakilan Departemen/Bagian/Seksi dalam Tim Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan;
- 5) Peran Perwakilan Departemen/Bagian/Seksi dalam Tim Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan;
- 6) Keterlibatan Pekerja Non Pengawas dalam Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan;

- 7) Peran Pekerja Non Pengawas dalam Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan;
- 8) Keterlibatan Komite Keselamatan Pertambangan dalam Penyusunan Tujuan, Sasaran, dan Program Keselamatan Pertambangan;
- 9) Peran Anggota Komite Keselamatan Pertambangan dalam Penyusunan Tujuan, Sasaran, dan Program Keselamatan Pertambangan;
- 10) Peran Komite Keselamatan Pertambangan dalam Pemantauan Pelaksanaan dan Perkembangan Tujuan, Sasaran, dan Program Keselamatan Pertambangan;
- 11) Kehadiran dan Keterlibatan Ketua Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite Keselamatan Pertambangan;
- 12) Peran Ketua Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite Keselamatan Pertambangan;
- 13) Kehadiran dan Keterlibatan Wakil Ketua Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite Keselamatan Pertambangan;
- 14) Peran Wakil Ketua Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite Keselamatan Pertambangan;
- 15) Kehadiran dan Keterlibatan Sekretaris Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite Keselamatan Pertambangan;
- 16) Peran Sekretaris Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite Keselamatan Pertambangan;
- 17) Kehadiran dan Keterlibatan Anggota Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite Keselamatan Pertambangan;
- 18) Peran Anggota Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite Keselamatan Pertambangan;
- 19) Peran Anggota Komite Keselamatan Pertambangan dalam Mewakili Departemen/Bagiannya;
- 20) Jumlah Pelaporan Bahaya dan/atau Pengaduan Pelanggaran Keselamatan Pertambangan (*Whistleblowing*) terkait Keselamatan Pertambangan oleh Pekerja;

- 21) Kesesuaian dan Keandalan Kesesuaian Pelaporan Bahaya dan/atau Pengaduan Pelanggaran Keselamatan Pertambangan terkait Keselamatan Pertambangan oleh Pekerja;
- 22) Jumlah Saran dan Masukan Pekerja untuk Peningkatan Keselamatan Pertambangan;
- 23) Kesesuaian dan Keandalan Saran dan Masukan Pekerja untuk Peningkatan Keselamatan Pertambangan; dan
- 24) Efektivitas Partisipasi Pekerja.

2. Tanggung Jawab Pimpinan Unit Kerja

A. Parameter: Implementasi Kebijakan Keselamatan Pertambangan

Item pengukuran:

- 1) Upaya Internalisasi Nilai-Nilai Inti (*Core Values*) Perusahaan oleh Manajemen;
- 2) Upaya Internalisasi Aturan Emas Keselamatan Pertambangan (*Golden Rules*) Perusahaan oleh Manajemen;
- 3) Efektivitas Kebijakan Keselamatan Pertambangan; dan
- 4) Persepsi Pekerja terhadap Komitmen Manajemen dalam Penerapan Kebijakan Keselamatan Pertambangan.

B. Parameter: Kepemimpinan dan Komitmen Keselamatan Pertambangan

Item pengukuran:

- 1) Persepsi Manajemen Puncak terhadap Peran Keselamatan Pertambangan;
- 2) Persepsi Pekerja terhadap Kepemimpinan dan Komitmen Manajemen;
- 3) Ketersediaan Anggaran Keselamatan Pertambangan dalam RKAB;
- 4) Realisasi Anggaran Keselamatan Pertambangan dalam RKAB;
- 5) Kecepatan Manajemen Puncak dalam Merespon Isu Keselamatan Pertambangan;
- 6) Jumlah Kehadiran Manajemen Puncak pada *Site*;
- 7) Peran Manajemen Puncak dalam Kunjungan *Site*;
- 8) Efektivitas Rapat Tinjauan Manajemen;
- 9) Peran Pimpinan Tertinggi pada Rapat Tinjauan Manajemen;

- 10) Dukungan Manajemen untuk Inovasi dan Peningkatan Kinerja Keselamatan Pertambangan;
- 11) Pemberian Penghargaan atas Kinerja Keselamatan Pertambangan dari Pekerja;
- 12) Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Keselamatan Pertambangan dari Pekerja;
- 13) Persepsi KTT/PJO terhadap Peran Keselamatan Pertambangan;
- 14) Tingkat Kehadiran KTT/PJO di *Site*;
- 15) Persepsi Pekerja terhadap Kepemimpinan dan Komitmen dari KTT/PJO;
- 16) Persepsi Pimpinan Departemen/Bagian/Seksi terhadap Peran Keselamatan Pertambangan;
- 17) Persepsi Pekerja terhadap Kepemimpinan dan Komitmen dari Pimpinan Departemen/Bagian/Seksi;
- 18) Kehadiran KTT/PJO dalam Kegiatan Keselamatan Pertambangan (Rapat, Pertemuan, Seminar, dan Kegiatan Lainnya);
- 19) Peran KTT/PJO dalam Kegiatan Keselamatan Pertambangan;
- 20) Peran KTT/PJO dalam Penyusunan dan Tinjauan Kebijakan Keselamatan Pertambangan;
- 21) Peran KTT/PJO dalam Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan;
- 22) Keterlibatan Pimpinan Departemen/Bagian dalam Penyusunan dan Tinjauan Kebijakan Keselamatan Pertambangan;
- 23) Peran Pimpinan Departemen/Bagian dalam Penyusunan dan Tinjauan Kebijakan Keselamatan Pertambangan;
- 24) Keterlibatan Pimpinan Departemen/Bagian/Seksi dalam Kegiatan Keselamatan Pertambangan;
- 25) Peran Pimpinan Departemen/Bagian/Seksi dalam Kegiatan Keselamatan Pertambangan;
- 26) Keterlibatan Pimpinan Departemen/Bagian/Seksi dalam Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan;
- 27) Peran Pimpinan Departemen/Bagian/Seksi dalam Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan;

- 28) Kehadiran Pengawas Operasional/Teknis dalam Pertemuan Keselamatan Pertambangan Kelompok Kerja;
- 29) Peran Pengawas Operasional/Teknis dalam Pertemuan Keselamatan Pertambangan Kelompok Kerja;
- 30) Keterlibatan Pengawas Operasional/Teknis dalam Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan; dan
- 31) Peran Pengawas Operasional/Teknis dalam Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan.

C. Parameter: Kepatuhan dan Penegakan Peraturan Keselamatan Pertambangan

Item pengukuran

- 1) Inisiatif dan Kesadaran untuk Pemenuhan Persyaratan Perundangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait Aspek Keselamatan Pertambangan;
- 2) Efektivitas Pemenuhan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait;
- 3) Respon Manajemen Perusahaan terhadap Undangan dari Instansi Pembina Sektor;
- 4) Kepatuhan Perusahaan dalam Menindaklanjuti Arahan Tertulis dari Instansi Pembina Sektor melalui Surat Edaran Kepala Inspektur Tambang;
- 5) Kepatuhan Perusahaan dalam Menindaklanjuti Hasil Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektur Tambang;
- 6) Kepatuhan KTT dalam Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan;
- 7) Kepatuhan KTT dalam Pelaporan Khusus atas Kasus Keselamatan Pertambangan kepada Kepala Inspektur Tambang; dan
- 8) Kepatuhan Pimpinan Departemen/Bagian dalam menindaklanjuti Arahan/Instruksi KTT terkait pemenuhan Peraturan Keselamatan Pertambangan.

D. Parameter: Penetapan Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan dalam Keselamatan Pertambangan

Item pengukuran:

- 1) Kemandirian Pengelolaan Keselamatan Pertambangan;
- 2) Ketersediaan KTT;
- 3) Ketersediaan Penanggung Jawab Operasional (PJO)
- 4) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab KTT/PJO;
- 5) Ketersediaan Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten;
- 6) Penyediaan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknis;
- 7) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas Operasional dan Pengawas Teknis;
- 8) Ketersediaan dan Kewenangan Bagian K3 dan Bagian KO Pertambangan;
- 9) Penetapan Job Description terkait Keselamatan Pertambangan untuk Pekerja;
- 10) Pemberian Dukungan dan Kewenangan kepada Pekerja untuk Menyatakan Keberatan Bekerja jika Syarat Keselamatan Pertambangan Diragukan;
- 11) Penerapan Mekanisme Pemilihan Perwakilan Pekerja pada Komite Keselamatan Pertambangan; dan
- 12) Persepsi Manajemen terhadap Pengelolaan Pekerja.

E. Parameter: Manajemen Strategi dan Operasi Keselamatan Pertambangan

Item pengukuran:

- 1) Formulasi Strategi Keselamatan Pertambangan;
- 2) Penjabaran dan Penyelarasan Strategi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan;
- 3) Ruang Lingkup Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keselamatan Pertambangan; dan
- 4) Efektivitas Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keselamatan Pertambangan.

F. Parameter: Informasi, Komunikasi, Pendampingan, Konsultasi Keselamatan Pertambangan

Item pengukuran:

- 1) Kesesuaian Induksi Keselamatan Pertambangan;
- 2) Jumlah Pertemuan Keselamatan Pertambangan;

- 3) Kualitas Pertemuan Keselamatan Pertambangan;
- 4) Jumlah Kampanye Keselamatan Pertambangan;
- 5) Efektivitas Kampanye Keselamatan Pertambangan;
- 6) Efektivitas Komunikasi Keselamatan Pertambangan Eksternal dengan Mitra Kerja (*Customer*, Kontraktor, Sub Kontraktor, dll);
- 7) Efektivitas Komunikasi Vertikal antara Pimpinan Unit Kerja dengan Anggota;
- 8) Efektivitas Komunikasi Horisontal antar Rekan Kerja;
- 9) Efektivitas Komunikasi antar Ketua Kelompok Kerja;
- 10) Efektivitas Komunikasi antar Penanggung Jawab Gilir Kerja/ *Shift*;
- 11) Kehandalan Fasilitas dan Media Penunjang Komunikasi Keselamatan Pertambangan;
- 12) Jumlah *Mentoring*, *Coaching*, dan *Counselling* untuk Pekerja dari Pimpinan Tim Kerja;
- 13) Efektivitas *Mentoring*, *Coaching*, dan *Counselling* untuk Pekerja dari Pimpinan Tim Kerja;
- 14) Ketersediaan Ruang dan Akses Informasi Keselamatan Pertambangan untuk Pekerja;
- 15) Proteksi Pelapor dan Mekanisme Penanganan Pelaporan dalam Pengaduan Pelanggaran Keselamatan Pertambangan (*Whistleblowing System*);
- 16) Penjangkauan Pemangku Kepentingan Eksternal;
- 17) Inventarisasi Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan; dan
- 18) Efektivitas Komunikasi Keselamatan Pertambangan.

G. Parameter: Pengendalian Mutu Keselamatan Pertambangan dalam Kegiatan Operasional

Item pengukuran:

- 1) Jumlah Penetapan Tata Cara Kerja Baku untuk Operasi Kerja;
- 2) Efektivitas Tata Cara Kerja Baku untuk Operasi Kerja;
- 3) Kesesuaian Penetapan Rencana Kerja Operasional Harian;
- 4) Kesesuaian Penerapan Pemeriksaan Kesiapan Operasional Harian;
- 5) Kesesuaian Pemberian Izin Masuk Lokasi Pertambangan;

- 6) Kesesuaian Pemberian Lisensi dan Surat Izin Pengoperasian Peralatan;
- 7) Kesesuaian Pemberian Izin Kerja Khusus;
- 8) Kesesuaian Penetapan Area, Aktivitas, dan Kontrol Kritis dalam aspek Keselamatan Pertambangan;
- 9) Kesesuaian Penetapan Distribusi dan Komposisi Area Pengawasan;
- 10) Jumlah Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pengawas Operasional Langsung;
- 11) Kesesuaian dan Keandalan Hasil Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pengawas Operasional Langsung;
- 12) Jumlah Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pengawas Operasional Jenjang Menengah;
- 13) Kesesuaian dan Keandalan Hasil Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pengawas oleh Pengawas Operasional Jenjang Menengah;
- 14) Jumlah Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pihak Internal di Luar Penanggung Jawab Area (Silang);
- 15) Kesesuaian dan Keandalan Hasil Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pihak Internal di Luar Penanggung Jawab Area (Silang); dan
- 16) Efektivitas Inspeksi Keselamatan Pertambangan.

H. Parameter: Penjaminan Mutu Keselamatan Pertambangan melalui Audit Internal SMKP

Item pengukuran:

- 1) Dasar Pelaksanaan Audit Internal SMKP;
- 2) Kesesuaian Metodologi Audit Internal SMKP;
- 3) Keberhasilan Pencapaian Tujuan Audit Internal SMKP;
- 4) Jumlah *Opportunity for Improvement* dari Hasil Audit Internal SMKP; dan
- 5) Penyelesaian Rencana Tindak Lanjut Audit Internal SMKP.

3. Analisis dan Statistik Kecelakaan, Penyakit Akibat Kerja, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan Kejadian Berbahaya

A. Parameter: Analisis Terhadap Data Kasus Keselamatan Pertambangan

Item pengukuran

- 1) Integritas Data Keselamatan Pertambangan;
- 2) Ruang Lingkup Analisis dan Pengolahan Data Kasus Keselamatan Pertambangan; dan
- 3) Maturitas Hasil Analisis Data Keselamatan Pertambangan.

B. Parameter: Investigasi Kasus Keselamatan Pertambangan

Item pengukuran

- 1) Jumlah Kasus Keselamatan Pertambangan yang diinvestigasi;
- 2) Pengumpulan Data dan Informasi Kasus Keselamatan Pertambangan;
- 3) Paradigma Investigasi Kasus Keselamatan Pertambangan;
- 4) Teknik Analisis Kasus Keselamatan Pertambangan;
- 5) Penetapan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan;
- 6) Realisasi Pelaksanaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan; dan
- 7) Jumlah Kasus Keselamatan Pertambangan Serupa dan Berulang dalam 2 Tahun Terakhir.

C. Parameter: Statistik Kinerja Keselamatan Pertambangan Berdasarkan Indikator Tertinggal

- 1) Pencapaian *Accident Frequency Rate*;
- 2) Pencapaian *Accident Severity Rate*;
- 3) Jumlah Kejadian Berbahaya;
- 4) Pencapaian *Morbidity Frequency Rate*;
- 5) Pencapaian *Absence Severity Rate* (termasuk Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja); dan
- 6) Frekuensi Penyakit Akibat Kerja.

D. Parameter: Pembelajaran Organisasi

Item pengukuran

- 1) Pembelajaran Retrospektif dari Pengelolaan Keselamatan Pertambangan; dan
- 2) Jumlah Perbaikan Berbasis Pembelajaran Keselamatan Pertambangan.

4. Upaya-Upaya Pengendalian yang Dilakukan

A. Parameter: Pengelolaan Risiko Keselamatan Pertambangan Berbasis Tata Kelola

Item pengukuran

- 1) Dasar Pengelolaan Risiko Keselamatan Pertambangan;
- 2) Ketuntasan Siklus Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan;
- 3) Ruang Lingkup Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan; dan
- 4) Efektivitas Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan.

B. Parameter: Manajemen Kesehatan Kerja Pertambangan

Item pengukuran

- 1) Dasar Pengembangan Program Kesehatan Kerja Pertambangan;
- 2) Realisasi Program Pokok: Kesehatan Kerja; dan
- 3) Efektivitas Program Kesehatan Kerja.

C. Parameter: Manajemen Lingkungan Kerja Pertambangan

Item pengukuran

- 1) Dasar Pengembangan Program Lingkungan Kerja Pertambangan;
- 2) Realisasi Program Pokok: Lingkungan Kerja; dan
- 3) Efektivitas Program Lingkungan Kerja.

D. Parameter: Manajemen Rekayasa & Desain Proses

Item pengukuran

- 1) Kesesuaian Penerapan Rekayasa Pertambangan: Keandalan Desain Kegiatan Operasional Pertambangan;
- 2) Kesesuaian Penerapan Rekayasa Pertambangan: Keandalan Metode Kegiatan Operasional Pertambangan;

- 3) Kesesuaian Penerapan Rekayasa Pertambangan: Kesesuaian Penggunaan Peralatan dan Perangkat Keras untuk Kegiatan Operasional Pertambangan;
- 4) Kesesuaian Penerapan Rekayasa Pertambangan: Kesesuaian Penggunaan Perangkat Lunak untuk Kegiatan Operasional Pertambangan; dan
- 5) Efektivitas Perancangan dan Rekayasa Pertambangan.

E. Parameter: Manajemen Aset Keselamatan Pertambangan

Item pengukuran

- 1) Pengadaan dan Pembelian Aset Keselamatan Pertambangan;
- 2) Inventarisasi Aset Keselamatan Pertambangan;
- 3) Manajemen Rantai Pasok;
- 4) Manajemen Integritas Aset: Jumlah Pengujian Kelayakan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan;
- 5) Manajemen Integritas Aset: Realisasi *Commissioning*;
- 6) Manajemen Integritas Aset: Jumlah Pemeliharaan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan;
- 7) Nilai *Physical Availability*;
- 8) Nilai *Mechanical Availability*;
- 9) Realisasi Program Pokok : Keselamatan Operasi;
- 10) Efektivitas Program Keselamatan Operasi.

F. Parameter: Manajemen Keandalan Pekerja dalam Pengelolaan Keselamatan Pertambangan

Item pengukuran

- 1) Pemenuhan Kesiapan Psikologi dan Fisiologis Pekerja;
- 2) Efektivitas Seleksi dan Penempatan Pekerja;
- 3) Pemenuhan Kompetensi Pekerja sesuai Standar Kompetensi Kerja;
- 4) Efektivitas Pemenuhan Kompetensi Kerja;
- 5) Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan Pertambangan;
- 6) Pendekatan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan Pertambangan;
- 7) Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan Pertambangan;
- 8) Retensi Pengetahuan dan Peningkatan Kinerja Pekerja Pasca Pendidikan dan Pelatihan;

- 9) Retensi Pengetahuan dan Peningkatan Kinerja Pekerja Pasca Sertifikasi;
- 10) Kesesuaian Penetapan *Roster* dan *Shift*/Gilir Kerja Pekerja; dan
- 11) Pernyataan Pekerja terkait Kepuasan Kerja (*Job Satisfaction*) dan Kesejahteraan Mental (*Mental Well-being*) dalam Bekerja

berdasarkan hasil survei.
G. Parameter: Manajemen Perubahan

Item pengukuran:

- 1) Dasar Manajemen Perubahan;
- 2) Kebermanfaatan Manajemen Perubahan;
- 3) Daya Tanggap Organisasi atas Perubahan dari Eksternal;
- 4) Efektivitas Kajian Teknis Pertambangan; dan
- 5) Efektivitas Manajemen Perubahan.

H. Parameter: Manajemen Keadaan Darurat

Item pengukuran:

- 1) Efektivitas Tim Tanggap Darurat; dan
- 2) Efektivitas Manajemen Keadaan Darurat.

I. Parameter: Manajemen Perusahaan Jasa Pertambangan

Item pengukuran:

- 1) Kesesuaian Persyaratan, Seleksi, dan Penetapan Perusahaan Jasa Pertambangan;
- 2) Kesesuaian Penetapan Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pertambangan; dan
- 3) Kesesuaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Jasa Pertambangan.

J. Parameter: Manajemen Dokumen & Rekaman Keselamatan Pertambangan

Item pengukuran:

- 1) Manajemen Dokumentasi Keselamatan Pertambangan;
- 2) Efektivitas Manajemen Dokumentasi; dan
- 3) Manajemen Pengetahuan.

Seluruh item pengukuran dengan dimensi kuantitatif dan kualitatif dari masing-masing parameter dan indikator diberikan penilaian melalui proses analisis terhadap kriteria penilaian yang dinarasikan melalui rubrik pada Matriks Penilaian sebagai berikut:

1. Partisipasi Pekerja Tambang

A. Parameter: Kepedulian dan Perilaku Individu terhadap Risiko Keselamatan Pertambangan

ITEM	RUBRIK				
	1	2	3	4	5
1.1.1 Kesadaran Pekerja terhadap Risiko Keselamatan Pertambangan	Pekerja tidak memahami bahaya dan risiko KP serta pengendaliannya di wilayah kerjanya	Pekerja memahami sebagian bahaya dan risiko KP serta pengendaliannya di wilayah kerjanya	Pekerja memahami seluruh bahaya dan risiko KP serta pengendaliannya di wilayah kerjanya	Pekerja memahami seluruh bahaya dan risiko KP serta pengendaliannya di wilayah kerjanya dan konsisten dalam bekerja secara aman	Pekerja memahami seluruh bahaya dan risiko KP serta pengendaliannya di wilayah kerjanya dan telah memiliki kemampuan kewaspadaan situasi kerja, serta konsisten dalam bekerja secara aman dan berperan aktif dalam perbaikan dan peningkatan upaya pengendalian bahaya dan risiko
1.1.2 Komitmen dan Inisiatif Pekerja dalam Pengelolaan Keselamatan Pertambangan	Pekerja bersikap apatis dalam pengelolaan KP dan mengupayakan keselamatan individu dengan naluri, melaksanakan KP karena terpaksa namun tidak	Pekerja melaksanakan KP sudah mengetahui manfaat pengelolaan KP, namun sepenuhnya bergantung pada perusahaan tempat mereka bekerja untuk menjaga mereka tetap selamat.	Pekerja menjaga keselamatan dan kesehatan diri mereka secara mandiri untuk komitmen kepatuhan terhadap norma	Pekerja berkontribusi pada keselamatan dan kesehatan orang lain (<i>interdependent</i>) dalam tim kerja dengan komitmen berkelanjutan	Pekerja berkontribusi pada keselamatan dan kesehatan orang lain dalam skala organisasi, menjalankannya bagian dari gaya hidup, memiliki ikatan secara emosional yang melekat untuk

	mengetahui manfaatnya				melibatkan diri untuk peningkatan pengelolaan KP organisasi (komitmen afektif)
1.1.3 Kedisiplinan Pekerja di Dalam Pekerjaan dan di Luar Pekerjaan	Pekerja menjadi disiplin hanya pada saat ada pengawasan, bergantung pada perintah	Pekerja menjadi disiplin dalam penerapan KP jika sudah terjadi kasus KP, tidak konsisten	Pekerja disiplin mengikuti peraturan perusahaan ketika bekerja di dalam tim kerja, di area kerja dan/atau proyek, dan di jam kerja. Tidak konsisten disiplin ketika bekerja secara individu	Pekerja disiplin mengikuti peraturan perusahaan termasuk ketika memasuki area kerja di area kerjanya. Kedisiplinan telah dilakukan secara individu, komunal, maupun kolektif, namun masih ditemukan pelanggaran minor	Tidak ditemukan pelanggaran atas norma / prosedur / standar / peraturan perusahaan. Pekerja juga disiplin menjaga keselamatan dan kesehatan di luar jam kerja dan wilayah kerja
1.1.4 Aktualisasi Nilai-Nilai Inti (<i>Core Values</i>) Perusahaan oleh Pekerja	Pekerja tidak memahami Nilai-Nilai Inti Perusahaan	Belum seluruh Pekerja memahami Nilai-Nilai Inti Perusahaan	Seluruh Pekerja memahami Nilai-Nilai Inti Perusahaan	Seluruh Pekerja memahami Nilai-Nilai Inti Perusahaan namun belum seluruh pekerja mampu mengaktualisasikannya dalam pekerjaannya	Seluruh Pekerja memahami Nilai-Nilai Inti Perusahaan dan mampu mengaktualisasikannya dalam pekerjaannya
1.1.5 Aktualisasi Aturan Emas Keselamatan Pertambangan (<i>Golden Rules</i>) Perusahaan oleh Pekerja	Pekerja tidak memahami Aturan Emas Keselamatan Pertambangan Perusahaan	Belum seluruh Pekerja memahami Aturan Emas Keselamatan Pertambangan Perusahaan	Seluruh Pekerja memahami Aturan Emas Keselamatan Pertambangan Perusahaan	Seluruh Pekerja memahami Aturan Emas Keselamatan Pertambangan namun belum seluruh pekerja mampu mengaktualisasikannya dalam pekerjaannya	Seluruh Pekerja memahami Aturan Emas Keselamatan Pertambangan dan mampu mengaktualisasikannya dalam pekerjaannya

B. Parameter: Keterlibatan Pekerja dalam Pengelolaan Keselamatan Pertambangan

ITEM	RUBRIK				
	1	2	3	4	5
1.2.1 Kehadiran Pekerja dalam Pekerjaan di Hari Kerja	Kehadiran Pekerja dalam Pekerjaan di Hari Kerja (Masuk Kerja) 2 tahun terakhir rata-rata <50% dari jumlah pekerja yang seharusnya masuk	Kehadiran Pekerja dalam Pekerjaan di Hari Kerja (Masuk Kerja) 2 tahun terakhir rata-rata 50-69% dari jumlah pekerja yang seharusnya masuk	Kehadiran Pekerja dalam Pekerjaan di Hari Kerja (Masuk Kerja) 2 tahun terakhir rata-rata 70-79% dari jumlah pekerja yang seharusnya masuk	Kehadiran Pekerja dalam Pekerjaan di Hari Kerja (Masuk Kerja) 2 tahun terakhir rata-rata 80-94% dari jumlah pekerja yang seharusnya masuk	Kehadiran Pekerja dalam Pekerjaan di Hari Kerja (Masuk Kerja) 2 tahun terakhir 95-100% dari jumlah pekerja yang seharusnya masuk
1.2.2 Kehadiran Pekerja dalam Kegiatan Keselamatan Pertambangan	Tingkat kehadiran Pekerja rata-rata <50% dari target / jumlah yang seharusnya hadir	Tingkat kehadiran Pekerja rata-rata 50-69% dari target / jumlah yang seharusnya hadir	Tingkat kehadiran Pekerja rata-rata 70-79% dari target / jumlah yang seharusnya hadir	Tingkat kehadiran Pekerja rata-rata 80-99% dari target / jumlah yang seharusnya hadir	Tingkat kehadiran Pekerja rata-rata 100% dari target / jumlah yang seharusnya hadir
1.2.3 Peran Pekerja dalam Kegiatan Keselamatan Pertambangan	Sebagian besar Pekerja hanya menghadiri Kegiatan KP yang menjadi kewajibannya	Sebagian besar Pekerja terlibat dan hanya berkontribusi dalam Kegiatan KP apabila ada isu dengan pekerjaannya atau ketika diminta oleh pimpinan unit kerja	Sebagian besar Pekerja berpartisipasi dalam kegiatan KP lingkup unit kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang ditetapkan	Sebagian besar Pekerja berperan aktif memberikan input konstruktif, umpan balik, informasi dan/atau dukungan dalam Kegiatan KP untuk lingkup unit kerjanya dan unit lain yang terkait dalam departemen	Sebagian besar Pekerja berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan KP lingkup organisasi, dan dan mampu berkolaborasi untuk mencapai tujuan Kegiatan KP
1.2.4 Keterlibatan Perwakilan Departemen/Bagian/Seksi dalam Tim Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan	Tidak terdapat Tim Manajemen Risiko KP yang ditunjuk secara formal oleh perusahaan	Tim Manajemen Risiko KP beranggotakan Bagian K3 dan Bagian KO	Tim Manajemen Risiko KP beranggotakan Bagian K3 dan Bagian KO serta perwakilan Bagian Operasional sebesar ≤80% dari total jumlah Bagian Operasional	Tim Manajemen Risiko KP beranggotakan Bagian K3 dan Bagian KO serta perwakilan Bagian Operasional sebesar 80-99% dari total jumlah Bagian Operasional	Tim Manajemen Risiko KP beranggotakan Bagian K3 dan Bagian KO serta perwakilan seluruh Bagian Operasional

1.2.5 Peran Perwakilan Departemen/Bagian/Seksi dalam Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan	Sebagian besar Perwakilan Departemen/Bagian /Seksi tidak berperan dalam Tim Manajemen Risiko KP	Sebagian besar Perwakilan Departemen/Bagian /Seksi yang dipilih melaksanakan tanggung jawabnya dalam Tim Manajemen Risiko KP hanya apabila ada isu dengan pekerjaannya atau ketika diminta oleh KTT/PJO	Sebagian besar Perwakilan Departemen/Bagian /Seksi yang dipilih berpartisipasi dalam Tim Manajemen Risiko KP sesuai dengan tanggung jawab yang ditetapkan	Sebagian besar Perwakilan Departemen/Bagian /Seksi yang dipilih berperan aktif memberikan input konstruktif, umpan balik, informasi dan/atau dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan Tim Manajemen Risiko KP	Seluruh Perwakilan Departemen/Bagian/ Seksi yang dipilih mampu untuk saling menyelaraskan pemahaman, melakukan pertukaran informasi yang tepat, dan mampu berkolaborasi dalam tim untuk mencapai tujuan Manajemen Risiko KP lingkup organisasi
1.2.6 Keterlibatan Pekerja Non Pengawas dalam Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan	Pekerja Non Pengawas tidak terlibat dalam Manajemen Risiko. Seluruhnya dilakukan oleh Pengawas Operasional	Pengawas hanya melibatkan <70% dari total anggotanya dalam proses Manajemen Risiko aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya	Pengawas melibatkan 70 s.d. 79% dari total anggotanya dalam proses Manajemen Risiko aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya	Pengawas melibatkan 80 s.d. 99% dari total anggota dalam proses Manajemen Risiko aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya	Pengawas melibatkan seluruh anggota dalam proses Manajemen Risiko aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya
1.2.7 Peran Pekerja Non Pengawas dalam Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan	Pekerja Non Pengawas tidak berperan/berkontribusi dalam Manajemen Risiko KP	Sebagian besar Pekerja Non Pengawas melaksanakan tanggung jawabnya dalam Manajemen Risiko KP apabila ada isu dengan pekerjaannya atau ketika diminta oleh pimpinan unit/tim kerjanya	Sebagian besar Pekerja Non Pengawas berpartisipasi dalam Manajemen Risiko KP sesuai dengan tanggung jawab yang ditetapkan	Sebagian besar Pekerja Non Pengawas berperan aktif memberikan input konstruktif, umpan balik, informasi dan/atau dukungan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja Manajemen Risiko KP	Seluruh Pekerja Non Pengawas mampu mampu memberikan informasi dan dukungan yang tepat, berkolaborasi dalam tim untuk mencapai tujuan Manajemen Risiko KP lingkup organisasi
1.2.8 Keterlibatan Komite Keselamatan Pertambangan dalam Penyusunan Tujuan, Sasaran, dan Program Keselamatan Pertambangan	Komite KP tidak terlibat dalam penyusunan tujuan, sasaran, dan program KP	Hanya Ketua Komite KP yang terlibat dalam penyusunan tujuan, sasaran, dan program KP	Ketua dan Sekretaris Komite KP terlibat dalam penyusunan tujuan, sasaran, dan program KP	Ketua, Sekretaris, dan beberapa Perwakilan Departemen/Bagian dalam Komite KP terlibat dalam penyusunan tujuan, sasaran, dan program KP	Ketua, Sekretaris, dan seluruh perwakilan Departemen/Bagian dalam Komite KP terlibat dalam penyusunan tujuan, sasaran, dan program KP
1.2.9	Sebagian besar Anggota Komite KP	Sebagian besar Anggota Komite KP	Sebagian besar Anggota Komite KP	Sebagian besar Anggota Komite KP	Seluruh anggota Komite KP saling

Peran Anggota Komite Keselamatan Pertambangan dalam Penyusunan Tujuan, Sasaran, dan Program Keselamatan Pertambangan	tidak berperan/berkontribusi dalam penyusunan tujuan, sasaran, dan program KP	hanya sekedar hadir dalam rapat/diskusi penyusunan tujuan, sasaran, dan program KP namun tidak berkontribusi / berpartisipasi aktif	berpartisipasi dalam rapat/diskusi penyusunan tujuan, sasaran, dan program KP sesuai dengan tanggung jawab yang ditetapkan	berperan aktif memberikan input konstruktif dalam rapat/diskusi penyusunan tujuan, sasaran, dan program KP	menyelaraskan pemahaman, menyepakati <i>trade-off</i> , dan mampu berkolaborasi dalam rapat/diskusi penyusunan tujuan, sasaran, dan program KP untuk mencapai tujuan yang diharapkan
1.2.10 Peran Komite Keselamatan Pertambangan dalam Pemantauan Pelaksanaan dan Perkembangan Tujuan, Sasaran, dan Program Keselamatan Pertambangan	Komite KP tidak berperan/berkontribusi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan perkembangan tujuan, sasaran, dan program KP	Komite KP ikut terlibat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan perkembangan tujuan, sasaran, dan program KP hanya ketika terjadi permasalahan atau kasus KP	Komite KP terlibat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan perkembangan tujuan, sasaran, dan program KP secara kontinu dan terencana	Komite KP mampu menindaklanjuti pelaksanaan dan perkembangan tujuan, sasaran, dan program KP yang belum sesuai berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi	Komite KP mampu menindaklanjuti pelaksanaan dan perkembangan tujuan, sasaran, dan program KP yang belum sesuai dan yang telah sesuai berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, secara tepat dan pada waktu yang tepat
1.2.11 Kehadiran dan Keterlibatan Ketua Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite Keselamatan Pertambangan	Ketua Komite KP tidak pernah hadir dalam Rapat Komite KP selama periode satu tahun	Ketua Komite KP hadir < 70% dari total Rapat Komite KP selama periode satu tahun	Ketua Komite KP hadir 70 s.d. 79% dari total Rapat Komite KP selama periode satu tahun	Ketua Komite KP hadir 80 s.d. 99% dari total Rapat Komite KP selama periode satu tahun	Ketua Komite KP hadir 100% dalam Rapat Komite KP selama periode satu tahun
1.2.12 Peran Ketua Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite Keselamatan Pertambangan	Ketua Komite KP tidak mengambil peran dalam Rapat Komite KP	Ketua Komite KP menghadiri Rapat Komite KP namun tidak berperan signifikan, mendelegasikan kepada Wakil atau Sekretaris Komite KP untuk memimpin diskusi dan membuat keputusan	Ketua Komite KP memimpin langsung pelaksanaan Rapat Komite KP dan terlibat dalam pembahasan seluruh substansi namun menetapkan sebagian besar keputusan secara terpimpin	Ketua Komite KP memimpin langsung pelaksanaan Rapat Komite KP dan terlibat dalam pembahasan seluruh substansi dan memberikan masukan konstruktif dan valid, umpan balik, informasi dan/atau dukungan yang dibutuhkan,	Ketua Komite KP memimpin langsung pelaksanaan Rapat Komite KP, mampu memberdayakan seluruh peserta untuk berkolaborasi dalam memberikan masukan seluruh substansi pembahasan, dan mampu memimpin pengambilan keputusan dan penetapan kesimpulan melalui

				untuk setiap substansi pembahasan	proses yang inklusif dan tepat, didasarkan hasil konsensus bersama
1.2.13 Kehadiran dan Keterlibatan Wakil Ketua Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite Keselamatan Pertambangan	Wakil Ketua Komite KP tidak pernah hadir dalam Rapat Komite KP selama periode satu tahun	Wakil Ketua Komite KP hadir <70% dari total Rapat Komite KP selama periode satu tahun	Wakil Ketua Komite KP hadir 70 s.d. 79% dari total Rapat Komite KP selama periode satu tahun	Wakil Ketua Komite KP hadir 80 s.d. 99% dari total Rapat Komite KP selama periode satu tahun	Wakil Ketua Komite KP hadir 100% dalam Rapat Komite KP selama periode satu tahun
1.2.14 Peran Wakil Ketua Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite Keselamatan Pertambangan	Wakil Ketua Komite KP tidak terlibat/berperan dalam Rapat Komite KP	Wakil Ketua Komite KP hanya sekedar hadir dalam Rapat Komite KP namun tidak berperan membantu Ketua Komite KP dalam Rapat Komite KP	Wakil Ketua Komite KP berpartisipasi dalam Kegiatan KP sesuai dengan tanggung jawab yang ditetapkan secara terencana	Wakil Ketua Komite KP berperan aktif memberikan input konstruktif dalam Rapat Komite KP	Wakil Ketua Komite KP mampu membantu Ketua Komite KP untuk memberdayakan peserta agar dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan Rapat Komite KP
1.2.15 Kehadiran dan Keterlibatan Sekretaris Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite Keselamatan Pertambangan	Sekretaris Komite KP tidak pernah hadir dalam Rapat Komite KP selama periode satu tahun	Sekretaris Komite KP hadir < 70% dari total Rapat Komite KP selama periode satu tahun	Sekretaris Komite KP hadir 70 s.d. 79% dari total Rapat Komite KP selama periode satu tahun	Sekretaris Komite KP hadir 80 s.d. 99% dari total Rapat Komite KP selama periode satu tahun	Sekretaris Komite KP hadir 100% dalam Rapat Komite KP selama periode satu tahun
1.2.16 Peran Sekretaris Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite Keselamatan Pertambangan	Sekretaris Komite KP tidak terlibat/berperan dalam Rapat Komite KP	Sekretaris Komite KP hanya sekedar hadir dalam Rapat Komite KP namun tidak berperan dalam dalam Rapat Komite KP, hanya berperan jika diminta oleh Ketua Komite KP	Sekretaris Komite KP berpartisipasi dalam Kegiatan KP sesuai dengan tanggung jawab yang ditetapkan secara terencana	Sekretaris Komite KP berperan aktif memberikan input konstruktif dalam Rapat Komite KP	Sekretaris Komite KP mampu menyalurkan pemahaman dan/atau mampu berkolaborasi untuk mencapai tujuan Rapat Komite KP
1.2.17 Kehadiran dan Keterlibatan Anggota Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite	Anggota Komite KP tidak pernah hadir dalam Rapat Komite KP	Tingkat kehadiran Anggota Komite KP dalam Rapat Komite KP selama periode satu tahun < 70% dari total anggota	Tingkat kehadiran Anggota Komite KP dalam Rapat Komite KP selama periode satu tahun 70 s.d. 79% dari total anggota	Tingkat kehadiran Anggota Komite KP dalam Rapat Komite KP selama periode satu tahun 80 s.d. 99% dari total anggota	Tingkat kehadiran Anggota Komite KP dalam Rapat Komite KP selama periode satu tahun 100% dari total anggota

Keselamatan Pertambangan					
1.2.18 Peran Anggota Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite Keselamatan Pertambangan	Anggota Komite KP tidak terlibat/berperan dalam Rapat Komite KP	Sebagian besar Anggota Komite KP hanya sekedar hadir dalam Rapat Komite KP namun hanya berkontribusi dalam dalam Rapat Komite KP jika diminta oleh Ketua Komite KP	Sebagian besar Anggota Komite KP berpartisipasi dalam Rapat Komite KP sesuai dengan tanggung jawab yang ditetapkan atau perintah pimpinan unit kerja	Sebagian besar Anggota Komite KP berperan aktif memberikan input konstruktif, umpan balik, informasi dan/atau dukungan yang dibutuhkan dalam Rapat Komite KP	Seluruh Anggota Komite KP mampu saling menyelaraskan pemahaman dan/atau berkolaborasi untuk mencapai tujuan Rapat Komite KP
1.2.19 Peran Anggota Komite Keselamatan Pertambangan dalam Mewakili Departemen/Bagian nya	Anggota Komite KP tidak terlibat/berperan dalam Rapat Komite KP	Sebagian besar Anggota Komite KP mengikuti Rapat Komite KP tanpa membawa data/informasi relevan/aspirasi terdokumentasi dari departemen/bagian yang diwakilinya	Sebagian besar Anggota Komite KP mengikuti Rapat Komite KP membawa data/informasi relevan/aspirasi terdokumentasi dari departemen/bagian yang diwakilinya, namun tidak dapat menyampaikan dengan tepat pada Rapat Komite KP	Sebagian besar Anggota Komite KP mengikuti Rapat Komite KP membawa data/informasi relevan/aspirasi terdokumentasi dari departemen/bagian yang diwakilinya, dan mampu menyampaikan dengan tepat pada Rapat Komite KP	Seluruh Anggota Komite KP mengikuti Rapat Komite KP dengan membawa data/informasi relevan/aspirasi terdokumentasi dari departemen/bagian yang diwakilinya, menyampaikan dengan tepat, mampu untuk saling menyelaraskan pemahaman dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan Rapat Komite KP
1.2.20 Jumlah Pelaporan Bahaya dan/atau <i>Whistleblowing</i> terkait Keselamatan Pertambangan oleh Pekerja	Tidak ada budaya pelaporan bahaya oleh pekerja, baik secara formal dan informal	Pekerja melakukan pelaporan bahaya hanya secara informal dan tidak konsisten, sehingga tidak terdokumentasi dengan baik	Pelaporan bahaya telah dilakukan secara formal dan sistematis, dengan tingkat partisipasi (jumlah pekerja yang melaporkan) rata-rata hanya $\leq 79\%$ dari total pekerja	Pelaporan bahaya dilakukan secara formal dan sistematis, dengan tingkat partisipasi (jumlah pekerja yang melaporkan) rata-rata 80-94% dari total pekerja	Pelaporan bahaya dilakukan secara proaktif dan konsisten oleh pekerja dengan tingkat partisipasi mencapai 100% total pekerja
1.2.21 Kesesuaian dan Kehandalan Pelaporan Bahaya dan/atau Pengaduan Pelanggaran Keselamatan Pertambangan	Sebagian besar data hasil inventarisasi pelaporan bahaya tidak valid (benar, sah, dan dapat dipertanggung jawabkan)	Sebagian besar bahaya / pengaduan pelanggaran KP yang dilaporkan hanya merupakan jenis kondisi tidak aman dan tindakan tidak	Sebagian besar bahaya / pengaduan pelanggaran KP yang dilaporkan merupakan kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman,	Bahaya yang dilaporkan / pengaduan pelanggaran KP telah mencakup kondisi tidak aman dan tindakan tidak	Seluruh data pelaporan bahaya / pengaduan pelanggaran KP oleh Pekerja adalah valid dan mempresentasikan kondisi nyata pada kegiatan operasional

(Whistleblowing) oleh Pekerja		aman kategori minor, serta masih ditemukan kondisi terlapor yang tidak valid	namun masih ditemukan bahaya di tempat kerja yang tidak terlapor oleh Pekerja	aman termasuk hal kritical, serta deviasi dari sistem operasi yang menjadi kondisi laten penyebab terjadinya kerugian, namun masih terdapat permasalahan terhadap konsistensi validitas	
1.2.22 Jumlah Saran dan Masukan Pekerja untuk Peningkatan Keselamatan Pertambangan	Tidak ada mekanisme partisipasi masukan dari Pekerja, baik secara formal dan informal	Mekanisme partisipasi masukan dari Pekerja hanya secara informal dan tidak konsisten, sehingga terdokumentasi dengan baik	Mekanisme partisipasi masukan dari Pekerja telah dilakukan secara formal dan sistematis, dengan tingkat partisipasi pekerja tambang rata-rata hanya $\leq 79\%$ dari target	Mekanisme partisipasi masukan dari Pekerja hanya secara formal dan sistematis, dengan tingkat partisipasi pekerja tambang rata-rata 80-99% dari target	Tingkat partisipasi Pekerja dalam memberikan saran dan masukan mencapai 100% target
1.2.23 Kesesuaian dan Keandalan Saran dan Masukan Pekerja untuk Peningkatan Keselamatan Pertambangan	Sebagian besar data hasil inventarisasi saran dan masukan dari Pekerja tidak valid (benar, sah, dan dapat dipertanggung jawabkan) dan relevan	Sebagian besar saran dan masukan dari Pekerja hanya terbatas untuk aktivitas/wilayah kerjanya, serta masih ditemukan hal yang tidak valid dan relevan	Sebagian besar saran dan masukan dari Pekerja telah mencakup untuk unit kerja/ departemen/bagiannya, namun masih ditemukan hal yang tidak valid dan relevan	Sebagian besar saran dan masukan dari Pekerja dari pekerja bersifat konstruktif untuk perbaikan kinerja pada aktivitas/wilayah/unit kerja/ departemen/bagiannya	Terdapat saran dan masukan dalam jumlah yang signifikan yang berisikan peluang peningkatan pencapaian target kinerja KP, yang didukung dengan analisis berbasis data dan informasi
1.2.24 Efektivitas Partisipasi Pekerja	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen III.13 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0/3	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen III.13 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0.1/3 s.d. 2/3	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen III.13 dalam 2 tahun terakhir sebesar 2.1/3 s.d. 2.4/3	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen III.13 dalam 2 tahun terakhir sebesar 2.5/3 s.d. 2.9/3	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen III.13 dalam 2 tahun terakhir sebesar 3/3

2. Tanggung Jawab Pimpinan Unit Kerja

A. Parameter: Implementasi Kebijakan Keselamatan Pertambangan

ITEM	RUBRIK				
	1	2	3	4	5
2.1.1 Upaya Internalisasi Nilai-Nilai Inti (<i>Core Values</i>) Perusahaan oleh Manajemen	Manajemen tidak melakukan upaya untuk internalisasi Nilai-Nilai Inti Perusahaan kepada pekerja	Manajemen melakukan upaya untuk internalisasi Nilai-Nilai Inti Perusahaan hanya kepada sebagian kelompok pekerja	Manajemen telah melakukan upaya untuk internalisasi Nilai-Nilai Inti Perusahaan kepada seluruh pekerja	Manajemen telah melakukan upaya untuk internalisasi Nilai-Nilai Inti Perusahaan dan memasukan kepada target kinerja pekerja	Manajemen telah memberikan contoh nyata aktualisasi Nilai-Nilai Inti Perusahaan kepada pekerja
2.1.2 Upaya Internalisasi Aturan Emas Keselamatan Pertambangan (<i>Golden Rules</i>) Perusahaan oleh Manajemen	Manajemen tidak melakukan upaya untuk internalisasi Aturan Emas Keselamatan Pertambangan (<i>Golden Rules</i>) Perusahaan kepada pekerja	Manajemen melakukan upaya untuk internalisasi Aturan Emas Keselamatan Pertambangan (<i>Golden Rules</i>) Perusahaan hanya kepada sebagian kelompok pekerja	Manajemen telah melakukan upaya untuk internalisasi Aturan Emas Keselamatan Pertambangan (<i>Golden Rules</i>) Perusahaan kepada seluruh pekerja	Manajemen telah melakukan upaya untuk internalisasi Aturan Emas Keselamatan Pertambangan (<i>Golden Rules</i>) Perusahaan dan memasukan kepada target kinerja pekerja	Manajemen telah memberikan contoh nyata aktualisasi Aturan Emas Keselamatan Pertambangan (<i>Golden Rules</i>) Perusahaan kepada pekerja
2.1.3 Efektivitas Kebijakan Keselamatan Pertambangan	Nilai rata-rata hasil Audit SMKP Elemen I dalam 2 tahun terakhir: 0%	Nilai rata-rata hasil Audit SMKP Elemen I dalam 2 tahun terakhir: 0.1 – 5.0%	Nilai rata-rata hasil Audit SMKP Elemen I dalam 2 tahun terakhir: 5.1-8%	Nilai rata-rata hasil Audit SMKP Elemen I dalam 2 tahun terakhir: 8.1 - 9.9%	Nilai rata-rata hasil Audit SMKP Elemen I dalam 2 tahun terakhir: 10%
2.1.4 Persepsi Pekerja terhadap Komitmen Manajemen dalam Penerapan Kebijakan Keselamatan Pertambangan	Sebagian besar pekerja memiliki persepsi bahwa Manajemen tidak mendukung penerapan Kebijakan KP. Kebijakan KP masih sering	Sebagian besar pekerja memiliki persepsi bahwa Manajemen berkomitmen untuk menerapkan Kebijakan KP ketika sudah terjadi kecelakaan dan kerugian.	Sebagian besar pekerja memiliki persepsi bahwa Manajemen telah berkomitmen untuk menerapkan Kebijakan dan upaya-upaya KP	Sebagian besar pekerja memiliki persepsi bahwa manajemen Manajemen telah berkomitmen untuk menerapkan Kebijakan dan	Sebagian besar pekerja memiliki persepsi bahwa Manajemen telah menerapkan Kebijakan dan upaya-upaya KP, mengutamakan aspek KP saat terjadi konflik

	dikompromikan untuk kepentingan lainnya dalam kondisi tertentu.		tanpa harus terjadi kecelakaan dan kerugian terlebih dahulu, melalui program KP terencana.	upaya-upaya KP dan apabila terjadi konflik kepentingan, Manajemen memiliki inisiatif untuk mengevaluasi analisis risiko dan mengutamakan aspek KP tetap terpenuhi	kepentingan, dan telah menjadi panutan/teladan yang baik bagi pekerja dalam penerapan KP
--	---	--	--	---	--

B. Parameter: Kepemimpinan dan Komitmen Keselamatan Pertambangan

ITEM	RUBRIK				
	1	2	3	4	5
2.2.1 Persepsi Manajemen Puncak terhadap Peran Keselamatan Pertambangan	Manajemen puncak memiliki persepsi bahwa pengelolaan KP harus dilakukan agar tidak terkena sanksi dari Pemerintah dan/atau Klien serta untuk kepentingan sertifikasi/ pengakuan dari eksternal	Manajemen puncak memiliki persepsi bahwa pengelolaan KP harus dilakukan untuk mencegah kerugian berulang, dengan fokus kepada penyelesaian masalah / kejadian / kasus KP	Manajemen puncak memiliki persepsi bahwa pengelolaan KP harus dilakukan sebagai upaya kepatuhan administratif yang bertujuan fokus untuk mencegah dan menurunkan angka kecelakaan, Kejadian Berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan Penyakit Akibat Kerja sesuai target kinerja	Manajemen puncak memiliki persepsi bahwa pengelolaan KP adalah pendukung kelancaran operasional Pertambangan dan harus dikelola dengan sistem manajemen yang terintegrasi dengan seluruh fungsi di dalam Perusahaan	Manajemen puncak memiliki persepsi bahwa pengelolaan KP merupakan pendukung kelancaran operasional Pertambangan dan investasi yang baik bagi Perusahaan serta bagian dari budaya Perusahaan yang harus terus diimplementasikan dan ditingkatkan secara berkelanjutan
2.2.2 Persepsi Pekerja terhadap Kepemimpinan dan	Sebagian besar pekerja memiliki persepsi bahwa komitmen manajemen puncak	Sebagian besar pekerja memiliki persepsi bahwa komitmen manajemen puncak dalam KP terbatas	Sebagian besar pekerja memiliki persepsi bahwa komitmen manajemen puncak	Sebagian besar pekerja memiliki persepsi bahwa manajemen puncak memiliki komitmen	Sebagian besar pekerja memiliki persepsi bahwa manajemen puncak memiliki komitmen yang tinggi

Komitmen Manajemen	dalam KP sangat kurang	untuk sekedar penyelesaian permasalahan Kasus KP yang telah terjadi	dalam KP untuk pemenuhan minimum kewajiban hukum dan pencapaian target kinerja <i>lagging indicator</i>	pengelolaan KP untuk menunjang sistem produksi dan mencapai target <i>leading</i> dan <i>lagging indicator</i>	dalam KP agar dapat menunjang kinerja operasional yang konsisten handal di berbagai kondisi. Manajemen telah menjadi <i>role model</i> bagi pekerja, telah memberikan dukungan yang memadai dan dorongan untuk inovasi dan perbaikan berkelanjutan
2.2.3 Ketersediaan Anggaran Keselamatan Pertambangan dalam RKAB	Tidak ada alokasi Anggaran KP yang disediakan oleh Manajemen Puncak	Anggaran KP yang disediakan oleh Manajemen Puncak tidak cukup memadai untuk mendukung keberhasilan rencana kerja tahunan	Anggaran KP yang disediakan oleh Manajemen Puncak cukup memadai untuk mendukung keberhasilan rencana kerja tahunan	Anggaran KP yang disediakan oleh Manajemen Puncak telah memadai untuk mendukung keberhasilan rencana kerja tahunan dan rencana <i>contingency</i>	Anggaran KP yang disediakan oleh Manajemen Puncak telah ditetapkan secara <i>cost-efficient</i> untuk mendukung keberhasilan rencana kerja tahunan, rencana cadangan/ <i>alternatif/darurat (contingency)</i> , dan pencapaian visi misi tujuan dan komitmen KP yang tertuang dalam kebijakan, serta untuk peningkatan berkelanjutan
2.2.4 Realisasi Anggaran Keselamatan Pertambangan dalam RKAB	Anggaran Keselamatan Pertambangan pada RKAB tidak terealisasi	Realisasi Anggaran Keselamatan Pertambangan pada RKAB dalam 2 tahun terakhir sebesar <70% dari target	Realisasi Anggaran Keselamatan Pertambangan pada RKAB dalam 2 tahun terakhir sebesar 70-79% dari target	Realisasi Anggaran Keselamatan Pertambangan pada RKAB dalam 2 tahun terakhir sebesar 80-99% dari target	Realisasi Anggaran Keselamatan Pertambangan pada RKAB dalam 2 tahun terakhir sebesar 100% dari target
2.2.5 Kecepatan Manajemen Puncak dalam Merespon Isu Keselamatan Pertambangan	Manajemen puncak apatis dan tidak memiliki atensi dalam merespon isu KP	Manajemen puncak menunda melakukan perbaikan isu KP dan baru mulai menindaklanjuti ketika telah terjadi kerugian	Manajemen puncak melakukan perbaikan atas isu KP sesuai dengan birokrasi yang ditetapkan, dengan fokus kepada isu KP	Manajemen puncak mampu mengambil keputusan dan melakukan perbaikan atas isu KP dengan cepat terhadap isu KP	Manajemen puncak mampu mengambil keputusan dan melakukan perbaikan atas seluruh isu KP dengan cepat, baik kepada isu KP yang

			yang mempengaruhi keberlanjutan operasional	yang telah terjadi, baik isu KP yang bersifat minor, mayor, maupun yang signifikan mempengaruhi keberlanjutan operasional.	telah terjadi, maupun melakukan antisipasi yang tepat untuk isu KP yang berpotensi akan terjadi di masa mendatang
2.2.6 Jumlah Kehadiran Manajemen Puncak pada Site	Tidak ada kegiatan Kunjungan Lapangan Pimpinan Perusahaan (Safety Management Walk Through) baik secara terencana maupun insidental	Kegiatan Kunjungan Lapangan Pimpinan Perusahaan dilakukan secara insidental	Kegiatan Kunjungan Lapangan Pimpinan Perusahaan dilakukan secara formal dan terencana, 1 kali dalam 1 tahun	Kegiatan Kunjungan Lapangan Pimpinan Perusahaan dilakukan secara formal dan terencana dan insidental, >1 kali dalam 1 tahun	Kegiatan Kunjungan Lapangan Pimpinan Perusahaan dilakukan secara formal dan terencana, >2 kali dalam 1 tahun dan dilakukan secara insidental sesuai analisis kondisi perkembangan kegiatan operasional
2.2.7 Peran Manajemen Puncak pada Kunjungan Site	Manajemen Puncak tidak meninjau implementasi pengelolaan KP secara langsung pada kegiatan operasional pertambangan	Manajemen Puncak hanya fokus meninjau pengelolaan KP pada kegiatan/area yang secara historis telah terjadi kasus KP	Manajemen Puncak meninjau pengelolaan KP pada seluruh kegiatan operasional pertambangan dan memberi perhatian secara detail, melakukan interaksi langsung dengan perwakilan pekerja	Manajemen Puncak memberikan masukan masukan konstruktif, umpan balik, informasi dan/atau dukungan yang dibutuhkan, serta solusi untuk perbaikan dan pengelolaan KP untuk seluruh kegiatan operasional pertambangan	Manajemen Puncak hadir memberikan contoh dan keteladanan secara konkrit dalam hal pengelolaan KP
2.2.8 Efektivitas Rapat Tinjauan Manajemen	Nilai rata-rata hasil Audit SMKP Elemen VII dalam 2 tahun terakhir: 0%	Nilai rata-rata hasil Audit SMKP Elemen VII dalam 2 tahun terakhir: 0.1 – 2.0 %	Nilai rata-rata hasil Audit SMKP Elemen VII dalam 2 tahun terakhir: 2.1-4.0%	Nilai rata-rata Audit SMKP Elemen VII dalam 2 tahun terakhir: 4.1 - 4.9%	Nilai rata-rata hasil Audit SMKP Elemen I dalam 2 tahun terakhir: 5%
2.2.9 Peran Pimpinan Tertinggi pada Rapat Tinjauan Manajemen	Manajemen Puncak tidak berperan dalam Rapat Tinjauan Manajemen	Manajemen Puncak menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen namun tidak berperan signifikan, mendelegasikan kepada <i>Management</i>	Manajemen Puncak memimpin langsung pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen dan terlibat dalam pembahasan seluruh substansi namun	Manajemen Puncak memimpin langsung pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen dan terlibat dalam pembahasan seluruh substansi	Manajemen Puncak memimpin Rapat Tinjauan Manajemen, mampu memberdayakan seluruh peserta untuk berkolaborasi dalam

		<i>Representative</i> untuk memimpin diskusi dan membuat keputusan	menetapkan keputusan secara terpinpin	dan memberikan masukan konstruktif dan valid, umpan balik, informasi dan/atau dukungan yang dibutuhkan, untuk setiap substansi pembahasan	memberikan masukan seluruh substansi pembahasan, dan mampu memimpin pengambilan keputusan dan penetapan kesimpulan melalui proses yang inklusif dan tepat, didasarkan hasil konsensus bersama
2.2.10 Dukungan Manajemen untuk Inovasi dan Peningkatan Kinerja Keselamatan Pertambangan	Manajemen Puncak tidak menyediakan sumberdaya yang memadai untuk pelaksanaan inovasi penerapan KP	Manajemen Puncak menyediakan sumberdaya terbatas untuk pelaksanaan inovasi penerapan KP, dengan fokus hanya kepada perbaikan atas isu KP yang telah terjadi melalui tim kerja sementara yang dibentuk secara <i>ad-hoc</i>	Manajemen Puncak menyediakan sumberdaya untuk pelaksanaan inovasi penerapan KP untuk dilakukan secara terencana dan sistematis oleh Bagian K3 dan KO atau departemen/ bagian lainnya yang ditunjuk, dengan fokus untuk peningkatan kinerja aspek penerapan KP yang kurang baik	Manajemen Puncak menyediakan sumberdaya untuk pelaksanaan inovasi penerapan KP untuk dilakukan secara terencana dan sistematis oleh Bagian K3 dan KO atau departemen/ bagian lainnya yang ditunjuk, dengan fokus untuk peningkatan kinerja yang kurang baik maupun untuk mempertahankan kinerja yang sudah baik	Manajemen Puncak menyediakan sumberdaya yang memadai dan telah berhasil menciptakan iklim inovasi di seluruh departemen/bagian dari pekerja, dengan fokus untuk peningkatan kinerja yang kurang baik maupun untuk mempertahankan kinerja yang sudah baik
2.2.11 Pemberian Penghargaan Keselamatan Pertambangan atas Kinerja Keselamatan Pertambangan	Manajemen tidak memberikan penghargaan/apresiasi kepada pekerja/unit kerja yang memiliki prestasi dalam pengelolaan KP	Penghargaan/apresiasi kepada pekerja/unit kerja yang memiliki prestasi baik dalam pengelolaan KP dilakukan secara informal dan insidental, tanpa mekanisme yang berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas	Penghargaan/apresiasi kepada pekerja/unit kerja yang memiliki prestasi baik dalam pengelolaan KP dilakukan melalui mekanisme formal berdasarkan hasil penilaian kinerja	Manajemen telah memberikan kesempatan kepada pekerja/unit kerja yang memiliki prestasi baik dalam pengelolaan KP untuk membagikan pembelajaran kepada pekerja/unit kerja lainnya	Manajemen memberikan dukungan lanjut kepada pekerja/unit kerja yang memiliki prestasi baik dalam pengelolaan KP untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja
2.2.12 Pemberian Sanksi Keselamatan	Manajemen tidak memberikan sanksi / penegakan disiplin	Manajemen mulai memberikan sanksi / penegakan disiplin	Manajemen memberikan sanksi secara proporsional	Manajemen melibatkan semua pihak yang terlibat	Manajemen memberikan dukungan lanjut kepada

Pertambahan atas Pelanggaran Keselamatan Pertambangan	kepada pekerja/unit kerja yang melanggar peraturan KP	kepada pekerja/unit kerja yang melanggar peraturan KP secara informal dan insidentil, tanpa mekanisme yang berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas	jika ada kinerja yang tidak dapat diterima, kelalaian, perilaku berisiko, dan kesalahan yang tidak disengaja, berdasarkan analisis manajemen	untuk menjelaskan jenis pelanggaran, mendiskusikan bagaimana situasi yang memicu pelanggaran, menjelaskan akibat, menyimpulkan pembelajaran, dan memutuskan apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.	pekerja/unit kerja yang telah diberikan sanksi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja
2.2.13 Persepsi Kepala Teknik Tambang / Penanggung Jawab Operasional terhadap Peran Keselamatan Pertambangan	KTT/PJO memiliki persepsi bahwa pengelolaan KP harus dilakukan agar tidak terkena sanksi dari Pemerintah dan/atau Klien serta untuk kepentingan sertifikasi/ pengakuan dari eksternal	KTT/PJO memiliki persepsi bahwa pengelolaan KP harus dilakukan untuk mencegah kerugian berulang (<i>loss control</i>), dengan fokus kepada penyelesaian masalah / kejadian / kasus KP	KTT/PJO memiliki persepsi bahwa bahwa pengelolaan KP harus dilakukan sebagai upaya kepatuhan administratif yang bertujuan fokus untuk mencegah dan menurunkan angka kecelakaan, Kejadian Berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan Penyakit Akibat Kerja sesuai target kinerja	KTT/PJO memiliki persepsi bahwa pengelolaan KP adalah pendukung kelancaran operasional Pertambangan dan harus dikelola dengan sistem manajemen yang terintegrasi dengan seluruh fungsi di dalam Perusahaan	KTT/PJO memiliki persepsi bahwa pengelolaan KP merupakan pendukung kelancaran operasional Pertambangan dan investasi yang baik bagi Perusahaan serta bagian dari budaya Perusahaan yang harus terus diimplementasikan dan ditingkatkan secara berkelanjutan
2.2.14 Tingkat Kehadiran Kepala Teknik Tambang / Penanggung Jawab Operasional di <i>Site</i> (tidak termasuk menghadiri undangan dari Instansi Pembina)	<50%	50 - 59%	60-79%	80-94%	95-100%
2.2.15 Persepsi Pekerja terhadap	Sebagian besar pekerja memiliki persepsi bahwa komitmen	Sebagian besar pekerja memiliki persepsi bahwa komitmen	Sebagian besar pekerja memiliki persepsi bahwa	Sebagian besar pekerja memiliki persepsi bahwa	Sebagian besar pekerja memiliki persepsi bahwa KTT/PJO

<p>Kepemimpinan dan Komitmen dari Kepala Teknik Tambang / Penanggung Jawab Operasional</p>	<p>KTT/PJO dalam pengelolaan KP sangat kurang</p>	<p>KTT/PJO dalam pengelolaan KP terbatas untuk sekedar penyelesaian permasalahan Kasus KP yang telah terjadi</p>	<p>komitmen KTT/PJO dalam pengelolaan KP untuk pemenuhan minimum kewajiban hukum dan pencapaian target kinerja <i>lagging indicator</i></p>	<p>KTT/PJO memiliki komitmen pengelolaan KP untuk menunjang sistem produksi dan mencapai target <i>leading dan lagging indicator</i></p>	<p>memiliki komitmen yang tinggi dalam KP agar dapat menunjang kinerja operasional yang konsisten handal di berbagai kondisi . KTT/PJO telah menjadi <i>role model</i> bagi pekerja dalam hal pengelolaan KP.</p>
<p>2.2.16 Persepsi Pimpinan Departemen/Bagian /Seksi terhadap Peran Keselamatan Pertambangan</p>	<p>Pimpinan Departemen/Bagian /Seksi memiliki persepsi bahwa pengelolaan KP harus dilakukan agar tidak terkena sanksi dari Pemerintah dan/atau Klien serta untuk kepentingan sertifikasi/ pengakuan dari eksternal</p>	<p>Pimpinan Departemen/Bagian /Seksi memiliki persepsi bahwa pengelolaan KP harus untuk mencegah kerugian berulang (<i>loss control</i>), dengan fokus kepada penyelesaian masalah / kejadian</p>	<p>Pimpinan Departemen/Bagian /Seksi memiliki persepsi bahwa pengelolaan KP harus dilakukan sebagai upaya kepatuhan administratif yang bertujuan fokus untuk mencegah dan menurunkan angka kecelakaan, Kejadian Berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan Penyakit Akibat Kerja sesuai target kinerja</p>	<p>Pimpinan Departemen/Bagian /Seksi memiliki persepsi bahwa pengelolaan KP adalah pendukung kelancaran operasional Pertambangan dan harus dikelola dengan sistem manajemen yang terintegrasi dengan seluruh fungsi di dalam Perusahaan .</p>	<p>Pimpinan Departemen/Bagian /Seksi memiliki persepsi bahwa pengelolaan KP merupakan pendukung kelancaran operasional Pertambangan dan investasi yang baik bagi Perusahaan serta bagian dari budaya Perusahaan yang harus terus diimplementasikan dan ditingkatkan secara berkelanjutan</p>
<p>2.2.17 Persepsi Pekerja terhadap Kepemimpinan dan Komitmen dari Pimpinan Departemen/Bagian /Seksi</p>	<p>Sebagian besar pekerja memiliki persepsi bahwa komitmen Pimpinan Departemen/Bagian /Seksi dalam pengelolaan KP sangat kurang</p>	<p>Sebagian besar pekerja memiliki persepsi bahwa komitmen Pimpinan Departemen/Bagian /Seksi dalam pengelolaan KP terbatas untuk sekedar penyelesaian permasalahan Kasus KP yang telah terjadi</p>	<p>Sebagian besar pekerja memiliki persepsi bahwa komitmen Pimpinan Departemen/Bagian /Seksi dalam pengelolaan KP untuk pemenuhan minimum kewajiban hukum dan pencapaian target kinerja <i>lagging indicator</i>.</p>	<p>Sebagian besar pekerja memiliki persepsi bahwa Pimpinan Departemen/Bagian /Seksi memiliki komitmen pengelolaan KP untuk menunjang sistem produksi dan mencapai target <i>leading dan lagging indicator</i></p>	<p>Sebagian besar pekerja memiliki persepsi bahwa Pimpinan Departemen/Bagian /Seksi memiliki komitmen yang tinggi dalam KP agar dapat menunjang kinerja operasional yang konsisten handal di berbagai kondisi. Pimpinan Departemen/Bagian telah menjadi <i>role model</i> bagi anggotanya</p>

					dalam hal pengelolaan KP
2.2.18 Kehadiran KTT/PJO dalam Kegiatan Keselamatan Pertambangan (Rapat, Pertemuan, Seminar, dan Kegiatan Lainnya)	Total persentase kehadiran KTT/PJO sebesar <50% dari total Kegiatan KP dalam 1 tahun	Total persentase kehadiran KTT/PJO sebesar 50-69% dari total Kegiatan KP dalam 1 tahun	Total persentase kehadiran KTT/PJO sebesar 70-79% dari total Kegiatan KP dalam 1 tahun	Total persentase kehadiran KTT/PJO sebesar 80-94% dari total Kegiatan KP dalam 1 tahun	Total persentase kehadiran KTT/PJO sebesar 95-100% dari total Kegiatan KP dalam 1 tahun
2.2.19 Peran KTT/PJO dalam Kegiatan Keselamatan Pertambangan (Rapat, Pertemuan, Seminar, dan Kegiatan Lainnya)	KTT/PJO tidak terlibat/berperan dalam Kegiatan KP	KTT/PJO memberikan informasi satu arah, tidak memberikan ruang partisipasi dan kesempatan kepada anggota untuk merespon kepada pekerja	KTT/PJO memberikan kesempatan untuk diskusi dan konsultasi serta mendelegasikan kepada Pimpinan Unit Kerja untuk memimpin kegiatan KP	KTT/PJO memimpin langsung, membuka ruang kerjasama yang besar dan proses diskusi dua arah, menjadikan pekerja sebagai <i>partner</i> untuk kolaborasi	KTT/PJO mampu memberdayakan pekerja untuk berpartisipasi aktif, memberi solusi, melakukan pertukaran informasi yang tepat, serta mampu memimpin pengambilan keputusan, penetapan kesimpulan/mufakat didasarkan hasil konsensus bersama yang melalui proses rasional dan partisipasi tulus dari para pekerja
2.2.20 Peran KTT/PJO dalam Penyusunan dan Tinjauan Kebijakan Keselamatan Pertambangan	KTT/PJO tidak terlibat/berperan dalam Penyusunan / Tinjauan Kebijakan KP	KTT/PJO hanya sekedar hadir dalam Kegiatan Penyusunan / Tinjauan Kebijakan KP namun tidak berperan signifikan, mendelegasikan kepada pimpinan Bagian K3&KO untuk memimpin diskusi dan membuat keputusan dalam Kegiatan Penyusunan / Tinjauan Kebijakan KP	KTT/PJO berpartisipasi dalam Penyusunan / Tinjauan Kebijakan KP sesuai dengan tanggung jawab yang ditetapkan secara terencana, terlibat dalam pembahasan seluruh substansi namun menetapkan keputusan secara terpimpin	KTT/PJO memimpin langsung pelaksanaan Kegiatan Penyusunan / Tinjauan Kebijakan KP dan terlibat dalam pembahasan seluruh substansi dan memberikan masukan konstruktif dan valid, umpan balik, informasi dan/atau dukungan yang dibutuhkan,	KTT/PJO mampu memberdayakan seluruh peserta untuk berkolaborasi dalam memberikan masukan seluruh substansi pembahasan, dan mampu memimpin pengambilan keputusan dan penetapan kesimpulan melalui proses yang inklusif dan tepat, didasarkan hasil konsensus bersama untuk mencapai

				untuk setiap substansi pembahasan	tujuan Penyusunan / Tinjauan Kebijakan KP
2.2.21 Peran KTT/PJO dalam Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan	KTT/PJO tidak terlibat/berperan dalam Manajemen Risiko KP	KTT/PJO tidak berperan signifikan dalam Manajemen Risiko KP	KTT/PJO ikut berperan dalam tahap perencanaan Manajemen Risiko KP	KTT/PJO ikut berperan dalam tahap perencanaan, komunikasi dan konsultasi, pelaksanaan, dan secara proaktif melakukan pemantauan dan peninjauan Manajemen Risiko KP	KTT/PJO ikut berperan dalam tahap perencanaan, komunikasi dan konsultasi, pelaksanaan, dan pemantauan dan peninjauan Manajemen Risiko KP, serta menindaklanjuti hasil evaluasi untuk peningkatan berkelanjutan
2.2.22 Keterlibatan Pimpinan Departemen/Bagian dalam Penyusunan dan Tinjauan Kebijakan Keselamatan Pertambangan	Kegiatan Penyusunan / Tinjauan Kebijakan KP hanya dihadiri oleh Manajemen	Kegiatan Penyusunan / Tinjauan Kebijakan KP dihadiri oleh Bagian K3 dan Bagian KO dan hanya <70% dari total Pimpinan Bagian Operasional	Kegiatan Penyusunan / Tinjauan Kebijakan KP dihadiri oleh Bagian K3 dan Bagian KO dan hanya 70-79% dari total Pimpinan Bagian Operasional	Kegiatan Penyusunan / Tinjauan Kebijakan KP dihadiri oleh Bagian K3 dan Bagian KO dan hanya 80-99% dari total Pimpinan Bagian Operasional	Kegiatan Penyusunan / Tinjauan Kebijakan KP dihadiri oleh Bagian K3 KO dan seluruh Pimpinan Bagian Operasional
2.2.23 Peran Pimpinan Departemen/Bagian dalam Penyusunan dan Tinjauan Kebijakan Keselamatan Pertambangan	Pimpinan Departemen/Bagian tidak terlibat/berperan dalam Penyusunan / Tinjauan Kebijakan KP	Sebagian besar Pimpinan Departemen/Bagian hanya sekedar hadir dalam Kegiatan Penyusunan / Tinjauan Kebijakan KP namun tidak berperan dalam Kegiatan Penyusunan / Tinjauan Kebijakan KP, hanya berperan ketika diminta oleh KTT/PJO	Sebagian besar Pimpinan Departemen/Bagian berpartisipasi dalam Penyusunan / Tinjauan Kebijakan KP sesuai dengan tanggung jawab yang ditetapkan secara terencana	Sebagian besar Pimpinan Departemen/Bagian berperan aktif memberikan input konstruktif dalam Penyusunan / Tinjauan Kebijakan KP	Seluruh Pimpinan Departemen/Bagian mampu memberikan informasi dan dukungan yang tepat, mentransfer pemahaman dan/atau mampu berkolaborasi untuk mencapai tujuan Penyusunan / Tinjauan Kebijakan KP
2.2.24 Keterlibatan Pimpinan Departemen/Bagian dalam Kegiatan	Kegiatan KP hanya dihadiri oleh Bagian K3 dan Bagian KO	Kegiatan KP dihadiri oleh Bagian K3 dan Bagian KO dan hanya <70% dari total Pimpinan Bagian Operasional	Kegiatan KP dihadiri oleh Bagian K3 dan Bagian KO dan hanya 70-79% dari total Pimpinan Bagian Operasional	Kegiatan KP dihadiri oleh Bagian K3 dan Bagian KO dan hanya 80-99% dari total Pimpinan Bagian Operasional	Kegiatan Keselamatan Pertambangan dihadiri oleh Bagian K3 KO dan seluruh Pimpinan Bagian Operasional

Keselamatan Pertambangan					
2.2.25 Peran Pimpinan Departemen/Bagian dalam Kegiatan Keselamatan Pertambangan	Pimpinan Departemen/Bagian hanya menghadiri Kegiatan KP yang menjadi kewajibannya	Sebagian besar Pimpinan Departemen/Bagian terlibat dan hanya berkontribusi dalam Kegiatan KP apabila ada isu dengan pekerjaannya atau ketika diminta oleh KTT/PJO	Sebagian besar Pimpinan Departemen/Bagian berpartisipasi dalam Kegiatan KP sesuai dengan tanggung jawab yang ditetapkan secara terencana	Sebagian besar Pimpinan Departemen/Bagian berperan aktif memberikan input konstruktif dalam Kegiatan KP	Seluruh Pimpinan Departemen/Bagian mampu mentransfer pemahaman dan/atau mampu berkolaborasi untuk mencapai tujuan Kegiatan KP lingkup organisasi
2.2.26 Keterlibatan Pimpinan Departemen/Bagian /Seksi dalam Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan	Pimpinan Departemen/Bagian/Seksi tidak terlibat dalam Tim Manajemen Risiko yang ditunjuk secara formal oleh perusahaan, hanya secara informal.	Sebagian besar Pimpinan Departemen/Bagian/Seksi terlibat secara formal dalam proses Manajemen Risiko hanya untuk kasus spesifik (<i>ad-hoc basis</i>)	Sebagian besar Pimpinan Departemen/Bagian/Seksi terlibat secara formal dalam Tim Manajemen Risiko untuk Manajemen Risiko spesifik untuk seluruh aktivitas yang terdapat di dalam departemen tersebut	Sebagian besar Pimpinan Departemen/Bagian /Seksi terlibat secara formal dalam Tim Manajemen Risiko untuk Manajemen Risiko seluruh aktivitas yang terdapat di dalam departemen tersebut dan aktivitas lain yang terkait	Seluruh Pimpinan Departemen/Bagian/Seksi terlibat secara formal dalam Tim Manajemen Risiko untuk Manajemen Risiko seluruh aktivitas yang terdapat di dalam departemen tersebut dan aktivitas lain yang terkait
2.2.27 Peran Pimpinan Departemen/Bagian /Seksi dalam Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan	Pimpinan Departemen/Bagian/Seksi tidak berperan/berkontribusi dalam Manajemen Risiko KP	Sebagian besar Pimpinan Departemen/Bagian/Seksi melaksanakan tanggung jawabnya dalam Tim Manajemen Risiko KP, apabila ada isu dengan pekerjaannya atau ketika diminta oleh KTT/PJO	Sebagian besar Pimpinan Departemen/Bagian/Seksi berpartisipasi dalam Tim Manajemen Risiko KP sesuai dengan tanggung jawab yang ditetapkan	Sebagian besar Pimpinan Departemen/Bagian /Seksi berperan aktif memberikan input konstruktif, umpan balik, informasi dan/atau dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan Tim Manajemen Risiko KP	Seluruh Pimpinan Departemen/Bagian/Seksi mampu memberikan informasi dan dukungan yang tepat, saling mentransfer dan menyelaraskan pemahaman dan mampu berkolaborasi dalam tim untuk mencapai tujuan Manajemen Risiko KP lingkup organisasi
2.2.28 Kehadiran Pengawas Operasional/Teknis dalam Pertemuan	Total persentase kehadiran Pengawas Operasional <50% dari total Pertemuan	Total persentase kehadiran Pengawas Operasional 50-69% dari total Pertemuan	Total persentase kehadiran Pengawas Operasional 70-79% dari total Pertemuan	Total persentase kehadiran Pengawas Operasional 80-99% dari total Pertemuan	Total persentase kehadiran Pengawas Operasional 100% dari total Pertemuan

Keselamatan Pertambangan Kelompok Kerja	Keselamatan Pertambangan Terencana Kelompok Kerja dalam 1 tahun	Keselamatan Pertambangan Terencana Kelompok Kerja dalam 1 tahun	Keselamatan Pertambangan Terencana Kelompok Kerja dalam 1 tahun	Keselamatan Pertambangan Terencana dan Insidentil Kelompok Kerja dalam 1 tahun	Keselamatan Pertambangan Terencana dan Insidentil Kelompok Kerja dalam 1 tahun
2.2.29 Peran Pengawas Operasional/Teknis dalam Pertemuan Keselamatan Pertambangan Kelompok Kerja	Pengawas Operasional tidak terlibat/berperan dalam Pertemuan KP Kelompok Kerja	Pengawas Operasional memberikan informasi satu arah, tidak memberikan ruang partisipasi dan kesempatan merespon kepada anggotanya dalam Pertemuan KP Kelompok Kerja	Pengawas Operasional memberikan kesempatan untuk diskusi dan konsultasi dan mendelegasikan kepada anggota yang dipilih untuk memimpin Pertemuan KP Kelompok Kerja	Pengawas Operasional memimpin langsung pertemuan KP Kelompok Kerja, membuka ruang kerjasama yang besar dan proses diskusi dua arah, menjadikan anggota sebagai <i>partner</i> untuk kolaborasi	Pengawas Operasional mampu memberdayakan anggotanya untuk berpartisipasi aktif dan melakukan pertukaran informasi yang tepat, serta mampu memimpin pengambilan keputusan, penetapan kesimpulan/mufakat melalui proses rasional dan partisipasi tulus dari anggota
2.2.30 Keterlibatan Pengawas Operasional/Teknis dalam Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan	Pengawas Operasional tidak terlibat dalam Tim Manajemen Risiko yang ditunjuk secara formal oleh perusahaan, hanya secara informal.	Pengawas Operasional terlibat secara formal dalam proses Manajemen Risiko hanya untuk kasus spesifik (<i>ad-hoc basis</i>)	Pengawas Operasional terlibat secara formal dalam Tim Manajemen Risiko untuk Manajemen Risiko spesifik untuk aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya	Pengawas Operasional terlibat secara formal dalam Tim Manajemen Risiko untuk Manajemen Risiko untuk seluruh aktivitas yang terdapat di dalam departemen tersebut	Pengawas Operasional terlibat secara formal dalam Tim Manajemen Risiko untuk Manajemen Risiko aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dan aktivitas lain yang terkait
2.2.31 Peran Pengawas Operasional/Teknis dalam Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan	Pengawas Operasional tidak berperan/ berkontribusi dalam Manajemen Risiko KP	Sebagian besar Pengawas Operasional melaksanakan tanggung jawabnya dalam Tim Manajemen Risiko KP, apabila ada isu dengan pekerjaannya atau ketika diminta oleh pimpinan unit kerjanya	Sebagian besar Pengawas Operasional berpartisipasi dalam Tim Manajemen Risiko KP sesuai dengan tanggung jawab yang ditetapkan	Sebagian besar Pengawas Operasional dipilih berperan aktif memberikan input konstruktif, umpan balik, informasi dan/atau dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan Tim Manajemen Risiko KP	Seluruh Pengawas Operasional mampu memberikan informasi dan dukungan yang tepat, saling mentransfer dan menyelaraskan pemahaman dan mampu berkolaborasi dalam tim untuk mencapai tujuan Manajemen Risiko KP lingkup organisasi

C. Parameter: Kepatuhan dan Penegakan Peraturan Keselamatan Pertambangan

ITEM	RUBRIK				
	1	2	3	4	5
2.3.1 Inisiatif dan Kesadaran untuk Pemenuhan Persyaratan Perundangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait	Perusahaan tidak mengidentifikasi ketentuan peraturan perundangan (nasional, provinsi, dan lokal), dan persyaratan lainnya yang terkait	Perusahaan mengidentifikasi ketentuan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang terkait dan melakukan pemenuhan/ penyesuaian setelah terjadi permasalahan atau kasus KP	Perusahaan berhasil mengidentifikasi seluruh ketentuan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang terkait secara kontinu dan terencana	Perusahaan secara proaktif melakukan penilaian kepatuhan (<i>compliance assessment</i>) berkala dalam rangka upaya pemenuhan seluruh persyaratan peraturan perundangan dan persyaratan aspek KP lainnya	Perusahaan berhasil membangun sistem untuk mendapatkan notifikasi secara cepat perihal informasi persyaratan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang terbaru, dan mampu melakukan dan konsultasi dengan instansi pembina sektor usaha untuk penyesuaian pemahaman dalam pemenuhan peraturan KP
2.3.2 Efektivitas Pemenuhan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait	Nilai rata-rata hasil Audit SMKP Sub Elemen II.3 dalam 2 tahun terakhir 0/3	Nilai rata-rata hasil Audit SMKP Sub Elemen II.3 dalam 2 tahun terakhir 0.1/3 s.d. 2/3	Nilai rata-rata hasil Audit SMKP Sub Elemen II.3 dalam 2 tahun terakhir 2.1/3 s.d. 2.4/3	Nilai rata-rata hasil Audit SMKP Sub Elemen II.3 dalam 2 tahun terakhir 2.5/3 s.d. 2.9/3	Nilai rata-rata hasil Audit SMKP Sub Elemen II.3 dalam 2 tahun terakhir 3/3
2.3.3 Respon Manajemen Perusahaan terhadap Undangan dari	Manajemen perusahaan apatis dan menghindari undangan kegiatan	Manajemen perusahaan menghadiri undangan kegiatan dari Instansi Pembina Sektor hanya	Manajemen perusahaan menghadiri seluruh undangan kegiatan	Manajemen perusahaan menghadiri seluruh undangan kegiatan	Manajemen perusahaan mampu berpartisipasi aktif dan menindaklanjuti hasil

Instansi Pembina Sektor	dari Instansi Pembina Sektor	jika terdapat kebutuhan dan/atau kepentingan tertentu, cenderung mendelegasikan kepada perwakilan unit kerja terkait	dari Instansi Pembina Sektor	dari Instansi Pembina Sektor dan mampu berpartisipasi aktif dan memberikan informasi dan/atau dukungan yang dibutuhkan	kegiatan dengan Instansi Pembina Sektor untuk peningkatan kepatuhan dan pemenuhan persyaratan perundangan
2.3.4 Kepatuhan Perusahaan dalam menindaklanjuti arahan tertulis Instansi Pembina Sektor melalui Surat Edaran Kepala Inspektur Tambang	Perusahaan tidak menindaklanjuti arahan tertulis aspek KP dari Instansi Pembina Sektor melalui Surat Edaran Kepala Inspektur Tambang	Perusahaan hanya menindaklanjuti sebagian arahan tertulis aspek KP dari Instansi Pembina Sektor melalui Surat Edaran Kepala Inspektur Tambang	Perusahaan menindaklanjuti arahan tertulis aspek KP dari Instansi Pembina Sektor melalui Surat Edaran Kepala Inspektur Tambang, dengan waktu tidak seluruhnya sesuai dengan batas akhir yang ditetapkan	Perusahaan menindaklanjuti seluruh arahan tertulis aspek KP dari Instansi Pembina Sektor melalui Surat Edaran Kepala Inspektur Tambang, sesuai batas waktu yang ditetapkan	Perusahaan menindaklanjuti seluruh arahan tertulis aspek KP dari Instansi Pembina Sektor melalui Surat Edaran Kepala Inspektur Tambang sesuai batas waktu yang ditetapkan, dilaksanakan dengan tepat dan mencapai tujuan yang diharapkan
2.3.5 Kepatuhan Perusahaan dalam menindaklanjuti Hasil Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektur Tambang	Perusahaan tidak menindaklanjuti rekomendasi, larangan, perintah, dan petunjuk hasil pembinaan dan pengawasan dari Inspektur Tambang	Perusahaan hanya menindaklanjuti sebagian larangan, perintah, dan petunjuk yang tertulis pada Buku Tambang hasil pembinaan dan pengawasan dari Inspektur Tambang	Perusahaan menindaklanjuti rekomendasi, larangan, perintah, dan petunjuk yang tertulis pada Buku Tambang hasil pembinaan dan pengawasan dari Inspektur Tambang, dengan waktu tidak seluruhnya sesuai dengan batas akhir yang ditetapkan	Perusahaan menindaklanjuti seluruh larangan, perintah, dan petunjuk yang tertulis pada Buku Tambang hasil pembinaan dan pengawasan dari Inspektur Tambang, sesuai batas waktu yang ditetapkan	Perusahaan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang tertulis pada Berita Acara, dan seluruh larangan, perintah, dan petunjuk yang tertulis pada Buku Tambang hasil pembinaan dan pengawasan dari Inspektur Tambang, sesuai batas waktu yang ditetapkan
2.3.6 Kepatuhan KTT dalam Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan	Nilai rata-rata Audit SMKP Sub Elemen III.12 dalam 2 tahun terakhir 0/16	Nilai rata-rata Audit SMKP Sub Elemen III.12 dalam 2 tahun terakhir 0.1/16 s.d 8.0/16	Nilai rata-rata Audit SMKP Sub Elemen III.12 dalam 2 tahun terakhir 8.1/16 s.d 12.0/16	Nilai rata-rata Audit SMKP Sub Elemen III.12 dalam 2 tahun terakhir 12.1/16 s.d 15.9/16	Nilai rata-rata Audit SMKP Sub Elemen III.12 dalam 2 tahun terakhir 16/16
2.3.7 Kepatuhan KTT dalam Pelaporan Khusus atas Kasus	KTT belum patuh untuk menyampaikan pelaporan khusus	KTT menyampaikan pelaporan khusus kepada KaIT hanya jika terjadi kecelakaan	KTT menyampaikan pelaporan khusus kepada KaIT jika terjadi kecelakaan	KTT menyampaikan pelaporan khusus kepada KaIT jika terjadi kejadian	KTT menyampaikan pelaporan khusus kepada KaIT jika terjadi kejadian berbahaya,

Keselamatan Pertambangan kepada Kepala Inspektur Tambang	kepada KaIT jika terjadi Kasus KP	tambang berakibat mati atau kejadian akibat penyakit tenaga kerja	tambang berakibat mati, cedera berat, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja	berbahaya, kecelakaan tambang berakibat mati, cedera berat, cedera ringan, dan kejadian akibat penyakit tenaga kerja	kecelakaan tambang berakibat mati, cedera berat, cedera ringan, dan kejadian akibat penyakit tenaga kerja sesaat setelah terjadinya kejadian
2.3.8 Kepatuhan Pimpinan Departemen/Bagian dalam menindaklanjuti Arahan / Instruksi KTT terkait pemenuhan Peraturan Keselamatan Pertambangan	Pimpinan Departemen/Bagian tidak menindaklanjuti Arahan / Instruksi KTT yang terkait pemenuhan Peraturan KP	Pimpinan Departemen/Bagian hanya menindaklanjuti sebagian Arahan / Instruksi KTT yang terkait pemenuhan Peraturan KP	Pimpinan Departemen/Bagian menindaklanjuti seluruh Arahan / Instruksi KTT yang terkait pemenuhan Peraturan KP dengan waktu belum seluruhnya sesuai dengan batas akhir yang ditetapkan	Pimpinan Departemen/Bagian menindaklanjuti seluruh Arahan / Instruksi KTT yang terkait pemenuhan Peraturan KP, sesuai batas waktu yang ditetapkan	Pimpinan Departemen/Bagian menindaklanjuti seluruh Arahan / Instruksi KTT yang terkait pemenuhan Peraturan Keselamatan Pertambangan, sesuai batas waktu yang ditetapkan, dan mampu memberikan masukan konstruktif kepada KTT untuk peningkatan kepatuhan pemenuhan Peraturan KP di kemudian hari

D. Parameter: Penetapan Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan dalam Keselamatan Pertambangan

ITEM	RUBRIK				
	1	2	3	4	5
2.4.1 Kemandirian Pengelolaan Keselamatan Pertambangan	Perusahaan bergantung sepenuhnya kepada jasa pihak ketiga dalam pengelolaan KP	Perusahaan menyiapkan kapasitas organisasi dan personel kompeten dalam pengelolaan KP secara minimalis, sehingga sebagian besar pengelolaan KP bergantung kepada jasa pihak ketiga	Perusahaan menyiapkan personel kompeten dalam pengelolaan KP sesuai persyaratan perundangan, namun masih tersentral pada Bagian K3 KO saja,	Manajemen mampu menciptakan kapasitas organisasi dan personel perusahaan pertambangan untuk secara mandiri mengelola KP, namun belum	Manajemen mampu menciptakan kapasitas organisasi dan personel perusahaan pertambangan untuk secara mandiri mengelola KP, dan memberikan

			<p>dan belum memberikan sumberdaya organisasi yang dibutuhkan untuk mengelola KP secara mandiri, sehingga dalam beberapa hal dalam pengelolaan KP masih harus bergantung kepada jasa pihak ketiga</p>	<p>memberikan kepercayaan, peran, tanggung jawab dan otoritas kepada pekerja yang memiliki kemampuan spesialis untuk berperan</p>	<p>kepercayaan, peran, tanggung jawab dan otoritas lebih kepada pekerja yang memiliki kemampuan spesialis maupun memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam bidang keahliannya</p>
<p>2.4.2 Ketersediaan Kepala Teknik Tambang</p>	<p>Perusahaan memiliki KTT yang disahkan oleh KaIT, namun pasca pengesahan KTT tidak lagi menjadi pimpinan tertinggi di <i>site</i> dan kondisi tersebut tidak dilaporkan</p>	<p>Perusahaan memiliki KTT yang disahkan oleh KaIT, merupakan pimpinan tertinggi di <i>site</i>, namun KTT tidak memiliki kewenangan dalam hal pengambilan keputusan terkait alokasi, penyediaan, dan penggunaan sumberdaya anggaran aspek KP untuk menunjang kondisi operasional: seluruh pengambilan keputusan hal-hal tersebut dilakukan oleh manajemen puncak</p>	<p>Perusahaan memiliki KTT yang disahkan oleh KaIT, merupakan pimpinan tertinggi di <i>site</i> namun KTT hanya diberikan kewenangan terbatas oleh Manajemen Puncak. KTT hanya memiliki kewenangan dalam hal pengambilan keputusan secara langsung terkait penggunaan sumberdaya anggaran aspek KP sesuai yang rencana yang ditetapkan.</p>	<p>Perusahaan memiliki KTT yang disahkan oleh KaIT, merupakan pimpinan tertinggi di <i>site</i> dan diberikan kewenangan yang cukup oleh Manajemen Puncak. KTT memiliki kewenangan dalam hal pengambilan keputusan secara langsung terkait alokasi, penyediaan, dan penggunaan sumberdaya anggaran KP sampai batasan tertentu di atas rencana yang ditetapkan. KTT berkonsultasi dan memohon persetujuan kepada Manajemen Puncak yang memiliki otoritas untuk pengambilan keputusan terkait alokasi, penyediaan, dan penggunaan sumberdaya</p>	<p>Perusahaan memiliki KTT yang disahkan oleh KaIT, merupakan pimpinan tertinggi di <i>site</i> dan diberikan kewenangan penuh oleh Manajemen Puncak dalam hal pengambilan keputusan secara langsung terkait alokasi, penyediaan, dan penggunaan sumberdaya anggaran KP maupun untuk menunjang kondisi operasional</p>

				anggaran KP yang melebihi batasan tertentu tersebut	
2.4.3 Ketersediaan Penanggung Jawab Operasional	Perusahaan memiliki PJO yang disahkan oleh KTT, namun pasca pengesahan PJO tidak lagi menjadi pimpinan tertinggi di <i>site</i> dan kondisi tersebut tidak dilaporkan	Perusahaan memiliki PJO yang disahkan oleh KTT, merupakan pimpinan tertinggi di <i>site</i> , namun PJO tidak memiliki kewenangan dalam hal pengambilan keputusan terkait alokasi, penyediaan, dan penggunaan sumberdaya anggaran aspek KP untuk menunjang kondisi operasional: seluruh pengambilan keputusan hal-hal tersebut dilakukan oleh manajemen puncak	Perusahaan memiliki PJO yang disahkan oleh KTT, merupakan pimpinan tertinggi di <i>site</i> namun PJO hanya diberikan kewenangan terbatas oleh Manajemen Puncak. PJO hanya memiliki kewenangan dalam hal pengambilan keputusan secara langsung terkait penggunaan sumberdaya anggaran aspek KP sesuai yang rencana yang ditetapkan.	Perusahaan memiliki PJO yang disahkan oleh KTT, merupakan pimpinan tertinggi di <i>site</i> dan diberikan kewenangan yang cukup oleh Manajemen Puncak. PJO memiliki kewenangan dalam hal pengambilan keputusan secara langsung terkait alokasi, penyediaan, dan penggunaan sumberdaya anggaran KP sampai batasan tertentu di atas rencana yang ditetapkan. PJO berkonsultasi dan memohon persetujuan kepada Manajemen Puncak yang memiliki otoritas untuk pengambilan keputusan terkait alokasi, penyediaan, dan penggunaan sumberdaya anggaran KP yang melebihi batasan tertentu tersebut	Perusahaan memiliki PJO yang disahkan oleh KTT, merupakan pimpinan tertinggi di <i>site</i> dan diberikan kewenangan penuh oleh Manajemen Puncak dalam hal pengambilan keputusan secara langsung terkait alokasi, penyediaan, dan penggunaan sumberdaya anggaran KP maupun untuk menunjang kondisi operasional
2.4.4 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Teknik Tambang / Penanggung Jawab Operasional	KTT/PJO tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundangan	KTT/PJO melaksanakan <70% dari total tugas KTT sesuai peraturan perundangan	KTT/PJO melaksanakan 70-79% dari total tugas KTT sesuai peraturan perundangan	KTT/PJO melaksanakan 80-99% dari total tugas KTT sesuai peraturan perundangan	KTT/PJO melaksanakan 100% tugasnya sesuai peraturan perundangan

2.4.5 Ketersediaan Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten	Perusahaan tidak memiliki Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten. Perusahaan tidak memiliki <i>manpower planning</i> yang mempertimbangkan kajian risiko dan persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya yang terkait	Perusahaan memiliki Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten sejumlah <70% dari total kebutuhan pada <i>manpower planning</i> berdasarkan proses bisnis dan profil risiko	Perusahaan memiliki Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten sejumlah 70-79% dari total analisis kebutuhan berdasarkan proses bisnis dan profil risiko	Perusahaan memiliki Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten sejumlah 80-99% dari total analisis kebutuhan berdasarkan proses bisnis dan profil risiko	Perusahaan memiliki Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten sejumlah 100% dari total analisis kebutuhan berdasarkan proses bisnis dan profil risiko
2.4.6 Penyediaan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknis	Perusahaan tidak memiliki Pengawas Operasional dan Pengawas Teknis	Perusahaan memiliki Pengawas Operasional dan Pengawas Teknis sejumlah <70% dari total analisis kebutuhan berdasarkan proses bisnis dan profil risiko	Perusahaan memiliki Pengawas Operasional dan Pengawas Teknis sejumlah 70-79% dari total analisis kebutuhan berdasarkan proses bisnis dan profil risiko	Perusahaan memiliki Pengawas Operasional dan Pengawas Teknis sejumlah 80-99% dari total analisis kebutuhan berdasarkan proses bisnis dan profil risiko	Perusahaan memiliki Pengawas Operasional dan Pengawas Teknis sejumlah 100% dari total analisis kebutuhan berdasarkan proses bisnis dan profil risiko
2.4.7 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas Operasional dan Pengawas Teknis	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen III.5 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen III.5 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0.1/4 s.d 2/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen III.5 dalam 2 tahun terakhir sebesar 2.1/4 s.d 3/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen III.5 dalam 2 tahun terakhir sebesar 3.1/4 s.d 3.9/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen III.5 dalam 2 tahun terakhir sebesar 4/4
2.4.8 Ketersediaan dan Kewenangan Bagian K3 dan Bagian KO Pertambangan	Perusahaan tidak memiliki Bagian K3 dan KO	Bagian K3 KO tidak berada langsung di bawah KTT dalam struktur organisasi	Bagian K3 KO berada langsung di bawah KTT dalam struktur organisasi namun belum dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja serta sifat atau luasnya pekerjaan	Bagian K3 KO berada langsung di bawah KTT dalam struktur organisasi dan telah dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja serta sifat atau luasnya pekerjaan	Bagian K3 dan KO memiliki kewenangan dan jumlah yang sesuai, dan diberikan tanggung jawab lebih untuk memimpin Penelitian dan Pengembangan (<i>Research & Development</i>) terkait KP
2.4.9 Penetapan <i>Job Description</i> terkait Keselamatan	Tidak ada penetapan tugas dan tanggung jawab aspek KP untuk pekerja	Hanya Bagian K3 dan Bagian KO yang memiliki tugas dan	Hanya Bagian K3 dan Bagian KO serta pimpinan departemen yang	Hanya Bagian K3 dan Bagian KO, pimpinan departemen,	Seluruh pekerja memiliki tugas dan tanggung jawab aspek KP yang menjadi

Pertambahan untuk Pekerja		tanggung jawab aspek KP	memiliki tugas dan tanggung jawab aspek KP	pengawas operasional dan pengawas teknis yang memiliki tugas dan tanggung jawab aspek KP	bagian dari indikator kinerja pekerja
2.4.10 Pemberian Dukungan dan Kewenangan kepada Pekerja untuk Menyatakan Keberatan Bekerja jika Syarat Keselamatan Pertambahan Diragukan	Tidak ada mekanisme untuk menyatakan keberatan bekerja jika persyaratan KP diragukan. Pekerja diwajibkan untuk melaksanakan seluruh <i>work order</i> dalam setiap kondisi.	Hanya Pimpinan Departemen/Bagian/Seksi yang diberikan kewenangan untuk mewakili pekerja yang menyatakan keberatan bekerja jika persyaratan KP diragukan	Hanya Pimpinan Departemen/Bagian/Seksi dan Pengawas Operasional dari tiap pekerjaan diberikan kewenangan untuk mewakili pekerja yang menyatakan keberatan bekerja jika persyaratan KP diragukan	Seluruh pekerja telah diberikan kesempatan untuk menyatakan keberatan bekerja jika persyaratan KP diragukan, namun pada prakteknya masih terdapat permasalahan ketidakadilan sosial di tempat kerja akibat ketidaksejajaran kekuasaan/otoritas, sehingga pekerja tidak berani untuk menyatakan keberatan bekerja	Setiap pekerja dari setiap jenjang pekerja diberikan dukungan secara adil untuk menyatakan keberatan bekerja jika persyaratan KP diragukan, dan telah terdapat mekanisme verifikasi yang adil dan transparan.
2.4.11 Penerapan Mekanisme Pemilihan Perwakilan Pekerja pada Komite Keselamatan Pertambahan	Pemilihan perwakilan Pekerja pada Komite KP tanpa ada pertimbangan apapun oleh manajemen puncak, secara otoriter	Pemilihan perwakilan Pekerja pada Komite KP dilakukan melalui proses diskusi sepihak antara manajemen puncak dan KTT/PJO	Pemilihan perwakilan Pekerja pada Komite KP sesuai dengan tingkat jabatan	Pemilihan perwakilan Pekerja pada Komite KP dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal, namun belum ada pertimbangan kompetensi dan komposisi	Pemilihan perwakilan Pekerja pada Komite KP dilakukan melalui mekanisme yang aspiratif dan demokratis, dengan mempertimbangkan kompetensi dan komposisi
2.4.12 Persepsi Manajemen terhadap Pengelolaan Pekerja	Manajemen memandang Pekerja sebagai bagian sementara dari perusahaan yang harus diambil manfaat sebesar-besarnya dan akan mudah digantikan	Manajemen memandang Pekerja sebagai liabilitas, menjadi beban yang harus dikendalikan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan	Manajemen memandang Pekerja sebagai sumberdaya positif yang harus dimaksimalkan dalam perannya untuk mengendalikan risiko	Manajemen memandang Pekerja sebagai aset perusahaan yang harus dikembangkan <i>value</i> nya sehingga dapat berkontribusi secara progresif	Manajemen memandang Pekerja sebagai mitra strategis yang diberikan sumberdaya penunjang yang memadai untuk mencapai tujuan

				untuk peningkatan kinerja KP	bersama dalam pengelolaan KP
--	--	--	--	------------------------------	------------------------------

E. Parameter: Manajemen Strategi dan Operasi Keselamatan Pertambangan

ITEM	RUBRIK				
	1	2	3	4	5
2.5.1 Formulasi Strategi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan	Tidak ada target, sasaran, dan strategi Pengelolaan KP	Target dan sasaran tahunan Pengelolaan KP belum spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terdapat tenggat waktu (<i>SMART</i>). Belum dilakukan pengembangan analisis kondisi dan isu strategis maupun penilaian konteks dalam perencanaan strategis untuk pengelolaan KP	Sebagian besar target dan sasaran tahunan Pengelolaan KP telah <i>SMART</i> Sebagian besar target untuk pemenuhan jumlah minimum persyaratan perundangan	Seluruh target sasaran dan telah memenuhi <i>SMART</i> , serta telah dikembangkan dengan mempertimbangkan analisis kondisi dan isu strategis pengelolaan KP Telah ditetapkan faktor kunci keberhasilan.	Seluruh target sasaran dan telah memenuhi <i>SMART</i> dan telah terdapat target untuk mencapai target penilaian yang lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (<i>beyond compliance</i>) dan telah dikembangkan alternatif strategis berdasarkan perencanaan skenario yang dikembangkan dengan memperhatikan faktor ketidakpastian
2.5.2 Penjabaran dan Penyelarasan Strategi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan	Tidak ada upaya penjabaran (<i>cascading</i>) dan penyelarasan (<i>alignment</i>) Strategi KP di setiap jenjang organisasi	Target dan sasaran tahunan Pengelolaan KP hanya pada Bagian K3 dan Bagian KO, sehingga masih terdapat konflik antara sasaran (<i>objectives</i>) KP dan sasaran aspek lainnya	Target dan sasaran tahunan Pengelolaan KP hanya pada Bagian K3 dan Bagian KO, dan beberapa Bagian Operasional saja, sehingga proses bisnis belum berelasi sepenuhnya dengan strategi dan target	Target dan sasaran KP telah ada di masing-masing departemen/bagian dan menjadi poin utama dalam penyusunan rencana kegiatan. Proses bisnis telah berelasi sepenuhnya	Target dan sasaran KP telah diturunkan di seluruh departemen/bagian hingga Indikator Kinerja Utama (<i>Key Performance Indicator</i>) pekerja

			<i>Key Performance Indicator</i> (KPI) pekerja belum berelasi dengan pencapaian target kinerja perusahaan	dengan perencanaan strategis KP. Telah dilakukan penyelarasan secara vertikal dan horizontal.	
2.5.3 Ruang Lingkup Pemantauan Pencapaian Tujuan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan	Monitoring pengelolaan KP dilakukan secara tidak terencana dan sistematis	Monitoring pengelolaan KP terfokus pada penyebab kegagalan dalam pelaksanaan KP yang telah terjadi	Monitoring pengelolaan KP terfokus pada pencapaian <i>lagging indicator</i> , dan ruang lingkup terbatas pada faktor-faktor kondisi di dalam sistem	Monitoring pengelolaan KP terhadap <i>progress</i> pencapaian target <i>leading</i> dan <i>lagging indicator</i> , serta memantau kondisi apa yang terjadi di dalam batas sistem dan di lingkungan luar batas sistem untuk jangka pendek, untuk membantu perbaikan terus-menerus serta mengantisipasi potensi tujuan yang tidak tercapai.	Monitoring pengelolaan KP merupakan proses berkelanjutan, yang dapat mendeteksi kondisi kritikal yang secara serius dapat mempengaruhi kinerja sistem, tantangan dan peluang, dalam jangka pendek & jangka panjang – secara positif atau negatif, dan mampu menindaklanjuti mengetahui apa yang harus dicari untuk mempertahankan kinerja
2.5.4 Efektivitas Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keselamatan Pertambangan	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen V.1 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0/20	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen V.1 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0.1/20 s.d 10/20	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen V.1 dalam 2 tahun terakhir sebesar 10.1/20 s.d 15/20	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen V.1 dalam 2 tahun terakhir sebesar 15.1/20 s.d 19.9/20	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen V.1 dalam 2 tahun terakhir sebesar 20/20

F. Parameter: Informasi, Komunikasi, Pendampingan, Konsultasi Keselamatan Pertambangan

ITEM	RUBRIK				
	1	2	3	4	5
2.6.1 Kesesuaian Induksi Keselamatan Pertambangan	Induksi KP tidak dilakukan kepada Pekerja dan setiap orang yang memasuki wilayah IUP dan wilayah proyek	Induksi KP dilakukan kepada Pekerja dan setiap orang yang memasuki wilayah IUP dan wilayah proyek, namun tidak konsisten	Induksi KP dilakukan kepada Pekerja dan setiap orang yang memasuki wilayah IUP dan wilayah proyek secara konsisten, namun materi masih bersifat umum, belum terdapat materi induksi yang bersifat khusus untuk melakukan pekerjaan/memasuki area tertentu	Induksi KP dilakukan kepada Pekerja dan setiap orang yang memasuki wilayah IUP dan wilayah proyek secara konsisten, baik informasi yang bersifat umum maupun khusus, telah melakukan verifikasi terhadap pemahaman, namun materi belum adaptif dengan perkembangan risiko operasional perusahaan	Induksi KP dilakukan kepada Pekerja dan setiap orang yang memasuki wilayah IUP dan wilayah proyek secara konsisten, baik informasi yang bersifat umum maupun khusus, dan telah adaptif serta disesuaikan dengan perkembangan risiko operasional perusahaan, serta disesuaikan dengan sasaran yang akan diberikan informasi
2.6.2 Jumlah Pertemuan Keselamatan Pertambangan	Pertemuan KP secara terencana tidak dilakukan, hanya bersifat insidental sehingga tidak terdokumentasi	Realisasi Pertemuan KP sebesar <70% dari target	Realisasi Pertemuan KP sebesar 70-79% dari target	Realisasi Pertemuan KP sebesar 80-99% dari target	Realisasi Pertemuan KP sebesar 100% dari target
2.6.3 Kualitas Pertemuan Keselamatan Pertambangan	Pertemuan KP dilakukan tanpa rencana dan tujuan spesifik	Pertemuan KP dilakukan hanya jika ada kasus / permasalahan KP dan tidak terstruktur	Pertemuan KP dilakukan secara terencana (sudah memiliki jadwal rutin), dengan agenda terstruktur, namun pemilihan topik belum	Pertemuan KP dilakukan secara terencana, dengan agenda terstruktur dan adaptif sesuai skala prioritas	Pertemuan KP dilakukan secara terencana dengan agenda yang terstruktur dan adaptif sesuai skala prioritas, serta

			mempertimbangkan prioritas		dilaksanakan secara efektif dan efisien
2.6.4 Jumlah Kampanye Keselamatan Pertambangan	Kampanye KP tidak dilakukan	Realisasi Kampanye KP sebesar <70% dari target	Realisasi Kampanye KP sebesar 70-79% dari target	Realisasi Kampanye KP sebesar 80-99% dari target	Realisasi Kampanye KP sebesar 100% dari target
2.6.5 Efektivitas Kampanye Keselamatan Pertambangan	Kampanye KP sudah berjalan, namun tidak menarik dan tidak menggugah kesadaran pekerja terhadap KP	Kampanye KP menarik perhatian dari pekerja dan telah berhasil membangun kesadaran pekerja terhadap KP	Kampanye KP telah berhasil membangun kesadaran pekerja terhadap KP dan menumbuhkan ketertarikan pekerja untuk berpartisipasi dalam pengelolaan KP	Kampanye KP telah berhasil menumbuhkan keinginan dan kemauan pekerja untuk berpartisipasi dalam pengelolaan KP secara konkrit	Kampanye KP telah berhasil menggerakkan pekerja untuk bekerja secara aman dan berpartisipasi secara konkrit dalam pengelolaan KP
2.6.6 Efektivitas Komunikasi Keselamatan Pertambangan Eksternal dengan Mitra Kerja (Customer, Kontraktor, Sub Kontraktor, dll)	Dalam pelaksanaan pekerjaan, tidak dilakukan koordinasi dan komunikasi KP dengan mitra kerja	Dalam pelaksanaan pekerjaan, dilakukan koordinasi dan komunikasi KP dengan mitra kerja secara insidental (tidak terencana)	Dalam pelaksanaan pekerjaan, dilakukan koordinasi dan komunikasi KP dengan mitra kerja secara terencana dan sistematis	Koordinasi dan komunikasi KP dengan mitra kerja dilakukan secara kontinu (tidak dibatasi oleh proses formal) dan telah terdapat keterbukaan terhadap informasi KP yang penting	Koordinasi dan komunikasi KP dengan mitra kerja dilakukan dengan efektif pesan tersampaikan dengan benar dan tepat, hal-hal yang memiliki dampak terhadap KP seluruhnya terinformasikan dengan baik
2.6.7 Efektivitas komunikasi vertikal antar pimpinan unit kerja dengan anggota	Pimpinan unit kerja tidak memberikan arahan kepada anggota kerja terkait pelaksanaan pekerjaan yang aman dan selamat, anggota kerja diberikan kebebasan untuk menyelesaikan pekerjaan	Pimpinan unit kerja memberikan arahan kepada anggota kerja hanya terkait kejadian yang menjadi isu organisasi, tidak terencana	Pimpinan unit kerja memberikan arahan kepada anggota kerja sebelum pekerjaan dimulai, terkait pelaksanaan pekerjaan yang aman dan selamat	Pimpinan unit kerja dan anggota kerja berdiskusi sebelum pekerjaan dimulai, berkoordinasi selama pekerjaan dilaksanakan, secara verbal dan/atau nonverbal, terkait pelaksanaan pekerjaan yang aman dan selamat	Pimpinan unit kerja dan anggota kerja mampu melakukan komunikasi secara efektif (pesan tersampaikan dengan baik), sebelum pekerjaan dimulai, pada saat pekerjaan dilaksanakan, dan setelah pekerjaan, dan mampu bersinergi positif
2.6.8	Sesama anggota tim kerja bekerja secara	Komunikasi horisontal antar rekan kerja	Komunikasi horisontal antar rekan kerja	Komunikasi horisontal antar	Sesama anggota tim kerja berkomunikasi

Efektivitas komunikasi horisontal antar rekan kerja	individualis tanpa berkoordinasi	dilakukan dengan buruk	dilakukan dengan secukupnya, tanpa inisiatif lebih dan keterbukaan terhadap informasi KP yang penting	rekan kerja dilakukan dengan baik, telah terdapat keterbukaan terhadap informasi KP yang penting	dengan efektif: pesan tersampaikan dengan benar dan tepat, hal-hal yang memiliki dampak terhadap KP seluruhnya terinformasikan dengan baik
2.6.9 Efektivitas komunikasi antar ketua kelompok kerja	Antar ketua kelompok kerja (<i>Group Leader</i>) yang memiliki keterkaitan dalam pekerjaan bekerja secara independen tanpa berkoordinasi	Komunikasi horisontal antar ketua kelompok kerja dilakukan dengan buruk	Komunikasi horisontal antar ketua kelompok kerja dilakukan dengan secukupnya, tanpa inisiatif lebih dan keterbukaan terhadap informasi KP yang penting	Komunikasi horisontal antar ketua kelompok kerja dilakukan dengan baik, telah terdapat keterbukaan terhadap informasi KP yang penting	Antar ketua kelompok kerja yang memiliki keterkaitan dalam pekerjaan berkomunikasi dengan efektif: pesan tersampaikan dengan benar dan tepat, hal-hal yang memiliki dampak terhadap KP seluruhnya terinformasikan dengan baik
2.6.10 Efektivitas komunikasi antar penanggung jawab gilir kerja/ <i>shift</i>	Penanggung jawab antar <i>shift</i> kerja bekerja secara independen tanpa berkoordinasi	Komunikasi horisontal antar penanggung jawab gilir kerja/ <i>shift</i> dilakukan dengan buruk	Komunikasi horisontal antar penanggung jawab gilir kerja/ <i>shift</i> dilakukan dengan secukupnya, tanpa inisiatif lebih dan keterbukaan terhadap informasi KP yang penting	Komunikasi horisontal antar penanggung jawab gilir kerja/ <i>shift</i> dilakukan dengan baik, telah terdapat keterbukaan terhadap informasi KP yang penting	Antar penanggung jawab <i>shift</i> kerja berkomunikasi dengan efektif: pesan tersampaikan dengan benar dan tepat, hal-hal yang memiliki dampak terhadap KP seluruhnya terinformasikan dengan baik
2.6.11 Kehandalan Fasilitas dan Media Penunjang Komunikasi Keselamatan Pertambangan	Fasilitas dan Media Penunjang Komunikasi KP belum disediakan	Fasilitas dan Media Penunjang Komunikasi KP telah tersedia namun dengan kondisi buruk dan tidak cukup	Fasilitas dan Media Penunjang Komunikasi KP telah tersedia namun dengan jumlah yang cukup namun kondisi tidak seluruhnya memadai	Fasilitas Penunjang dan Media Komunikasi KP disediakan sesuai dengan kebutuhan maupun pertimbangan risiko dan prioritas, namun	Fasilitas Penunjang dan Media Komunikasi KP disediakan sesuai dengan kebutuhan maupun pertimbangan risiko dan prioritas, dengan

				kondisi tidak seluruhnya memadai	kondisi yang memadai
2.6.12 Jumlah <i>Mentoring, Coaching, dan Counselling</i> untuk Pekerja dari Pimpinan Tim Kerja	<i>Mentoring, Coaching, dan Counselling</i> tidak diberikan oleh pimpinan untuk Pekerja	Realisasi <i>Mentoring, Coaching, dan Counselling</i> untuk Pekerja sebesar <70% dari target	Realisasi <i>Mentoring, Coaching, dan Counselling</i> untuk Pekerja sebesar 70-79% dari target	Realisasi <i>Mentoring, Coaching, dan Counselling</i> untuk Pekerja sebesar 80-99% dari target	Realisasi <i>Mentoring, Coaching, dan Counselling</i> untuk Pekerja sebesar 100% dari target
2.6.13 Efektivitas <i>Mentoring, Coaching, dan Counselling</i> untuk Pekerja dari Pimpinan Tim Kerja	Sebagian besar pekerja tambang tidak merasakan manfaat dari <i>Mentoring, Coaching, dan Counselling</i> yang diberikan	Sebagian besar pekerja tambang menyatakan <i>Mentoring, Coaching, dan Counselling</i> yang diberikan telah berhasil memberikan pekerja kemampuan dan petunjuk penyelesaian permasalahan KP yang dihadapi	Sebagian besar pekerja tambang menyatakan <i>Mentoring, Coaching, dan Counselling</i> yang diberikan telah berhasil memberikan pekerja kemampuan dan petunjuk untuk menciptakan pengelolaan KP yang lebih baik di tempat kerja sesuai <i>best practice</i> yang ada	Sebagian besar pekerja tambang menyatakan <i>Mentoring, Coaching, dan Counselling</i> yang diberikan telah berhasil memberikan pekerja kemampuan dan petunjuk untuk mengidentifikasi gagasan solusi yang lebih kreatif dan efisien pengelolaan KP yang lebih baik di tempat kerja	Sebagian besar pekerja tambang menyatakan <i>Mentoring, Coaching, dan Counselling</i> yang diberikan telah berhasil memberikan pekerja kemampuan dan petunjuk untuk mengubah permasalahan KP di tempat kerja menjadi peluang
2.6.14 Ketersediaan Ruang dan Akses Penyampaian Informasi Keselamatan Pertambahan dari Pekerja	Informasi KP seluruhnya bersifat <i>confidential</i> dan eksklusif: tidak disosialisasikan kepada Pekerja. Pekerja tambang tidak memiliki ruang untuk menyampaikan informasi KP (hanya satu arah)	Informasi KP bersifat <i>top-down</i> : Informasi KP disosialisasikan oleh pimpinan, namun setiap Pekerja tidak memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk mendapatkan akses informasi KP. Pekerja tambang memiliki ruang terbatas untuk menyampaikan informasi KP	Informasi KP disebarluaskan secara terstruktur melalui Komite KP: Mekanisme distribusi informasi dan ruang partisipasi masukan dari pekerja tambang telah dilakukan secara formal dan sistematis melalui Komite KP	Informasi KP disebarluaskan secara terstruktur melalui Komite KP yang dilanjutkan dengan peran Pengawas Operasional di masing-masing area kerja	Informasi KP bersifat inklusif namun tetap terkontrol: Diseminasi informasi kepada seluruh pekerja melalui Komite KP dan Pengawas Operasional berjalan baik, seluruh Pekerja dengan cepat mendapatkan notifikasi untuk informasi aspek KP. Setiap pekerja tambang memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi KP.

<p>2.6.15 Proteksi Pelapor dan Mekanisme Penanganan Pelaporan dalam Pengaduan Pelanggaran Keselamatan Pertambangan (<i>Whistleblowing System</i>)</p>	<p>Manajemen belum menetapkan Mekanisme Pengaduan Pelanggaran Keselamatan Pertambangan (<i>Whistleblowing System</i>) dalam Pengelolaan KP</p>	<p>Manajemen telah menetapkan <i>Whistleblowing System</i> namun tidak memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor</p>	<p>Manajemen telah menetapkan <i>Whistleblowing System</i>, memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor / menjaga anonimitas identitas pelapor namun belum menindaklanjuti pelaporan. Setiap laporan pelanggaran yang diterima akan ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi dan pengumpulan alat bukti</p>	<p>Manajemen menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang diterima dari <i>Whistleblowing System</i> dengan melakukan investigasi dan pengumpulan bukti</p>	<p>Manajemen menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang diterima dari <i>Whistleblowing System</i> dengan melakukan investigasi dan pengumpulan bukti, serta melakukan perbaikan dan pencegahan yang tepat dan cepat</p>
<p>2.6.16 Penjangkauan Pemangku Kepentingan Eksternal</p>	<p>Tidak dilakukan pemetaan pemangku kepentingan yang perlu mendapatkan informasi terkait pengelolaan KP di internal perusahaan</p>	<p>Komunikasi dan Konsultasi Pengelolaan KP dengan pemangku kepentingan eksternal hanya dilakukan ketika sudah terdapat permasalahan atau kasus KP</p>	<p>Komunikasi dan Konsultasi Pengelolaan KP dengan pemangku kepentingan eksternal dilakukan pada setiap tahap awal <i>project</i> dilakukan</p>	<p>Komunikasi dan Konsultasi Pengelolaan KP dengan pemangku kepentingan eksternal dilakukan pada tahap awal <i>project</i> dilakukan dan selama <i>project</i> berlangsung Telah dilakukan forum konsultasi dan temu pemangku kepentingan secara berkala</p>	<p>Komunikasi dan Konsultasi Pengelolaan KP dengan pemangku kepentingan eksternal (<i>masyarakat, partner, supplier</i> dan pemerintah) dilakukan secara terencana untuk setiap fase kegiatan, dan telah terdapat akses/media untuk pemangku kepentingan menyalurkan informasi</p>
<p>2.6.17 Inventarisasi Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan</p>	<p>Manajemen belum menginventarisasi harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan yang relevan dan berkaitan dengan penerapan KP</p>	<p>Manajemen belum menentukan pemangku kepentingan yang relevan dan berkaitan dengan penerapan KP. Hanya menginventarisasi harapan dan kebutuhan dari</p>	<p>Manajemen menginventarisasi harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan internal, yang berkaitan dengan penerapan KP</p>	<p>Manajemen secara proaktif melakukan komunikasi untuk menginventarisasi harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal, yang</p>	<p>Manajemen menginventarisasi harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal, yang berkaitan dengan penerapan KP, dan menindaklanjutinya</p>

		pemangku kepentingan yang berkaitan dengan isu/permasalahan KP yang telah terjadi.		berkaitan dengan penerapan KP	dalam perencanaan pengelolaan KP
2.6.18 Efektivitas Komunikasi Keselamatan Pertambangan	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen III.11 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen III.11 dalam 2 tahun sebesar 0.1/4 s.d 2/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen III.11 dalam 2 tahun terakhir sebesar 2.1/4 s.d 3/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen III.11 dalam 2 tahun terakhir sebesar 3.1/4 s.d 3.9/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen III.11 dalam 2 tahun terakhir sebesar 4/4

G. Parameter: Pengendalian Mutu Keselamatan Pertambangan dalam Kegiatan Operasional

ITEM	RUBRIK				
	1	2	3	4	5
2.7.1 Jumlah Penetapan Tata Cara Kerja Baku untuk Operasi Kerja	Tidak terdapat Tata Cara Kerja Baku untuk Operasi Kerja	Jumlah Tata Cara Kerja Baku untuk Operasi Kerja sebesar <70% dari total Kegiatan Operasional Pertambangan	Jumlah Tata Cara Kerja Baku untuk Operasi Kerja sebesar 70-79% dari total Kegiatan Operasional Pertambangan	Jumlah Tata Cara Kerja Baku untuk Operasi Kerja sebesar 80-99% dari total Kegiatan Operasional Pertambangan	Jumlah Tata Cara Kerja Baku untuk Operasi Kerja sebesar 100% dari total Kegiatan Operasional Pertambangan
2.7.2 Efektivitas Tata Cara Kerja Baku untuk Operasi Kerja	Tidak terdapat Tata Cara Kerja Baku untuk Operasi Kerja	Terdapat Tata Cara Kerja Baku untuk Operasi Kerja namun tidak dapat diterapkan sepenuhnya pada kegiatan operasional pertambangan, belum sepenuhnya sesuai kebutuhan dan kondisi operasional	Terdapat Tata Cara Kerja Baku untuk Operasi Kerja yang dapat diterapkan sepenuhnya pada kegiatan operasional pertambangan	Tata Cara Kerja Baku untuk Operasi Kerja mampu menunjang keberhasilan pengelolaan aspek KP	Tata Cara Kerja Baku untuk Operasi Kerja mampu menunjang terwujudnya seluruh aspek Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
2.7.3 Kesesuaian Penetapan Rencana Kerja Operasional Harian	Tidak terdapat Rencana Kerja Operasional Harian	Rencana Kerja Operasional Harian dibuat oleh unit pelaksana/pemilik risiko tanpa	Rencana Kerja Operasional Harian dibuat dengan mempertimbangkan persyaratan aspek	Rencana Kerja Operasional Harian dibuat dan diverifikasi oleh pekerja yang memiliki kompetensi	Rencana Kerja Operasional Harian telah memenuhi persyaratan seluruh aspek

		mempertimbangkan aspek KP	KP oleh unit pelaksana/pemilik risiko, namun tidak ada mekanisme verifikasi dari Bagian K3 KO	dan telah memenuhi persyaratan aspek KP, merupakan produk yang dibuat bersama oleh unit pelaksana/pemilik risiko dan Bagian K3/KO	Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
2.7.4 Kesesuaian Penerapan Pemeriksaan Kesiapan Operasional Harian	Sebagian besar Pengawas Operasional tidak melakukan pemeriksaan atas P2H peralatan yang dilakukan oleh operator, tidak melakukan verifikasi terhadap kesiapan psikologis dan fisiologis anggota, tidak memastikan pemahaman anggota terhadap Rencana Kerja Operasional Harian (<i>daily operation plan</i>) pada awal gilir kerja	Sebagian besar Pengawas Operasional melakukan pemeriksaan atas P2H peralatan yang dilakukan oleh operator, melakukan verifikasi terhadap kesiapan psikologis dan fisiologis anggota, memastikan pemahaman anggota terhadap Rencana Kerja Operasional Harian pada awal gilir kerja, namun dilakukan secara tidak konsisten	Sebagian besar Pengawas Operasional menandatangani P2H peralatan yang dilakukan oleh operator, menandatangani formulir deklarasi kesiapan psikologis dan fisiologis anggota, memastikan pemahaman anggota terhadap Rencana Kerja Operasional Harian pada awal gilir kerja, namun dilakukan untuk pemenuhan administrasi, belum melakukan verifikasi dengan akurat	Sebagian besar Pengawas Operasional melakukan pemeriksaan dan penandatanganan P2H peralatan yang dilakukan oleh operator, melakukan verifikasi terhadap kesiapan psikologis dan fisiologis anggota, memastikan pemahaman anggota terhadap Rencana Kerja Operasional Harian pada awal gilir kerja, dan melakukan verifikasi secara akurat	Sebagian besar Pengawas Operasional melakukan pemeriksaan Kesiapan Operasional sebelum memulai (<i>start-up</i>) atau memulai kembali (<i>restart</i>) dengan akurat dan tepat, untuk memastikan proses dapat dimulai dengan sehat selamat dan dilakukan dengan konsisten
2.7.5 Kesesuaian Pemberian Izin Masuk Lokasi Pertambangan	Tidak ada mekanisme pemberian Izin Masuk Lokasi Pertambangan	Pemberian Izin Masuk Lokasi Pertambangan telah diterapkan bagi pekerja tambang (<i>mine permit</i>) dan setiap orang yang akan memasuki wilayah IUP, namun tidak konsisten dan tidak valid	Pemberian Izin Masuk Lokasi Pertambangan telah diterapkan bagi pekerja tambang dan setiap orang yang akan memasuki wilayah IUP, namun masih bersifat umum, belum terdapat izin khusus untuk memasuki area tertentu yang terbatas / <i>restricted</i>	Pemberian Izin Masuk Lokasi Pertambangan telah diterapkan bagi pekerja tambang dan setiap orang yang akan memasuki wilayah IUP, termasuk untuk memasuki area terbatas, namun penetapan area terbatas belum adaptif dengan perkembangan risiko operasional perusahaan	Pemberian Izin Masuk Lokasi Pertambangan telah diterapkan bagi pekerja tambang dan setiap orang yang akan memasuki wilayah IUP, termasuk untuk memasuki area terbatas, dan penetapan area terbatas telah adaptif dengan

					perkembangan risiko operasional perusahaan
2.7.6 Kesesuaian Pemberian Lisensi dan Surat Izin Pengoperasian Peralatan	Tidak ada mekanisme pemberian Lisensi dan Surat Izin Pengoperasian Peralatan	Pemberian Lisensi dan Surat Izin Pengoperasian Peralatan bagi pekerja tambang, namun mekanismenya belum memadai dan belum menyeluruh, masih terdapat yang tidak valid	Pemberian Lisensi dan Surat Izin Pengoperasian Peralatan telah diterapkan bagi pekerja tambang dengan mekanisme sesuai dengan persyaratan perundangan, namun belum konsisten diterapkan	Pemberian Lisensi dan Surat Izin Pengoperasian Peralatan telah diterapkan bagi pekerja tambang dengan mekanisme sesuai dengan persyaratan perundangan secara konsisten	Pemberian Lisensi dan Surat Izin Pengoperasian Peralatan telah diterapkan bagi pekerja tambang sesuai dengan persyaratan perundangan, dan terdapat rencana antisipasi terhadap potensi perubahan atau pergantian pekerja
2.7.7 Kesesuaian Pemberian Izin Kerja Khusus	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen V.1.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen V.1.2 dalam 2 tahun sebesar 0.1/4 s.d 2/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen V.1.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 2.1/4 s.d 3/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen V.1.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 3.1/4 s.d 3.9/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen V.1.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 4/4
2.7.8 Kesesuaian Penetapan Area, Aktivitas, dan Kontrol Kritis dalam aspek Keselamatan Pertambangan	Tidak terdapat informasi mengenai area dan aktivitas kritis yang memerlukan pengawasan yang lebih ketat, serta kontrol kritis yang harus dilaksanakan untuk pelaksanaan pekerjaan	Area dan aktivitas kritis yang memerlukan pengawasan yang lebih ketat, ditetapkan ketika telah terjadi kasus KP saja, kontrol kritis yang harus dilaksanakan untuk pelaksanaan pekerjaan terbatas pada hasil investigasi terhadap kasus KP spesifik	Area dan aktivitas kritis yang memerlukan pengawasan yang lebih ketat serta kontrol kritis yang harus dilaksanakan untuk pelaksanaan pekerjaan merupakan masukan dari Bagian K3 KO, namun masih berdasarkan hasil evaluasi terhadap risiko terhadap model operasional saat ini	Area dan aktivitas kritis yang memerlukan pengawasan yang lebih ketat serta kontrol kritis yang harus dilaksanakan untuk pelaksanaan pekerjaan telah ditetapkan secara kolaboratif oleh unit pemilik risiko dan Bagian K3 KO	Area dan aktivitas kritis yang memerlukan pengawasan yang lebih ketat serta kontrol kritis yang harus dilaksanakan untuk pelaksanaan pekerjaan telah ditetapkan secara kolaboratif oleh unit pemilik risiko dan Bagian K3 KO, dengan terus menerus mencari kemungkinan terjadinya risiko

					baru yang tidak terdeteksi atas dinamika dan potensi perubahan operasional di masa mendatang
2.7.9 Kesesuaian Penetapan Distribusi dan Komposisi Area Pengawasan	Tidak ada perencanaan pengawasan KP	Pengawasan KP difokuskan untuk pekerjaan yang telah pernah terjadi kasus KP di masa lampau	Pengawasan KP dilakukan pada setiap area dan /atau kegiatan operasional yang dilakukan, namun belum terdapat kajian kebutuhan pengawas	Pengawasan KP dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatan pengawas pada setiap area dan /atau kegiatan operasional yang dilakukan	Jumlah pengawas dan layer pengawasan KP telah ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dan jenis aktivitas yang diawasi, lingkup area dan objek yang diawasi, jumlah entitas (perusahaan) yang diawasi, <i>shift</i> kerja, dan frekuensi pelaksanaan
2.7.10 Jumlah Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pengawas Operasional Langsung	Pengawas tidak melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian secara terencana maupun tidak terencana	Realisasi Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pengawas sebesar <70% dari target	Realisasi Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pengawas sebesar 70-79% dari target	Realisasi Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pengawas sebesar 80-99% dari target	Realisasi Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pengawas sebesar 100% dari target

<p>2.7.11 Kesesuaian dan Kehandalan Hasil Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pengawas Operasional Langsung</p>	<p>Pengawas tidak melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian secara terencana maupun tidak terencana</p>	<p>Sebagian besar hasil inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian hanya untuk kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman kategori minor, serta masih ditemukan hasil inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian yang tidak valid</p>	<p>Sebagian besar hasil inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian merupakan kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman, namun masih ditemukan bahaya di tempat kerja yang tidak terdeteksi melalui inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian</p>	<p>Hasil inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian mencakup kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman termasuk hal kritis, serta deviasi dari sistem operasi yang menjadi kondisi laten penyebab terjadinya kerugian</p>	<p>Seluruh hasil inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian adalah valid dan merekpresentasikan kondisi nyata pada kegiatan operasional. Pengawas Operasional mampu mengamati elemen penting dari apa yang dilakukan, kemudian memahami makna (<i>comprehend</i>), dan selanjutnya mampu memproyeksikan (<i>projection</i>) hal tersebut kemas mendatang agar kita mampu membuat keputusan (<i>decision</i>) untuk bertindak (<i>action</i>). Seluruhnya mampu didokumentasikan pada hasil inspeksi. Tidak hanya mendeteksi bahaya dan risiko namun juga sudah mendeteksi peluang peningkatan kinerja KP</p>
<p>2.7.12 Jumlah Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pengawas</p>	<p>Pengawas Operasional Jenjang Menengah tidak melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian secara</p>	<p>Realisasi Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pengawas Operasional Jenjang Menengah</p>	<p>Realisasi Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pengawas Operasional Jenjang</p>	<p>Realisasi Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pengawas Operasional Jenjang Menengah</p>	<p>Realisasi Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pengawas Operasional Jenjang Menengah</p>

Operasional Jenjang Menengah	terencana maupun tidak terencana. Tidak ditetapkan target yang menjadi bagian dari akuntabilitas dari Pengawas Operasional Jenjang Menengah.	sebesar <70% dari target	Menengah sebesar 70-79% dari target	sebesar 80-99% dari target	sebesar 100% dari target
2.7.13 Kesesuaian dan Keandalan Hasil Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pengawas Operasional Jenjang Menengah	Pengawas Operasional Jenjang Menengah tidak melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian secara terencana maupun tidak terencana.	Sebagian besar hasil inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian hanya untuk kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman kategori minor, serta masih ditemukan hasil inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian yang tidak valid	Sebagian besar hasil inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian merupakan kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman, namun masih ditemukan bahaya di tempat kerja yang tidak terdeteksi melalui inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian	Hasil inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian mencakup kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman termasuk hal kritis, serta deviasi dari sistem operasi yang menjadi kondisi laten penyebab terjadinya kerugian	Seluruh hasil inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian adalah valid dan merepresentasikan kondisi nyata pada kegiatan operasional. Pelaksana inspeksi mampu mengamati elemen penting dari apa yang dilakukan, kemudian memahami makna, dan selanjutnya mampu memproyeksikan hal tersebut kemasa mendatang agar kita mampu membuat keputusan untuk bertindak. Seluruhnya mampu didokumentasikan pada hasil inspeksi. Tidak hanya mendeteksi bahaya dan risiko namun juga sudah mendeteksi peluang peningkatan kinerja KP

<p>2.7.14 Jumlah Inspeksi oleh Pihak Internal di Luar Penanggung Jawab Area (Silang)</p>	<p>Tidak terdapat rencana, target, dan realisasi inspeksi silang oleh pihak internal di luar penanggung jawab area.</p>	<p>Realisasi Inspeksi oleh pihak internal di luar penanggung jawab area sebesar <70% dari target</p>	<p>Realisasi Inspeksi oleh pihak internal di luar penanggung jawab area sebesar 70-79% dari target</p>	<p>Realisasi Inspeksi oleh pihak internal di luar penanggung jawab area sebesar 80-99% dari target</p>	<p>Realisasi Inspeksi oleh pihak internal di luar penanggung jawab area sebesar 100% dari target</p>
<p>2.7.15 Kesesuaian dan Keandalan Hasil Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pihak Internal di Luar Penanggung Jawab Area (Silang)</p>	<p>Tidak terdapat rencana, target, dan realisasi inspeksi silang oleh pihak internal di luar penanggung jawab area.</p>	<p>Sebagian besar hasil inspeksi hanya untuk kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman kategori minor, serta masih ditemukan hasil inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian yang tidak valid</p>	<p>Sebagian besar hasil inspeksi merupakan kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman, namun masih ditemukan bahaya di tempat kerja yang tidak terdeteksi melalui inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian</p>	<p>Hasil inspeksi mencakup kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman termasuk hal kritical, serta deviasi dari sistem operasi yang menjadi kondisi laten penyebab terjadinya kerugian</p>	<p>Seluruh hasil inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian adalah valid dan merepresentasikan kondisi nyata pada kegiatan operasional Pengawas mampu mengamati elemen penting dari apa yang dilakukan, kemudian memahami makna, dan selanjutnya mampu memproyeksikan hal tersebut kemasa mendatang agar kita mampu membuat keputusan untuk bertindak Seluruhnya mampu didokumentasikan pada hasil inspeksi. Tidak hanya mendeteksi bahaya dan risiko namun juga sudah mendeteksi peluang peningkatan kinerja KP</p>

2.7.16 Efektivitas Inspeksi Keselamatan Pertambangan	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen V.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen V.2 dalam 2 tahun sebesar 0.1/4 s.d 2/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen V.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 2.1/4 s.d 3/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen V.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 3.1/4 s.d 3.9/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen V.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 4/4
---	---	--	---	---	---

H. Parameter: Penjaminan Mutu Keselamatan Pertambangan melalui Audit Internal SMKP

ITEM	RUBRIK				
	1	2	3	4	5
2.8.1 Dasar Pelaksanaan Audit Internal SMKP	Audit Internal SMKP dilakukan secara insidental (tanpa perencanaan), setelah adanya teguran/ peringatan dari Kepala Inspektur Tambang	Audit Internal SMKP dilakukan secara insidental (tanpa perencanaan) dan fokus untuk menyelesaikan pemenuhan kewajiban persyaratan perundangan	Audit Internal SMKP dilakukan sesuai dengan waktu pelaksanaan yang direncanakan, namun perencanaan tersebut belum mempertimbangkan analisis risiko dan peluang KP	Audit Internal SMKP dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan untuk kepentingan perbaikan dan peningkatan kinerja aspek KP	Audit Internal SMKP didasarkan pada hasil penilaian risiko dan peluang aspek KP serta evaluasi kinerja KP sebelumnya, untuk mencapai kondisi <i>beyond compliance</i>
2.8.2 Kesesuaian Metodologi Audit Internal SMKP	Audit Internal SMKP tidak dilakukan dengan perencanaan audit yang mencakup penetapan metodologi	Audit Internal SMKP dilakukan dengan perencanaan metodologi audit yang sepenuhnya tidak sesuai dengan tujuan audit	Audit Internal SMKP dilakukan seluruhnya dengan pengambilan bukti secara sekunder, tidak ada verifikasi untuk meningkatkan reliabilitas hasil audit	Audit Internal SMKP telah dilakukan dengan metode pengambilan data sekunder dan primer yang beragam, serta penetapan jumlah dan jenis sampel yang memadai	Metodologi Audit yang ditetapkan telah sesuai sehingga berhasil digunakan untuk mencapai keseluruhan tujuan audit
2.8.3 Keberhasilan Pencapaian Tujuan Audit Internal SMKP	Tujuan audit internal SMKP tidak tercapai	Hanya 1 tujuan audit internal SMKP yang tercapai	Hanya 2 tujuan audit internal SMKP yang tercapai	Hanya 3 tujuan audit internal SMKP yang tercapai	Seluruh tujuan audit internal SMKP tercapai

2.8.4 Jumlah <i>Opportunity for Improvement</i> (OFI) dalam Audit Internal SMK	Auditor belum mengidentifikasi OFI	Auditor mengidentifikasi OFI sebesar <70% dari total kesesuaian	Auditor mengidentifikasi OFI sebesar 70-79% dari total kesesuaian	Auditor mengidentifikasi OFI sebesar 80-99% dari total kesesuaian	Auditor mengidentifikasi OFI sebesar 100% dari kesesuaian audit
2.8.5 Penyelesaian Rencana Tindak Lanjut Audit Internal SMK	Tindak lanjut audit internal SMK tidak terlaksana	Tindak lanjut audit internal SMK terlaksana <70% dari total rencana	Tindak lanjut audit internal SMK terlaksana 70-79% dari total rencana	Tindak lanjut audit internal SMK terlaksana 80-99% dari total rencana	Tindak lanjut audit internal SMK terlaksana 100% dari total rencana

3. Analisis dan Statistik Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, Penyakit Akibat Kerja

A. Parameter: Analisis Terhadap Data Kasus Keselamatan Pertambangan

ITEM	RUBRIK				
	I	II	III	IV	V
3.1.1 Integritas Data Keselamatan Pertambangan	Tidak ada mekanisme dan media (<i>platform</i>) formal atau informal untuk pengumpulan data Kasus KP	Data KP tidak terstruktur, instrumen pengumpulan data terbatas, dilakukan secara manual	Perusahaan telah membuat standarisasi dalam pengambilan data (metode dan formulir pelaporan yang seragam), namun masih mengedepankan data sekunder	Data KP telah dikategorisasikan dengan tepat. Perusahaan telah melakukan upaya validasi dan peningkatan reliabilitas data dengan pengambilan data primer yang memadai	Perusahaan telah memiliki data Keselamatan Pertambangan yang dapat diakses secara waktu nyata (<i>real time</i>), mutakhir, dan lengkap (memenuhi kriteria integritas data: Mudah diidentifikasi mengenai data, tempat, waktu, dan personel yang mengumpulkan data (<i>Attributable</i>), medium perekaman

					tahan dan mudah dibaca (<i>Legible</i>), pengambilan data dilakukan secara akurat pada saat aktivitas dilakukan (<i>Contemporaneous</i>), asli (<i>Original</i>), dan mencerminkan apa yang terjadi serta tidak ada kesalahan dalam penyuntingan (<i>Accurate</i>)
3.1.2 Ruang Lingkup Analisis dan Pengolahan Data Kasus Keselamatan Pertambangan	Tidak dilakukan analisis terhadap Kasus KP	Analisis dilakukan terbatas pada satu per satu Kasus KP	Analisis dilakukan terhadap sejumlah Kasus KP dengan jenis serupa dan/atau jenis penyebab serupa	Analisis dilakukan pada beberapa Kasus KP yang berkaitan	Analisis dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh Kasus KP
3.1.3 Maturitas Hasil Analisis	Analisis KP hanya fokus pada informasi umum kasus KP (jumlah kejadian, waktu terjadi, tempat kejadian, jenis kejadian, kerugian akibat kejadian)	Hasil analisis hanya dapat menjelaskan kronologis apa yang terjadi, dan tidak dapat menjelaskan kenapa hal tersebut dapat terjadi. Data didominasi oleh jumlah (nominal dan ordinal) dan deskripsi	Hasil analisis fokus menemukan korelasi antar data dalam mencari akar penyebab terjadinya suatu hal.	Hasil analisis merupakan pengolahan terhadap data historis untuk membuat model dan memprediksi skenario tentang apa yang akan mungkin terjadi selanjutnya di masa depan.	Hasil Analisis berupa rumusan dan rekomendasi tindakan yang tepat untuk dilakukan dalam rangka upaya mencapai hasil tertentu. Telah terdapat analisis hubungan antara tindakan dan hasil, serta simulasi untuk merancang solusi yang tepat.

B. Parameter: Investigasi Kasus Keselamatan Pertambangan

ITEM	RUBRIK				
	I	II	III	IV	V
3.2.1. Jumlah Kasus Keselamatan Pertambangan yang diinvestigasi	Investigasi Kasus KP secara internal tidak dilakukan, hanya ada Investigasi dari Inspektur Tambang	Investigasi Kasus KP secara internal dilakukan hanya untuk kasus kematian pekerja (kecelakaan tambang berakibat mati dan KAPTK)	Investigasi Kasus KP secara internal dilakukan untuk kasus KP yang wajib dilaporkan kepada KaIT (kecelakaan tambang berakibat cedera ringan, cedera berat, dan mati, kasus KAPTK, dan kejadian berbahaya)	Investigasi Kasus KP secara internal dilakukan untuk kasus KP yang wajib dilaporkan kepada KaIT dan yang tidak wajib dilaporkan (<i>Medical Treatment Injury, First Aid Case, property damage</i> dan lainnya)	Investigasi Kasus KP secara internal dilakukan untuk seluruh Kasus KP, termasuk kejadian hampir celaka (<i>near-miss</i>)
3.2.2 Pengumpulan Data dan Informasi terkait Kasus Keselamatan Pertambangan	Investigator mengumpulkan data hanya terkait kerugian pada pekerja dan properti/aset terkait	Investigator mengumpulkan data hanya pada tempat kejadian serta data dari organisasi yang menjadi pemilik dan pengelola risiko KP dari aktivitas yang terkait	Investigator mengumpulkan data pada tempat kejadian dan dari sumber lainnya yang terkait (data teknis dan sistem terkait, keterangan saksi, keterangan dokter, rekonstruksi), termasuk data dari fungsi-fungsi organisasi yang menjadi pengawas risiko (<i>risk overseer</i>), dan fungsi-fungsi organisasi yang menjadi penyedia pemastian independen terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal (<i>assurance provider</i>) terkait kecelakaan.	Investigator mengumpulkan data dukung tambahan yang dibutuhkan dalam proses analisis, seperti <i>historical comparisons, internal/external benchmarking</i> pada kasus serupa, serta literatur ilmiah yang terkait	Investigator mengumpulkan data pre-kondisi yang menunjang sistem kerja kegiatan operasional agar dapat berjalan dengan baik mencapai tujuannya dalam berbagai kondisi (<i>resilient</i>).
3.2.3 Paradigma Investigasi Kasus	Investigasi difokuskan untuk sekedar	Investigasi hanya difokuskan terhadap	Investigasi dilakukan untuk menemukan penyebab dasar untuk	Investigasi dilakukan untuk memahami	Perusahaan melakukan ' <i>safety investigation</i> ' untuk

Keselamatan Pertambangan	menyelesaikan kewajiban hukum	kesalahan pekerja tambang	<p>mencegah kejadian serupa terjadi kembali dan malfungsi lainnya.</p> <p>Kesalahan manusia dalam pengelolaan KP dianggap sebagai akibat dari suatu akar masalah mendasar seperti kelemahan sistemik dari organisasi, bukan sebagai penyebab utama dari suatu kasus kecelakaan. Tidak hanya mengungkap kegagalan individu pekerja saja, tetapi fokus kepada kegagalan sistem.</p>	bagaimana hal-hal biasanya berjalan dengan baik sebagai dasar untuk menjelaskan bagaimana hal-hal yang tidak sesuai dapat terjadi.	meningkatkan kemampuan seluruh pre-kondisi yang menunjang sistem kerja kegiatan operasional agar dapat berjalan dengan baik mencapai tujuannya dalam berbagai kondisi (<i>resilient</i>).
3.2.4 Teknik Analisis Kasus Keselamatan Pertambangan	Tidak dilakukan analisis terhadap Kasus KP	Investigasi Kasus KP menggunakan pendekatan analisis <i>simple-linear model</i> , dan hanya fokus terhadap penyebab langsung	Investigasi Kasus KP menggunakan pendekatan analisis <i>simple-linear model</i> , dan fokus untuk mendeteksi kausalitas penyebab kecelakaan	Investigasi Kasus KP menggunakan pendekatan analisis <i>complex-linear model</i> dengan titik berat analisis pada faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan yang berkaitan dengan kegagalan pada perlindungan berlapis (<i>barrier/ defence layer</i>) yang ditetapkan	Investigasi Kasus KP menggunakan pendekatan analisis <i>complex non-linear model</i> , memfokuskan pada pertanyaan mengapa kontrol yang ada gagal untuk mendeteksi atau mencegah perubahan yang pada akhirnya menyebabkan kecelakaan
3.2.5 Penetapan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan atas Kasus Keselamatan Pertambangan	Perusahaan tidak menetapkan tindakan perbaikan dan pencegahan dari hasil investigasi Kasus KP	Perusahaan telah menetapkan tindakan perbaikan atas penyebab langsung dari hasil investigasi Kasus KP	Perusahaan telah menetapkan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan dari hasil investigasi Kasus KP secara tepat	Perusahaan telah menetapkan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan, serta tindakan untuk	Perusahaan telah menetapkan tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, tindakan untuk meningkatkan kinerja, tindakan yang dirancang untuk

				meningkatkan kinerja secara tepat	menemukan ketidaksesuaian unjuk kerja pada fungsi organisasi yang dapat berkontribusi menyebabkan kecelakaan serupa di kemudian hari sehingga dapat segera dikoreksi, dan tindakan yang dirancang untuk meminimalkan keparahan
3.2.6 Pelaksanaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan atas Kasus Keselamatan Pertambangan	Tindakan perbaikan dan pencegahan tidak dilaksanakan, tidak ada proses pembelajaran	Realisasi tindakan perbaikan dan pencegahan <70% dari yang ditetapkan	Realisasi tindakan perbaikan dan pencegahan 70 s.d. 79% dari yang ditetapkan	Realisasi tindakan perbaikan dan pencegahan 80 s.d. 99 % dari yang ditetapkan	Realisasi tindakan perbaikan dan pencegahan 100% dari yang ditetapkan
3.2.7 Jumlah Kasus Keselamatan Pertambangan Serupa dan Berulang dalam 2 Tahun Terakhir	> 10 Kasus KP sejenis atau penyebab yang sejenis secara berulang dalam 2 tahun	5 s.d 10 Kasus KP sejenis atau penyebab yang sejenis secara berulang dalam 2 tahun	2 s.d. 4 Kasus KP sejenis atau penyebab yang sejenis secara berulang dalam 2 tahun	1 Kasus KP sejenis atau penyebab yang sejenis secara berulang dalam 2 tahun	tidak ada Kasus KP sejenis atau penyebab yang sejenis secara berulang dalam 2 tahun

C. Parameter: Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tertinggal

ITEM	RUBRIK				
	I	II	III	IV	V
3.3.1 Pencapaian <i>Accident Frequency Rate</i>	Nilai rata-rata FR dalam 2 tahun terakhir: $FR \geq 0.20$	Nilai rata-rata FR dalam 2 tahun terakhir: $0.10 \leq FR < 0.20$	Nilai rata-rata FR dalam 2 tahun terakhir: $0.06 \leq FR < 0.10$	Nilai rata-rata FR dalam 2 tahun terakhir: $0.02 \leq FR < 0.06$	Nilai rata-rata FR dalam 2 tahun terakhir: $0.00 \leq FR < 0.02$

3.3.2 Pencapaian <i>Accident Severity Rate</i>	Nilai rata-rata SR dalam 2 tahun terakhir: $SR \geq 100$	Nilai rata-rata SR dalam 2 tahun terakhir: $40 \leq SR < 100$	Nilai rata-rata SR dalam 2 tahun terakhir: $20 \leq SR < 40$	Nilai rata-rata SR dalam 2 tahun terakhir: $10 \leq SR < 20$	Nilai rata-rata SR dalam 2 tahun terakhir: $0 \leq SR < 10$
3.3.3 Jumlah Kejadian Berbahaya	> 10 kejadian dalam 2 tahun terakhir	5 s.d 10 kejadian dalam 2 tahun terakhir	2 s.d. 4 kejadian dalam 2 tahun terakhir	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir	0 kejadian dalam 2 tahun terakhir
3.3.4 Pencapaian <i>Morbidity Frequency Rate</i>	Nilai rata-rata MFR dalam 2 tahun terakhir: $MFR \geq 450$	Nilai rata-rata MFR dalam 2 tahun terakhir: $225 \leq MFR < 450$	Nilai rata-rata MFR dalam 2 tahun terakhir: $135 \leq MFR < 225$	Nilai rata-rata MFR dalam 2 tahun terakhir: $45 \leq MFR < 135$	Nilai rata-rata MFR dalam 2 tahun terakhir: $0 \leq MFR < 45$
3.3.5 Pencapaian Absence Severity Rate (termasuk KAPTK)	Nilai rata-rata ASR dalam 2 tahun terakhir: $ASR \geq 700$	Nilai rata-rata ASR dalam 2 tahun terakhir: $350 \leq ASR < 700$	Nilai rata-rata ASR dalam 2 tahun terakhir: $210 \leq ASR < 350$	Nilai rata-rata ASR dalam 2 tahun terakhir: $70 \leq ASR < 210$	Nilai rata-rata ASR dalam 2 tahun terakhir: $0 \leq ASR < 70$
3.3.6 Frekuensi Penyakit Akibat Kerja	> 5 kasus dalam 2 tahun terakhir	4 s.d. 5 kasus dalam 2 tahun terakhir	2 s.d. 3 kasus dalam 2 tahun terakhir	1 kasus dalam 2 tahun terakhir	0 kasus dalam 2 tahun terakhir

D. Parameter: Pembelajaran Organisasi

ITEM	RUBRIK				
	I	II	III	IV	V
3.4.1 Pembelajaran Retrospektif dari Pengelolaan Keselamatan Pertambangan	Perusahaan tidak memiliki mekanisme untuk pembelajaran dari kinerja pengelolaan KP. Pembelajaran mengedepankan inisiatif mandiri dari masing-masing pekerja.	Perusahaan hanya fokus mempelajari kasus kegagalan pengelolaan KP di internal perusahaan, yang dilakukan secara reaktif. Fokus memperbaiki kekurangan dari kasus yang terjadi	Perusahaan hanya fokus mempelajari kasus kegagalan pengelolaan KP di internal dan eksternal perusahaan, yang dilakukan secara terencana dan terorganisir seperti melalui Komite KP	Perusahaan mempelajari kegagalan dan kesuksesan pengelolaan KP di internal dan eksternal secara terencana dan terorganisir. Mampu mengidentifikasi <i>lessons learned</i> dari	Perusahaan berhasil mempelajari pembelajaran yang tepat dari pengalaman yang benar, baik dari kegagalan dan keberhasilan, secara terencana dan berkelanjutan

				kasus perusahaan lain secara tepat	
3.4.2 Jumlah Perbaikan Berbasis Pembelajaran	Perusahaan tidak menindaklanjuti hasil pembelajaran dari kegagalan dan kesuksesan pengelolaan KP di internal dan eksternal perusahaan	Perusahaan menindaklanjuti hasil pembelajaran dari kegagalan pengelolaan KP di internal perusahaan	Perusahaan menindaklanjuti hasil pembelajaran dari kegagalan pengelolaan KP di internal dan eksternal perusahaan	Perusahaan menindaklanjuti hasil pembelajaran dari kegagalan dan kesuksesan pengelolaan KP di internal dan eksternal	Perusahaan menindaklanjuti hasil pembelajaran dari kegagalan dan kesuksesan pengelolaan KP di internal dan eksternal dengan cara yang tepat

4. Upaya-Upaya Pengendalian yang Dilakukan

A. Parameter: Pengendalian Risiko Keselamatan Pertambangan Berbasis Tata Kelola

ITEM	RUBRIK				
	1	2	3	4	5
4.1.1 Dasar Pengelolaan Risiko Keselamatan Pertambangan	Perusahaan mulai mengelola Risiko KP setelah ada pengawasan, bergantung pada perintah	Perusahaan mulai mengelola Risiko KP jika sudah terjadi kasus KP, tidak konsisten	Perusahaan mengelola Risiko KP sesuai RKAB untuk pemenuhan minimum kewajiban hukum dan pencapaian target kinerja	Perusahaan mengelola Risiko KP sebagai bagian penting dalam sistem produksi, dikembangkan secara terintegrasi dengan manajemen risiko korporasi. Penetapan <i>risk appetite</i> bersifat dinamis mengikuti perkembangan kondisi internal perusahaan	Perusahaan mengelola Risiko KP untuk menunjang kinerja operasional yang konsisten handal di berbagai kondisi. Penetapan <i>risk appetite</i> bersifat dinamis mengikuti kondisi internal dan eksternal perusahaan di hari ini dan hasil <i>forecast</i> kondisi masa mendatang
4.1.2 Ketuntasan Siklus Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan	Perusahaan tidak melaksanakan proses manajemen risiko secara formal maupun informal	Perusahaan hanya fokus pada identifikasi bahaya dan pengendalian risiko dari aktivitas dan/atau kegiatan yang secara historis telah terjadi kasus KP	Perusahaan telah melaksanakan proses penetapan konteks risiko, identifikasi bahaya dan pengendalian risiko untuk seluruh kegiatan operasional	Perusahaan telah melaksanakan proses identifikasi bahaya dan pengendalian risiko dilakukan secara formal dan terstandardisasi untuk seluruh kegiatan operasional telah dilengkapi dengan proses komunikasi dan konsultasi risiko serta pemantauan peninjauan risiko	Perusahaan telah mengembangkan indikator risiko utama (<i>key risk indicators</i>) sebagai sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) di seluruh organisasi, telah terdapat perencanaan cadangan/alternatif/darurat (<i>contingency planning</i>) dalam berbagai skenario operasional Metode manajemen risiko secara terus menerus dikembangkan mengacu kepada

					peraturan perundang-undangan dan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Tiap individu memiliki peran dalam pengendalian
4.1.3 Ruang Lingkup Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan	Perusahaan tidak melaksanakan proses manajemen risiko secara formal maupun informal	Manajemen risiko fokus pada masalah/kejadian sebelumnya, dilakukan secara insidental dan <i>ad hoc</i>	Manajemen risiko untuk memenuhi target yang ditetapkan pada rencana yang sudah dibuat dan mencegah kerugian dari model operasional saat ini	Manajemen risiko untuk memenuhi target yang ditetapkan pada rencana yang sudah dibuat dan mencegah kerugian dari model operasional saat ini dan perubahan yang akan dilakukan dalam jangka pendek	Manajemen risiko dilakukan berdasarkan perencanaan kerja yang adaptif dengan terus menerus mencari kemungkinan terjadinya risiko baru yang tidak terdeteksi untuk rencana operasional di masa mendatang baik jangka pendek maupun panjang
4.1.4 Efektivitas Pelaksanaan Manajemen Risiko	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen II.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0/15	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen II.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 1/15 s.d. 5/15	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen II.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 6/15 s.d. 10/15	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen II.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 11/15 s.d. 14/15	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen II.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 15/15

B. Parameter: Manajemen Kesehatan Kerja Pertambangan

ITEM	RUBRIK				
	1	2	3	4	5
4.2.1 Dasar Pengembangan	Perusahaan tidak memiliki Program Kesehatan Kerja yang	Program Kesehatan Kerja dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i> dan reaktif, tanpa	Program kesehatan kerja dibuat, ditetapkan, dan dilaksanakan dengan	Program kesehatan kerja dibuat, ditetapkan, dan dilaksanakan	Program kesehatan kerja dibuat, ditetapkan, dan dilaksanakan dengan

<p>Program Kesehatan Kerja Pertambangan</p>	<p>terencana maupun insidental</p>	<p>perencanaan, intuitif berdasarkan pengalaman (<i>experience-based</i>)</p>	<p>mengutamakan kuratif dan rehabilitatif</p>	<p>dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif atau pemulihan dengan lebih mengutamakan pada program promotif dan preventif, namun belum sepenuhnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan standar terkait yang berlaku; persyaratan lainnya yang terkait; kebijakan perusahaan; hasil Manajemen Risiko terhadap seluruh proses, kegiatan, dan area kerja; evaluasi kinerja program kesehatan kerja; hasil pemeriksaan terhadap Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja dan Penyakit Akibat Kerja; ketersediaan sumber daya, antara lain manusia, finansial, peralatan</p>	<p>pendekatan promotif atau promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan lebih mengutamakan pada program promotif dan preventif mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan standar terkait yang berlaku; persyaratan lainnya yang terkait; kebijakan perusahaan; hasil Manajemen Risiko terhadap seluruh proses, kegiatan, dan area kerja; evaluasi kinerja program kesehatan kerja; hasil pemeriksaan terhadap Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja dan Penyakit Akibat Kerja; ketersediaan sumber daya, antara lain manusia, finansial, peralatan.</p>
<p>4.2.2 Realisasi Program Pokok: Kesehatan Kerja</p>	<p>Realisasi Program Kesehatan Kerja pada RKAB 2 tahun terakhir <50%</p>	<p>Realisasi Program Kesehatan Kerja pada RKAB 2 tahun terakhir 50-69%</p>	<p>Realisasi Program Kesehatan Kerja pada RKAB 2 tahun terakhir 70-79%</p>	<p>Realisasi Program Kesehatan Kerja pada RKAB 2 tahun terakhir 80-99%</p>	<p>Realisasi Program Kesehatan Kerja pada RKAB 2 tahun terakhir 100%</p>
<p>4.2.3 Efektivitas Program Kesehatan Kerja</p>	<p>Nilai Audit Sub Elemen IV.3 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0/30 s.d. 7/30</p>	<p>Nilai Audit Sub Elemen IV.3 dalam 2 tahun terakhir sebesar 8/30 s.d. 15/30</p>	<p>Nilai Audit Sub Elemen IV.3 dalam 2 tahun terakhir sebesar 16/30 s.d. 23/30</p>	<p>Nilai Audit Sub Elemen IV.3 dalam 2 tahun terakhir sebesar 24/30 s.d. 29/30</p>	<p>Nilai Audit Sub Elemen IV.3 dalam 2 tahun terakhir sebesar 30/30</p>

C. Manajemen Lingkungan Kerja Pertambangan

ITEM	RUBRIK				
	1	2	3	4	5
4.3.1 Dasar Pengembangan Program Lingkungan Kerja Pertambangan	Perusahaan tidak memiliki Program Lingkungan Kerja yang terencana maupun insidental	Program Kesehatan Kerja dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i> dan reaktif, tanpa perencanaan, intuitif berdasarkan pengalaman (<i>experience-based</i>)	Program kesehatan kerja dibuat, ditetapkan, dan dilaksanakan dengan fokus kepada tahapan evaluasi dan pengendalian	Program pengelolaan lingkungan kerja direncanakan dan ditetapkan mencakup seluruh tahapan antisipasi, pengenalan, evaluasi, dan pengendalian	Program pengelolaan lingkungan kerja direncanakan dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan standar terkait yang berlaku; persyaratan lainnya yang terkait; kebijakan perusahaan; hasil Manajemen Risiko terhadap seluruh proses, kegiatan, dan area kerja; evaluasi kinerja program lingkungan kerja Pertambangan; hasil pemeriksaan terhadap kejadian kecelakaan, Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan Penyakit Akibat Kerja; ketersediaan sumber daya, antara lain manusia, finansial, dan peralatan.
4.3.2 Realisasi Program Pokok: Lingkungan Kerja	Realisasi Program Lingkungan Kerja pada RKAB 2 tahun terakhir <50%	Realisasi Program Lingkungan Kerja pada RKAB 2 tahun terakhir 50-69%	Realisasi Program Lingkungan Kerja pada RKAB 2 tahun terakhir 70-79%	Realisasi Program Lingkungan Kerja pada RKAB 2 tahun terakhir 80-99%	Realisasi Program Lingkungan Kerja pada RKAB 2 tahun terakhir 100%

4.3.3 Efektivitas Program Lingkungan Kerja	Nilai Audit Sub Elemen IV.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0/40 s.d. 10/40	Nilai Audit Sub Elemen IV.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 11/40 s.d. 20/40	Nilai Audit Sub Elemen IV.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 21/40 s.d. 30/40	Nilai Audit Sub Elemen IV.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 31/40 s.d. 39/40	Nilai Audit Sub Elemen IV.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 40/40
---	--	---	---	---	--

D. Parameter: Manajemen Rekayasa & Desain Proses

ITEM	RUBRIK				
	1	2	3	4	5
4.4.1 Kesesuaian Penerapan Rekayasa Pertambangan: Kehandalan Desain	Perusahaan tidak membuat desain kegiatan pertambangan dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan aspek KP	Desain kegiatan pertambangan yang telah memenuhi persyaratan aspek KP hanya sebatas pada kegiatan/area kerja yang secara historis telah terjadi kasus KP sebelumnya	Seluruh desain kegiatan pertambangan telah memenuhi persyaratan aspek KP	Seluruh desain kegiatan pertambangan telah memenuhi persyaratan seluruh aspek Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik	Desain kegiatan pertambangan yang ditetapkan terbukti berhasil berkontribusi dalam meningkatkan kinerja seluruh aspek Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
4.4.2 Kesesuaian Penerapan Rekayasa Pertambangan: Kehandalan Metode	Perusahaan tidak membuat perencanaan metode kegiatan pertambangan dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan aspek KP	Metode kegiatan pertambangan telah memenuhi persyaratan aspek KP hanya sebatas pada kegiatan yang secara historis telah terjadi kasus KP	Penetapan metode seluruh kegiatan pertambangan telah memenuhi persyaratan aspek KP	Seluruh metode kegiatan pertambangan telah memenuhi persyaratan seluruh aspek Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik	Metode kegiatan pertambangan yang ditetapkan terbukti berhasil berkontribusi dalam meningkatkan kinerja seluruh aspek Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
4.4.3 Penerapan Rekayasa Pertambangan: Kesesuaian Penggunaan Peralatan	Perusahaan tidak membuat perencanaan penggunaan peralatan pertambangan utama dan penunjang	Pemilihan peralatan pertambangan yang mempertimbangkan pemenuhan aspek KP hanya sebatas untuk perbaikan pada kegiatan	Pemilihan seluruh peralatan pertambangan telah sepenuhnya mempertimbangkan pemenuhan aspek KP	Pemilihan peralatan pertambangan telah mempertimbangkan pemenuhan aspek Kaidah Teknik	Penggunaan peralatan pertambangan yang ditetapkan terbukti berhasil berkontribusi dalam

	dengan mempertimbangkan pemenuhan aspek KP	yang secara historis telah terjadi kasus KP atau atas faktor penarik (<i>pull factor</i>) dari eksternal		Pertambahan yang Baik	meningkatkan kinerja seluruh aspek Kaidah Teknik Pertambahan yang Baik
4.4.4 Kesesuaian Penerapan Rekayasa Pertambahan: Penggunaan Peralatan Perangkat Lunak Penunjang Operasional	Perusahaan tidak membuat perencanaan pemilihan perangkat lunak (<i>software</i>) untuk menunjang aspek KP dalam kegiatan operasional pertambangan	Pemilihan <i>software</i> untuk menunjang kegiatan operasional pertambangan dilakukan untuk sebatas membenahi permasalahan KP yang telah teridentifikasi, atau atas faktor penarik (<i>pull factor</i>) dari eksternal	Pemilihan seluruh <i>software</i> untuk menunjang aspek KP dalam kegiatan operasional pertambangan sepenuhnya mempertimbangkan pemenuhan aspek KP, namun belum dilakukan kajian terhadap <i>technology acceptance</i> dari pekerja	Penggunaan <i>software</i> untuk menunjang kegiatan operasional pertambangan sepenuhnya telah memenuhi kualitas aspek fungsional dan teknikal	Penggunaan <i>software</i> untuk menunjang kegiatan operasional pertambangan sepenuhnya telah memenuhi kualitas aspek fungsional dan teknikal dan berhasil mendukung peningkatan kinerja aspek Kaidah Teknik Pertambahan yang Baik
4.4.5 Efektivitas Perancangan dan Rekayasa Pertambahan	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen IV.6.1 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0/3	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen IV.6.1 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0.1/3 s.d. 2/3	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen IV.6.1 dalam 2 tahun terakhir sebesar 2.1/3 s.d. 2.4/3	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen IV.6.1 dalam 2 tahun terakhir sebesar 2.5/3 s.d. 2.9/3	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen IV.6.1 dalam 2 tahun terakhir sebesar 3/3

E. Parameter: Manajemen Aset (Sarana, Prasarana, Instalasi, Peralatan, Material/Bahan) untuk Pemenuhan Persyaratan Keselamatan Pertambangan

ITEM	RUBRIK				
	1	2	3	4	5
4.5.1 Pengadaan dan Pembelian Aset	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen IV.7 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen IV.7	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen IV.7 dalam 2 tahun	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen IV.7 dalam 2 tahun	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen IV.7

(Asset Procurement & Purchasing)		dalam 2 tahun terakhir sebesar 0.1/4 s.d 2/4	terakhir sebesar 2.1/4 s.d 3/4	terakhir sebesar 3.1/4 s.d 3.9/4	dalam 2 tahun terakhir sebesar 4/4
4.5.2 Inventarisasi Asset Keselamatan Pertambangan	Inventarisasi Aset penunjang aspek KP dilakukan secara manual dan tidak terstruktur. Tidak terintegrasi dalam Perencanaan Sumberdaya Perusahaan (<i>Enterprise Resource Planning</i>)	Telah dilakukan inventarisasi aset aspek KP yang mencakup Register Aset yang fokus pada beberapa area/kegiatan saja, tidak termasuk milik kontraktor/sub kontraktor. Belum dilakukan Perencanaan Masa Pakai Aset.	Telah dikembangkan Perencanaan Sumberdaya Perusahaan yang mencakup Register Aset, Penilaian Kondisi Aset, Penilaian Prioritas Aset, Perencanaan Masa Pakai Aset, dan Rencana Kerja Tahunan untuk peralatan dan material pertambangan	Inventarisasi Aset aspek KP dilengkapi dengan <i>Forecast Driven Stock Inventory Management</i> yang mengedepankan optimasi berbasis masa pakai produk. Terdapat sinergi antara Bagian K3 KO, unit pengguna, Bagian Logistik dan Bagian Keuangan untuk pengelolaan inventori.	Register Aset yang terus diperbarui sesuai kondisi aktual. Perusahaan melakukan kontrol terhadap ketersediaan peralatan dan material dan jumlah pasokan aset aspek KP yang dibutuhkan oleh unit kerja pengguna. Telah dilakukan Analisis Kehandalan, Ketersediaan dan Kelayakan Pemeliharaan terhadap aset sebagai dasar upaya peningkatan kinerja aset. Telah dikembangkan sistem untuk memandu <i>predictive maintenance</i>
4.5.3 Manajemen Rantai Pasokan	Perusahaan belum melakukan Manajemen Rantai Pasokan secara terstruktur	Perusahaan mulai menerapkan Manajemen Rantai Pasokan namun belum konsisten sehingga masih terdapat kondisi yang tidak efisien.	Perusahaan telah memiliki perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan arus produk penunjang aspek KP dari mulai pengadaan peralatan dan material hingga didistribusikan kepada unit kerja/departemen pengguna (<i>user</i>)	Perusahaan telah mengembangkan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi arus distribusi peralatan/material pertambangan	Perusahaan telah melakukan distribusi produk yang dibutuhkan untuk penunjang aspek KP secara akurat kepada unit kerja pengguna (<i>Perfect Order Fulfillment 100%</i>) dan tepat waktu (<i>Order Fulfillment Cycle Time</i>)
4.5.4 Manajemen Integritas Aset: Jumlah Pengujian Kelayakan SPIP	Realisasi pengujian kelayakan SPIP sebesar <50% dari target	Realisasi pengujian kelayakan SPIP sebesar 50 - 60% dari target	Realisasi pengujian kelayakan SPIP sebesar 61-80% dari target	Realisasi pengujian kelayakan SPIP sebesar 81-99% dari target	Realisasi pengujian kelayakan SPIP sebesar 100% dari target

4.5.5 Manajemen Integritas Aset: Realisasi <i>Commissioning</i>	Realisasi <i>commissioning</i> peralatan tambang sebesar <50% dari target	Realisasi <i>commissioning</i> peralatan tambang sebesar 50 - 60% dari target	Realisasi <i>commissioning</i> peralatan tambang sebesar 61-80% dari target	Realisasi <i>commissioning</i> peralatan tambang sebesar 81-99% dari target	Realisasi <i>commissioning</i> peralatan tambang sebesar 100% dari target
4.5.6 Manajemen Integritas Aset: Jumlah Pemeliharaan SPIP	Realisasi pemeliharaan SPIP sebesar <50% dari target	Realisasi pemeliharaan SPIP sebesar 50 - 60% dari target	Realisasi pemeliharaan SPIP sebesar 61-80% dari target	Realisasi pemeliharaan SPIP sebesar 81-99% dari target	Realisasi pemeliharaan SPIP sebesar 100% dari target
4.5.7 Nilai <i>Physical Availability</i>	<50%	50-70%	70-80%	81-89%	≥90%
4.5.8 Nilai <i>Mechanical Availability</i>	<50%	50-70%	70-77%	78-84%	≥85%
4.5.9 Realisasi Program Pokok: Keselamatan Operasi	Realisasi Program Keselamatan Operasi pada RKAB 2 tahun terakhir <50%	Realisasi Program Keselamatan Operasi pada RKAB 2 tahun terakhir 50 - 69%	Realisasi Program Keselamatan Operasi pada RKAB 2 tahun terakhir 70-79%	Realisasi Program Keselamatan Operasi pada RKAB 2 tahun terakhir 80-99%	Realisasi Program Keselamatan Operasi pada RKAB 2 tahun terakhir 100%
4.5.10 Efektivitas Program Keselamatan Operasi	Nilai Audit Sub Elemen IV.4 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0/16 s.d. 4/16	Nilai Audit Sub Elemen IV.4 dalam 2 tahun terakhir sebesar 5/16 s.d. 8/16	Nilai Audit Sub Elemen IV.4 dalam 2 tahun terakhir sebesar 9/16 s.d. 12/16	Nilai Audit Sub Elemen IV.4 dalam 2 tahun terakhir sebesar 13/16 s.d. 15/16	Nilai Audit Sub Elemen IV.4 dalam 2 tahun terakhir sebesar 16/16

F. Parameter: Manajemen Kehandalan Pekerja dalam Pengelolaan Keselamatan Pertambangan

ITEM	RUBRIK				
	1	2	3	4	5
4.6.1 Pemenuhan Kelaikan Kerja (<i>Fitness for Duty</i>): Kesiapan Psikologi dan Fisiologis	Seluruh pekerja tidak memenuhi persyaratan Kelaikan Kerja sesuai kajian <i>physical & mental demand analysis</i> untuk profil jabatannya	Hanya 1-50% pekerja yang memenuhi persyaratan Kelaikan Kerja sesuai kajian <i>physical & mental demand analysis</i> untuk profil jabatannya	Hanya 51-80% pekerja yang memenuhi persyaratan Kelaikan Kerja sesuai kajian <i>physical & mental demand analysis</i> untuk profil jabatannya	Hanya 81-99% pekerja yang memenuhi persyaratan Kelaikan Kerja sesuai kajian <i>physical & mental demand analysis</i> untuk profil jabatannya	100% pekerja memenuhi persyaratan Kelaikan Kerja sesuai kajian <i>physical & mental demand analysis</i> untuk profil jabatannya
4.6.2 Efektivitas Seleksi dan Penempatan Personel	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen III.9 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen III.9 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0.1/4 s.d 2/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen III.9 dalam 2 tahun terakhir sebesar 2.1/4 s.d 3/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen III.9 dalam 2 tahun terakhir sebesar 3.1/4 s.d 3.9/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Elemen III.9 dalam 2 tahun terakhir sebesar 4/4
4.6.3 Pemenuhan Kompetensi Pekerja sesuai Standar Kompetensi Kerja	Tidak ada bukti pekerja telah memenuhi persyaratan kompetensi sesuai bidang kerjanya	hanya 1-50% Pekerja yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai bidang kerjanya	hanya 51-80% Pekerja yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai bidang kerjanya	hanya 81-99% Pekerja yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai bidang kerjanya	100% Pekerja memenuhi persyaratan kompetensi sesuai bidang kerjanya
4.6.4 Efektivitas Pemenuhan Kompetensi Kerja	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen III.10.1 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen III.10.1 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0.1/4 s.d 2/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen III.10.1 dalam 2 tahun terakhir sebesar 2.1/4 s.d 3/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen III.10.1 dalam 2 tahun terakhir sebesar 3.1/4 s.d 3.9/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen III.10.1 dalam 2 tahun terakhir sebesar 4/4
4.6.5 Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan Pertambangan	Tidak dilakukan Pendidikan dan Pelatihan Pekerja. Tidak terdapat <i>Training Need Analysis</i> .	Realisasi Pendidikan dan Pelatihan Pekerja sebesar 1-50% dari <i>Training Need Analysis</i>	Realisasi Pendidikan dan Pelatihan Pekerja sebesar 51-80% dari <i>Training Need Analysis</i>	Realisasi Pendidikan dan Pelatihan Pekerja sebesar 81-99% dari <i>Training Need Analysis</i>	Realisasi Pendidikan dan Pelatihan Pekerja sebesar 100% dari <i>Training Need Analysis</i>
4.6.6 Pendekatan Pelaksanaan	Pendidikan dan Pelatihan Aspek KP dilakukan secara logis-	Pendidikan dan Pelatihan Aspek KP dilakukan dengan	Pendidikan dan Pelatihan Aspek KP dilakukan dengan	Pendidikan dan Pelatihan Aspek KP dilakukan secara	Pendidikan dan Pelatihan dilakukan

<p>Pendidikan dan Pelatihan Aspek Keselamatan Pertambangan</p>	<p>deduktif (<i>transfer of knowledge</i>) dengan pendekatan pedagogi, sehingga pekerja hanya menerima ilmu secara pasif dari <i>trainer</i> dan satu arah</p>	<p>pendekatan andragogi dengan target sekedar untuk penguasaan materi</p>	<p>pendekatan andragogi, untuk pencapaian target <i>learning outcomes</i></p>	<p>observatif-induktif dengan pendekatan andragogi, sehingga pekerja mampu menemukan ilmu (<i>ko-kreasi</i>) bersama <i>trainer</i>.</p>	<p><i>personalized</i> secara kreatif-inovatif dengan berbagai skenario yang disiapkan. Pekerja didukung untuk menciptakan ilmu yang original dengan bimbingan <i>trainer</i> dan dipersiapkan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi variasi dari kondisi operasional yang akan dihadapi termasuk kondisi non-rutin.</p>
<p>4.6.7 Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan Aspek Keselamatan Pertambangan</p>	<p>Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen III.10.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0/4</p>	<p>Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen III.10.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0.1/4 s.d 2/4</p>	<p>Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen III.10.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 2.1/4 s.d 3/4</p>	<p>Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen III.10.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 3.1/4 s.d 3.9/4</p>	<p>Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen III.10.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 4/4</p>
<p>4.6.8 Retensi Pengetahuan & Peningkatan Kinerja Pekerja Pasca Pendidikan dan Pelatihan</p>	<p>Pendidikan dan Pelatihan belum memberikan pengaruh signifikan pada peningkatan kinerja pekerja</p>	<p>Kompetensi pasca pendidikan dan pelatihan tidak dipelihara dan diterapkan konsisten, masih ditemukan permasalahan KP akibat kompetensi dari pekerja yang pasca diberikan pasca pendidikan</p>	<p>Perusahaan berhasil memberikan dukungan agar kompetensi yang dilatih dapat dipertahankan dan diimplementasikan dengan baik pada pekerjaan</p>	<p>Pekerja pasca pendidikan dan pelatihan mampu melakukan transfer kompetensi secara tepat kepada pekerja lainnya. Pekerja menjadi agen-agen perubahan.</p>	<p>Pekerja pasca pendidikan dan pelatihan mampu berkontribusi untuk peningkatan kinerja skala organisasi</p>
<p>4.6.9 Retensi Pengetahuan & Peningkatan Kinerja Pekerja Pasca Sertifikasi</p>	<p>Sertifikasi kompetensi belum memberikan pengaruh signifikan pada peningkatan kinerja pekerja</p>	<p>Kompetensi pasca sertifikasi tidak dipelihara dan diterapkan konsisten, masih ditemukan permasalahan KP akibat kompetensi dari pekerja</p>	<p>Perusahaan berhasil memberikan dukungan agar penguasaan kompetensi yang diperoleh dapat dipertahankan</p>	<p>Pekerja pasca sertifikasi kompetensi mampu melakukan transfer kompetensi secara tepat kepada pekerja lainnya</p>	<p>Pekerja pasca pendidikan dan pelatihan mampu berkontribusi untuk peningkatan kinerja skala organisasi</p>

		yang pasca diberikan pasca pendidikan	diimplementasikan dengan baik pada pekerjaan		
4.6.10 Kesesuaian Penetapan Roster dan Shift/Gilir Kerja Pekerja	<i>Roster dan Shift/Gilir Kerja</i> ditetapkan tanpa mempertimbangkan aspek KP	<i>Roster dan Shift/Gilir Kerja</i> ditetapkan hanya dengan pertimbangan ketersediaan dan kecukupan jumlah sumber daya manusia dengan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsi / proses bisnis	<i>Roster dan Shift/Gilir Kerja</i> ditetapkan dengan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketersediaan dan kecukupan jumlah sumber daya manusia yang kompeten dengan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsi / proses bisnis dengan aman dan selamat	<i>Roster dan Shift/Gilir Kerja</i> ditetapkan dengan mempertimbangkan kebijakan, ketentuan peraturan perundang-undangan, kapasitas kerja, beban kerja, dan kondisi lingkungan kerja, khususnya risiko pekerja mengalami kelelahan baik secara fisik, mental, dan psikososial	<i>Roster dan Shift/Gilir Kerja</i> ditetapkan dengan mempertimbangkan kebijakan, ketentuan peraturan perundang-undangan, kapasitas kerja, beban kerja, dan kondisi lingkungan kerja, serta dapat diadaptasikan sesuai dengan rekomendasi dari tenaga ahli terkait seperti dokter perusahaan
4.6.11 Pernyataan Pekerja terkait Kepuasan Kerja (<i>Job Satisfaction</i>) dan Kesejahteraan Mental dalam Bekerja (<i>Mental Well-being</i>) berdasarkan hasil survei	Sebagian besar pekerja menyatakan tidak puas dan tidak nyaman dalam melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, sehingga menghambat kinerjanya dalam penerapan KP	Sebagian besar pekerja menyatakan kurang cukup puas dan kurang cukup nyaman dalam melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, sehingga menghambat kinerjanya dalam penerapan KP	Sebagian besar pekerja menyatakan cukup puas dan nyaman dalam melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya Pekerja menyatakan kesesuaian antara nilai balas jasa kerja pekerja yang diberikan dengan tingkat nilai balas jasa yang diharapkan pekerja (finansial maupun non finansial)	Sebagian besar pekerja menyatakan puas, nyaman, dan sejahtera dalam melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya	Sebagian besar pekerja menyatakan sangat puas, nyaman, dan sejahtera dalam melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, dan kondisi kerja telah mendukung kinerja yang baik dalam KP

G. Parameter: Manajemen Perubahan

ITEM	RUBRIK				
	1	2	3	4	5
4.7.1 Dasar Manajemen Perubahan	Perusahaan tidak melakukan proses formal perihal manajemen perubahan dan modifikasi atas perancangan dan rekayasa yang mempunyai risiko KP dan/atau mempunyai implikasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Perusahaan melakukan manajemen perubahan apabila terjadi perubahan dan modifikasi pada sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan hanya jika ada pengawasan dari eksternal	Perusahaan melakukan manajemen perubahan apabila terjadi perubahan dan modifikasi pada sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan sesuai dengan rencana kajian teknis yang tertulis pada RKAB yang diberikan pemerintah	Perusahaan merencanakan manajemen perubahan secara proaktif berdasarkan hasil <i>research and development</i> terhadap peluang peningkatan kinerja KP	Perusahaan melakukan manajemen perubahan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh unsur di perusahaan sehingga menghasilkan perubahan proses yang dapat dijadikan sebagai kekayaan intelektual perusahaan dan keunggulan kompetitif perusahaan
4.7.2 Kebermanfaatan Manajemen Perubahan	Manajemen perubahan tidak berkontribusi kepada peningkatan kinerja KP	Manajemen perubahan memberikan kontribusi untuk penyelesaian permasalahan / kasus spesifik terkait aspek KP yang telah teridentifikasi sebelumnya	Manajemen perubahan dilakukan dengan tepat sehingga mampu berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan KP secara umum dan meningkatkan kinerja aspek KP	Manajemen perubahan dilakukan dengan tepat sehingga memberikan manfaat untuk peningkatan kinerja aspek KP + aspek keekonomian (perusahaan menjadi lebih efisien dan kompetitif)	Manajemen perubahan dilakukan dengan tepat sehingga memberikan manfaat untuk peningkatan kinerja seluruh aspek Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik + aspek keekonomian

4.7.3 Daya Tanggap Organisasi atas Perubahan dari Eksternal	Perusahaan tidak memiliki kesiapan dan cenderung resisten (tidak memiliki kemauan untuk berubah) dalam merespon tantangan perubahan yang datang dari luar Perusahaan	Perusahaan lambat dalam merespon tantangan perubahan yang datang dari luar Perusahaan dan respon yang dijalankan tidak tepat dalam menjawab tantangan yang ada	Perusahaan mampu merespon tantangan perubahan yang datang dari luar Perusahaan dengan cepat dan tepat, namun masih berfokus pada penyelesaian masalah	Perusahaan mampu merespon tantangan perubahan yang datang dari luar Perusahaan dengan cepat dan tepat serta memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mengatasi gejala awal (<i>early warning</i>)	Perusahaan telah memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mengatasi gejala awal (<i>early warning</i>) dan melakukan tinjauan rutin dan peningkatan berkelanjutan terhadap kelayakan sistem manajemen dan sumber daya Perusahaan
4.7.4 Efektivitas Kajian Teknis Pertambangan	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen IV.4.5 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen IV.4.5 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0.1/4 s.d 2/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen IV.4.5 dalam 2 tahun terakhir sebesar 2.1/4 s.d 3/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen IV.4.5 dalam 2 tahun terakhir sebesar 3.1/4 s.d 3.9/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen IV.4.5 dalam 2 tahun terakhir sebesar 4/4
4.7.5 Efektivitas Manajemen Perubahan	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen IV.6.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen IV.6.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0.1/4 s.d 2/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen IV.6.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 2.1/4 s.d 3/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen IV.6.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 3.1/4 s.d 3.9/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen IV.6.2 dalam 2 tahun terakhir sebesar 4/4

H. Parameter: Manajemen Keadaan Darurat

ITEM	RUBRIK				
	1	2	3	4	5
4.8.1 Efektivitas Tim Tanggap Darurat	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen III.8 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen III.8 dalam 2 tahun sebesar 0.1/4 s.d 2/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen III.8 dalam 2 tahun	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen III.8 dalam 2 tahun terakhir	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen III.8 dalam 2 tahun terakhir sebesar 4/4

			terakhir sebesar 2.1/4 s.d 3/4	sebesar 3.1/4 s.d 3.9/4	
4.8.2 Efektivitas Manajemen Keadaan Darurat	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen IV.9 dalam 2 tahun terakhir sebesar 0/3	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen IV.9 dalam 2 tahun sebesar 0.1/3 s.d 2/3	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen IV.9 dalam 2 tahun terakhir sebesar 2.1/3 s.d 2.4/3	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen IV.9 dalam 2 tahun sebesar 2.5/3 s.d 2.9/4	Nilai rata-rata hasil Audit Sub Sub Elemen IV.9 dalam 2 tahun terakhir sebesar 3/3

I. Parameter: Manajemen Perusahaan Jasa Pertambangan

ITEM	RUBRIK				
	1	2	3	4	5
4.9.1 Kesesuaian Persyaratan, Seleksi, dan Penetapan Perusahaan Jasa Pertambangan	Nilai rata-rata Audit Sub Sub Elemen IV.8.1 dalam 2 tahun terakhir 0/2	Nilai rata-rata Audit Sub Sub Elemen IV.8.1 dalam 2 tahun terakhir 0.5 s.d. 1/2	Nilai rata-rata Audit Sub Sub Elemen IV.8.1 dalam 2 tahun terakhir 1.1 s.d. 1.5/2	Nilai rata-rata Audit Sub Sub Elemen IV.8.1 dalam 2 tahun terakhir 1.5 s.d. 1.9/2	Nilai rata-rata Audit Sub Sub Elemen IV.8.1 dalam 2 tahun terakhir 2/2
4.9.2 Kesesuaian Penetapan Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pertambangan	Nilai rata-rata Audit Sub Sub Elemen IV.8.2 dalam 2 tahun terakhir 0/2	Nilai rata-rata Audit Sub Sub Elemen IV.8.2 dalam 2 tahun terakhir 0.5 s.d. 1/2	Nilai Audit Sub Sub Elemen IV.8.2 dalam 2 tahun terakhir 1.1 s.d. 1.5/2	Nilai rata-rata Sub Sub Elemen IV.8.2 dalam 2 tahun terakhir 1.5 s.d. 1.9/2	Nilai rata-rata Sub Sub Elemen IV.8.2 dalam 2 tahun terakhir 2/2
4.9.3 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Jasa Pertambangan	Nilai rata-rata Audit Sub Sub Elemen IV.8.3 dalam 2 tahun terakhir 0/2	Nilai rata-rata Audit Sub Sub Elemen IV.8.3 dalam 2 tahun terakhir 0.5 s.d. 1/2	Nilai Audit Sub Sub Elemen IV.8.3 dalam 2 tahun terakhir 1.1 s.d. 1.5/2	Nilai rata-rata Sub Sub Elemen IV.8.3 dalam 2 tahun terakhir 1.5 s.d. 1.9/2	Nilai rata-rata Sub Sub Elemen IV.8.3 dalam 2 tahun terakhir 2/2

J. Parameter: Manajemen Dokumen & Rekaman Keselamatan Pertambangan

ITEM	RUBRIK				
	1	2	3	4	5
4.10.1 Manajemen Dokumentasi Keselamatan Pertambangan	Perusahaan belum memiliki tata cara kerja baku operasional pertambangan dan formulir perekaman yang terkontrol melalui sistem dokumentasi perusahaan melalui SMKP Perusahaan mulai menyiapkan dokumen dan rekaman hanya pada saat dilakukan audit dan/atau pengawasan dari eksternal.	Perusahaan telah memiliki tata cara kerja baku operasional pertambangan dan formulir perekaman, namun belum memiliki arsitektur pengelolaan dokumentasi aspek KP yang terintegrasi dalam SMKP.	Manajemen perusahaan telah melakukan penetapan hierarki dan level dokumentasi dan asas penataannya (Sentralisasi/ Desentralisasi/ Kombinasi) yang terintegrasi dalam SMKP.	Penetapan hierarki dan level dokumentasi dan asas penataannya dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan mempertimbangkan skala, kompleksitas usaha, karakteristik dan profil risiko, sumber daya, budaya, dan kebutuhan organisasi	Pengembangan dokumentasi KP dalam SMKP telah sesuai dengan skala, kompleksitas usaha, karakteristik dan profil risiko, sumber daya, budaya, dan kebutuhan organisasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta memenuhi persyaratan perundangan
4.10.2 Efektivitas Manajemen Dokumentasi	Nilai rata-rata hasil Audit SMKP Elemen VI dalam 2 tahun terakhir: 0%	Nilai rata-rata hasil Audit SMKP Elemen VI dalam 2 tahun terakhir: 0.1 - 1%	Nilai rata-rata hasil Audit SMKP Elemen VI dalam 2 tahun terakhir: 1.1-2%	Nilai rata-rata hasil Audit SMKP Elemen I dalam 2 tahun terakhir: 2.1 - 2.9%	Nilai rata-rata hasil Audit SMKP Elemen VI dalam 2 tahun terakhir: 3%
4.10.3 Manajemen Pengetahuan	Perusahaan belum memiliki proses formal untuk manajemen informasi KP	Perusahaan telah mengidentifikasi, mengelola, menyimpan informasi kepada pekerja secara terpusat. Data rekaman KP telah dikelola menjadi informasi	Perusahaan aktif mengumpulkan pekerja melalui pertemuan, rapat, diskusi, dan lain-lain secara reguler, untuk mendiseminasikan pengetahuan yang terdokumentasi (<i>explicit knowledge</i>) dan pengetahuan yang berbentuk	Perusahaan mampu secara efektif mengaplikasikan aset pengetahuan. Rekaman KP dianalisis menjadi sebuah informasi, yang kemudian dianalisis lanjut dan diterapkan sehingga menjadi	Perusahaan telah memiliki informasi KP yang telah dikonfirmasi akurat dan selalu tersedia untuk membantu pekerja melakukan pekerjaan dengan selamat. Pengetahuan dianalisis dan diterapkan sehingga

			<p>pengalaman, pemahaman, maupun petunjuk praktis dari individu yang tidak terdokumentasi (<i>tacit knowledge</i>) berdasarkan data rekaman KP yang telah dianalisis.</p>	<p>pengetahuan. Pengetahuan dibangun oleh organisasi melalui proses pemerolehan, pendistribusian, kolaborasi dan komunikasi serta penciptaan pengetahuan baru.</p>	<p>memberikan panduan bagi pekerja tambang menjadi bijaksana dalam pengelolaan KP. Kemampuan Inteligensi Bisnis dalam pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data KP dari operasional (<i>Enterprise intelligence</i>) dalam aspek KP telah dikembangkan dengan sangat memadai.</p>
--	--	--	---	--	---

Perhitungan nilai setiap indikator adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Capaian Parameter adalah penjumlahan dari total nilai seluruh item pengukuran dibagi jumlah item pengukuran yang dikalikan 5, kemudian dikalikan bobot parameter yang ditetapkan

$$\text{Nilai Capaian Parameter} = \frac{\text{Total Nilai Seluruh Item Pengukuran}}{5 \times \text{Jumlah Total Item Pengukuran}} \times \text{Bobot Parameter}$$

- b. Nilai Capaian Indikator adalah penjumlahan dari seluruh Nilai Capaian Parameter dalam Indikator yang sama

$$\text{Nilai Capaian Indikator} = \text{Total dari Nilai Capaian Seluruh Parameter dalam Indikator}$$

- c. Nilai Pencapaian Kinerja adalah penjumlahan dari seluruh Nilai Capaian Indikator

$$\text{Nilai Pencapaian Kinerja} = \text{Total dari Nilai Capaian Seluruh Indikator}$$

Nilai pencapaian kinerja Keselamatan yang dihasilkan menjadi dasar penetapan kategori Tingkat Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan, yang dapat disajikan dalam :

1. Pencapaian total untuk seluruh indikator (umum)
2. Pencapaian untuk masing-masing indikator

Tabel Nilai Pencapaian Kinerja

INDIKATOR	PARAMETER	NILAI MAKSIMUM	NILAI CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
Partisipasi Pekerja Tambang	Kepedulian dan Perilaku Individu terhadap Risiko Keselamatan Pertambangan	0.05	
	Keterlibatan Pekerja dalam Pengelolaan Keselamatan Pertambangan	0.10	
	<i>Total Nilai Indikator</i>	0.15	Dasar/ Reaktif/ Terencana/ Proaktif/ Resilient
Tanggung Jawab Pimpinan Unit Kerja	Implementasi Kebijakan Keselamatan Pertambangan	0.05	
	Kepemimpinan dan Komitmen Keselamatan Pertambangan	0.05	
	Kepatuhan dan Penegakan Peraturan Keselamatan Pertambangan	0.05	
	Penetapan Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan dalam Keselamatan Pertambangan	0.04	
	Manajemen Strategi dan Operasi Keselamatan Pertambangan	0.04	
	Informasi, Komunikasi, Pendampingan, Konsultasi Keselamatan Pertambangan	0.04	
	Pengendalian Mutu Keselamatan Pertambangan dalam Kegiatan Operasional	0.04	
	Penjaminan Mutu Keselamatan Pertambangan melalui Audit Internal SMKP	0.04	
	<i>Total Nilai Indikator</i>	0.35	Dasar/ Reaktif/ Terencana/ Proaktif/ Resilient
Analisis dan Statistik Kecelakaan, Penyakit Akibat Kerja, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan Kejadian Berbahaya	Analisis Terhadap Data Kasus Keselamatan Pertambangan	0.05	
	Investigasi Kasus Keselamatan Pertambangan	0.05	
	Statistik Kinerja Keselamatan Pertambangan Berdasarkan Indikator Tertinggal	0.05	
	Pembelajaran Organisasi	0.05	
	<i>Total Nilai Indikator</i>	0.20	Dasar/ Reaktif/ Terencana/ Proaktif/ Resilient

Upaya-Upaya Pengendalian yang Dilakukan	Pengendalian Risiko Keselamatan Pertambangan Berbasis Tata Kelola	0.04	
	Manajemen Kesehatan Kerja Pertambangan	0.03	
	Manajemen Lingkungan Kerja Pertambangan	0.03		
	Manajemen Rekayasa & Desain Proses	0.04	
	Manajemen Aset Keselamatan Pertambangan	0.04	
	Manajemen Keandalan Pekerja dalam Pengelolaan Keselamatan Pertambangan	0.03	
	Manajemen Perubahan	0.04	
	Manajemen Keadaan Darurat	0.03	
	Manajemen Perusahaan Jasa Pertambangan	0.01		
	Manajemen Dokumen & Rekaman Keselamatan Pertambangan	0.01	
		Total Nilai Indikator	0.30
NILAI TOTAL PENCAPAIAN KINERJA		1.00	Dasar/ Reaktif/ Terencana/ Proaktif/ Resilient

Penetapan kategori tingkat pencapaian adalah berdasarkan hal berikut:

- Nilai Pencapaian < 0.50 : Tingkat Dasar
- Nilai Pencapaian $0.50 \leq x < 0.70$: Tingkat Reaktif
- Nilai Pencapaian $0.70 \leq x < 0.80$: Tingkat Terencana
- Nilai Pencapaian $0.80 \leq x < 0.90$: Tingkat Proaktif
- Nilai Pencapaian $0.90 \leq x \leq 1$: Tingkat *Resilient*

Sedangkan penetapan kategori tingkat pencapaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

A. Partisipasi Pekerja Tambang

- Nilai Pencapaian < 0.07 : Tingkat Dasar
- Nilai Pencapaian $0.07 \leq x < 0.10$: Tingkat Reaktif
- Nilai Pencapaian $0.10 \leq x < 0.12$: Tingkat Terencana
- Nilai Pencapaian $0.12 \leq x < 0.14$: Tingkat Proaktif
- Nilai Pencapaian $0.14 \leq x \leq 0.15$: Tingkat *Resilient*

B. Tanggung Jawab Pimpinan Unit Kerja

- Nilai Pencapaian < 0.17 : Tingkat Dasar
- Nilai Pencapaian $0.17 \leq x < 0.24$: Tingkat Reaktif
- Nilai Pencapaian $0.24 \leq x < 0.29$: Tingkat Terencana
- Nilai Pencapaian $0.29 \leq x < 0.33$: Tingkat Proaktif
- Nilai Pencapaian $0.33 \leq x \leq 0.35$: Tingkat *Resilient*

C. Analisis dan Statistik Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan Penyakit Akibat Kerja

- Nilai Pencapaian < 0.10 : Tingkat Dasar
- Nilai Pencapaian $0.10 \leq x < 0.14$: Tingkat Reaktif
- Nilai Pencapaian $0.14 \leq x < 0.17$: Tingkat Terencana
- Nilai Pencapaian $0.17 \leq x < 0.19$: Tingkat Proaktif
- Nilai Pencapaian $0.19 \leq x \leq 0.20$: Tingkat *Resilient*

D. Upaya-Upaya Pengendalian yang Dilakukan

- Nilai Pencapaian < 0.15 : Tingkat Dasar
- Nilai Pencapaian $0.15 \leq x < 0.20$: Tingkat Reaktif
- Nilai Pencapaian $0.21 \leq x < 0.25$: Tingkat Terencana
- Nilai Pencapaian $0.25 \leq x < 0.28$: Tingkat Proaktif
- Nilai Pencapaian $0.28 \leq x \leq 0.30$: Tingkat *Resilient*

Selain dapat disajikan dalam pencapaian total untuk seluruh indikator (umum) dan pencapaian untuk masing-masing indikator di skala organisasi/perusahaan, Tingkat Pencapaian Kinerja juga dapat disajikan pada satuan departemen/bagian, khusus untuk indikator: Partisipasi Pekerja Tambang, Tanggung Jawab Pimpinan Unit Kerja, dan Upaya-Upaya Pengendalian yang Dilakukan, dengan melakukan penyesuaian pada item pengukuran yang ditetapkan.

F. Metode Pengumpulan Data Penilaian Tingkat Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan

Metode pengumpulan data untuk menilai pencapaian setiap item dari parameter dan indikator ditetapkan dengan mengacu kepada rubrik yang dinarasikan pada Matriks Penilaian yang ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif yang dapat mencakup tinjauan

dokumentasi, pengamatan/observasi kegiatan, kuesioner, wawancara, dan teknik analisis.

A. Tinjauan Dokumentasi

Tinjauan dokumentasi dan rekaman merupakan teknik untuk mengumpulkan data dengan meninjau dokumen tata cara baku penerapan Keselamatan Pertambangan dan rekaman bukti kerja yang memiliki relevansi dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk kriteria pengukuran. Salah satu data yang wajib disiapkan adalah hasil audit internal SMKP 2 (dua) tahun terakhir, untuk perusahaan yang telah memiliki izin aktif lebih dari 2 (dua) tahun.

B. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Desain Instrumen Kuesioner dikembangkan mengacu kepada kriteria pengukuran setiap item/variabel. Dalam mengukur data kuantitatif sebuah item digunakan Skala Likert (*Likert Scale*) khususnya untuk survei persepsi dari pekerja tambang.

Teknik pengisian kuesioner adalah swa-penilaian (*self-assessment*) dari pekerja yang ditetapkan sebagai sampel responden.

Perhitungan jumlah sampel responden dalam kuesioner menggunakan Formula Sampling Slovin yang memperhitungkan tingkat kepercayaan dan batas galat, yang memberikan gambaran tentang seberapa besar ukuran sampel yang dibutuhkan untuk memastikan tingkat akurasi hasil.

Rumus Slovin digunakan untuk menghitung jumlah sampel (n) mengingat ukuran populasi (N) dan batas galat/*margin of error* (e), sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1+(N \times e \times e)}, \text{ dimana}$$

n = jumlah sampel; N = jumlah populasi; e = batas galat

Nilai Batas Galat (*Margin of Error*) maksimal yang diperbolehkan adalah 5%. Untuk meningkatkan reliabilitas data yang diperoleh, Indikator Partisipasi Pekerja Tambang direkomendasikan untuk dinilai dengan menggunakan teknik *Proportionate Stratified Random Sampling*, yaitu

penentuan sampel dengan memperhatikan strata dalam populasi sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan, misalnya: perwakilan Manajemen Puncak, Kepala Teknik Tambang/Penangguna Jawab Operasional, Pimpinan Departemen/Manager, *Superintendent*, *Supervisor*, *Foreman*, Operator/Mekanik, *Helper*, Non-Staf.

Dengan teknik ini diharapkan kondisi yang terjadi pada setiap kelompok responden dapat lebih terwakili. Rumus untuk teknik ini adalah sebagai berikut.

$$n_h = \frac{N_h \times n}{N}, \text{ dimana:}$$

n_h = jumlah sampel dari stratum h ; N_h = total populasi dari stratum h

Responden kuesioner disarankan agar hanya mencantumkan jabatan pekerja, tidak mencantumkan nama pekerja (anonim).

C. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk kuantitatif maupun kualitatif, dengan menggunakan informan yang menjawab pertanyaan yang diajukan, untuk pembuktian terhadap informasi yang telah diperoleh. Untuk pengumpulan data kuantitatif, wawancara wajib dilakukan dengan bentuk terstruktur, dengan instrumen Daftar Pertanyaan Wawancara dikembangkan mengacu kepada kriteria pengukuran item/variabel terkait. Sedangkan untuk pengumpulan data kualitatif, teknik yang dilakukan adalah wawancara mendalam kepada Informan Kunci.

D. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran sesuai dengan item yang dilakukan pengukuran. Observasi dapat bersifat partisipatoris atau non partisipatoris.

E. *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion (diskusi kelompok terarah) dilakukan sebagai metode kualitatif lanjutan, khususnya dengan desain *sequential*

explanatory, untuk membahas secara terfokus mengenai data dan informasi pendukung yang telah dikumpulkan sebelumnya maupun hasil analisis sementara, dengan lebih mendalam. *Focus Group Discussion* dipimpin oleh moderator yang berasal dari Tim Penilai. Peserta *Focus Group Discussion* merupakan informan kunci dari pekerja tambang yang dipilih dengan mempertimbangkan relevansinya dengan topik pembahasan yang ditetapkan, seperti kompetensi, pengalaman praktis, dan/atau keterlibatan pekerja tersebut dalam topik yang dibahas. Moderator memimpin jalannya diskusi, menjadi katalisator yang menjaga dinamika diskusi, dan memimpin proses pencapaian suatu kesepakatan tertentu yang ditetapkan pada tujuan.

F. Pengujian / Simulasi

Pengujian dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis untuk mendapatkan informasi mengenai pengetahuan, keterampilan, sikap kerja maupun kondisi tertentu dari target sampel (pekerja tambang) sesuai dengan item pengukuran yang dimaksud.

G. Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu melalui proses *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing* atau *verification*.

Tabel Rekomendasi Metode Pengambilan Data

No	Parameter	Dimensi	No	Item Pengukuran	Metode Pengukuran
PARTISIPASI PEKERJA TAMBANG					
1.1	Kepedulian dan Perilaku Individu terhadap Risiko Keselamatan Pertambangan	Kualitatif	1.1.1	Kesadaran Pekerja terhadap Risiko Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi Pengujian Observasi
			1.1.2	Komitmen dan Inisiatif Pekerja dalam Pengelolaan Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi Kuesioner Observasi
			1.1.3	Kedisiplinan Pekerja di Dalam Pekerjaan dan di Luar Pekerjaan	Tinjauan Dokumentasi Observasi <i>Focus Group Discussion</i>
			1.1.4	Aktualisasi Nilai-Nilai Inti Perusahaan (<i>Core Values</i>) oleh Pekerja	Tinjauan Dokumentasi Wawancara/ <i>Focus Group Discussion</i>
			1.1.5	Aktualisasi Aturan Emas Keselamatan Pertambangan (<i>Golden Rules</i>) Perusahaan oleh Pekerja	Tinjauan Dokumentasi Wawancara/ <i>Focus Group Discussion</i>
1.2	Keterlibatan Pekerja dalam Pengelolaan Keselamatan Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif	1.2.1	Kehadiran Pekerja dalam Pekerjaan di Hari Kerja	Tinjauan Dokumentasi

1.2.2	Kehadiran Pekerja dalam Kegiatan Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
1.2.3	Peran Pekerja dalam Kegiatan Keselamatan Pertambangan	Kuesioner Wawancara/ <i>Focus Group Discussion</i>
1.2.4	Keterlibatan Perwakilan Departemen/Bagian/Seksi dalam Tim Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
1.2.5	Peran Perwakilan Departemen/Bagian/Seksi dalam Manajemen Risiko	Kuesioner Wawancara/ <i>Focus Group Discussion</i>
1.2.6	Keterlibatan Pekerja (Non-Pengawas) dalam Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan	Wawancara <i>Focus Group Discussion</i>
1.2.7	Peran Pekerja (Non-Pengawas) dalam Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan	Wawancara <i>Focus Group Discussion</i>
1.2.8	Keterlibatan Komite Keselamatan Pertambangan dalam Penyusunan Tujuan, Sasaran, dan Program Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
1.2.9	Peran Anggota Komite Keselamatan Pertambangan dalam Penyusunan Tujuan, Sasaran, dan Program Keselamatan Pertambangan	Wawancara <i>Focus Group Discussion</i>
1.2.10	Peran Komite Keselamatan Pertambangan dalam Pemantauan Pelaksanaan dan Perkembangan Tujuan, Sasaran, dan Program Keselamatan Pertambangan	Wawancara <i>Focus Group Discussion</i>

1.2.11	Kehadiran dan Keterlibatan Ketua Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
1.2.12	Peran Ketua Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite Keselamatan Pertambangan	Wawancara <i>Focus Group Discussion</i>
1.2.13	Kehadiran dan Keterlibatan Wakil Ketua Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
1.2.14	Peran Wakil Ketua Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite Keselamatan Pertambangan	Wawancara <i>Focus Group Discussion</i>
1.2.15	Kehadiran dan Keterlibatan Sekretaris Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
1.2.16	Peran Sekretaris Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite Keselamatan Pertambangan	Wawancara <i>Focus Group Discussion</i>
1.2.17	Kehadiran dan Keterlibatan Anggota Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
1.2.18	Peran Anggota Komite Keselamatan Pertambangan dalam Rapat Komite Keselamatan Pertambangan	Wawancara <i>Focus Group Discussion</i>
1.2.19	Peran Anggota Komite Keselamatan Pertambangan dalam Mewakili Departemen/Bagiannya	Wawancara <i>Focus Group Discussion</i>

			1.2.20	Jumlah Pelaporan Bahaya dan/atau <i>Whistleblowing</i> oleh Pekerja	Tinjauan Dokumentasi Wawancara
			1.2.21	Kesesuaian dan Keandalan Kesesuaian Pelaporan Bahaya dan/atau <i>Whistleblowing</i> oleh Pekerja	Tinjauan Dokumentasi
			1.2.22	Jumlah Saran dan Masukan Pekerja untuk Peningkatan Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
			1.2.23	Kesesuaian dan Keandalan Saran dan Masukan Pekerja untuk Peningkatan Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi Wawancara
			1.2.24	Efektivitas Partisipasi Pekerja	Tinjauan Dokumentasi Wawancara
TANGGUNG JAWAB PIMPINAN UNIT KERJA					
2.1	Implementasi Kebijakan Keselamatan Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif	2.1.1	Upaya Internalisasi Nilai-Nilai Perusahaan oleh Manajemen	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>
			2.1.2	Upaya Internalisasi Aturan Emas Keselamatan Pertambangan (<i>Golden Rules</i>) Perusahaan oleh Manajemen	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>
			2.1.3	Efektivitas Kebijakan Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
			2.1.4	Persepsi Pekerja terhadap Komitmen Manajemen dalam Penerapan Kebijakan Keselamatan Pertambangan	Kuesioner Wawancara
2.2	Kepemimpinan dan Komitmen Keselamatan Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif	2.2.1	Persepsi Manajemen Puncak terhadap Peran Keselamatan Pertambangan	Wawancara
			2.2.2	Persepsi Pekerja terhadap Kepemimpinan dan Komitmen Manajemen	Kuesioner Wawancara

2.2.3	Ketersediaan Anggaran Keselamatan Pertambangan dalam RKAB	Tinjauan Dokumentasi Wawancara
2.2.4	Realisasi Anggaran Keselamatan Pertambangan dalam RKAB	Tinjauan Dokumentasi
2.2.5	Kecepatan Manajemen Puncak dalam Merespon Isu Keselamatan Pertambangan	Kuesioner <i>Focus Group Discussion</i>
2.2.6	Jumlah Kehadiran Manajemen Puncak pada Kunjungan <i>Site</i>	Tinjauan Dokumentasi
2.2.7	Peran Manajemen Puncak dalam Kunjungan <i>Site</i>	Wawancara <i>Focus Group Discussion</i>
2.2.8	Efektivitas Rapat Tinjauan Manajemen	Tinjauan Dokumentasi
2.2.9	Peran Pimpinan Tertinggi pada Rapat Tinjauan Manajemen	Wawancara <i>Focus Group Discussion</i>
2.2.10	Dukungan Manajemen untuk Inovasi dan Peningkatan Kinerja Keselamatan Pertambangan	Wawancara <i>Focus Group Discussion</i>
2.2.11	Pemberian Penghargaan atas Kinerja Keselamatan Pertambangan dari Pekerja	Tinjauan Dokumentasi Wawancara
2.2.12	Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Keselamatan Pertambangan dari Pekerja	Tinjauan Dokumentasi Wawancara
2.2.13	Persepsi KTT/PJO terhadap Peran Keselamatan Pertambangan	Wawancara
2.2.14	Tingkat Kehadiran KTT/PJO di <i>Site</i> (tidak termasuk cuti dan menghadiri undangan dari Instansi Pembina)	Tinjauan Dokumentasi
2.2.15	Persepsi Pekerja terhadap Kepemimpinan dan Komitmen dari KTT/PJO	Kuesioner <i>Focus Group Discussion</i>

2.2.16	Persepsi Pimpinan Departemen/Bagian/Seksi terhadap Peran Keselamatan Pertambangan	Kuesioner
2.2.17	Persepsi Pekerja terhadap Kepemimpinan dan Komitmen dari Pimpinan Departemen/Bagian/Seksi	Kuesioner Wawancara
2.2.18	Kehadiran KTT/PJO dalam Kegiatan Keselamatan Pertambangan (Rapat, Pertemuan, Seminar, dan Kegiatan Lainnya)	Tinjauan Dokumentasi
2.2.19	Peran KTT/PJO dalam Kegiatan Keselamatan Pertambangan (Rapat, Pertemuan, Seminar, dan Kegiatan Lainnya)	Kuesioner <i>Focus Group Discussion</i>
2.2.20	Peran KTT/PJO dalam Penyusunan dan Tinjauan Kebijakan Keselamatan Pertambangan	Kuesioner <i>Focus Group Discussion</i>
2.2.21	Peran KTT/PJO dalam Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan	Kuesioner <i>Focus Group Discussion</i>
2.2.22	Keterlibatan Pimpinan Departemen/Bagian dalam Penyusunan dan Tinjauan Kebijakan Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
2.2.23	Peran Pimpinan Departemen/Bagian dalam Penyusunan dan Tinjauan Kebijakan Keselamatan Pertambangan	Kuesioner <i>Focus Group Discussion</i>
2.2.24	Keterlibatan Pimpinan Departemen/Bagian/Seksi dalam Kegiatan Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi

			2.2.25	Peran Pimpinan Departemen/Bagian/Seksi dalam Kegiatan Keselamatan Pertambangan	Kuesioner <i>Focus Group Discussion</i>
			2.2.26	Keterlibatan Pimpinan Departemen/Bagian/Seksi dalam Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
			2.2.27	Peran Pimpinan Departemen/Bagian/Seksi dalam Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan	Kuesioner <i>Focus Group Discussion</i>
			2.2.28	Kehadiran Pengawas Operasional dalam Pertemuan Keselamatan Pertambangan Kelompok Kerja	Tinjauan Dokumentasi
			2.2.29	Peran Pengawas Operasional dalam Pertemuan Keselamatan Pertambangan Kelompok Kerja	Kuesioner <i>Focus Group Discussion</i>
			2.2.30	Keterlibatan Pengawas Operasional dalam Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
			2.2.31	Peran Pengawas Operasional dalam Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan	Kuesioner <i>Focus Group Discussion</i>
2.3	Kepatuhan dan Penegakan Peraturan Keselamatan Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif	2.3.1	Inisiatif dan Kesadaran untuk Pemenuhan Persyaratan Perundangan Aspek Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi Wawancara
			2.3.2	Efektivitas Pemenuhan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait	Tinjauan Dokumentasi
			2.3.3	Respon Perusahaan terhadap Undangan dari Instansi Pembina Sektor	Tinjauan Dokumentasi Wawancara

			2.3.4	Kepatuhan Perusahaan dalam Menindaklanjuti Arahan Tertulis dari Instansi Pembina Sektor melalui Surat Edaran Kepala Inspektur Tambang	Tinjauan Dokumentasi Wawancara
			2.3.5	Kepatuhan Perusahaan dalam menindaklanjuti Hasil Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektur Tambang	Tinjauan Dokumentasi
			2.3.6	Kepatuhan KTT dalam Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
			2.3.7	Kepatuhan KTT dalam Pelaporan Khusus atas Kasus Keselamatan Pertambangan kepada KaIT	Tinjauan Dokumentasi
			2.3.8	Kepatuhan PJO dan Pimpinan Departemen/Bagian dalam menindaklanjuti Arahan/Instruksi KTT terkait pemenuhan Peraturan Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi Wawancara
2.4	Penetapan Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan dalam Keselamatan Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif	2.4.1	Kemandirian Pengelolaan Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>
			2.4.2	Ketersediaan Kepala Teknik Tambang	Tinjauan Dokumentasi Wawancara
			2.4.3	Ketersediaan Penanggung Jawab Operasional	Tinjauan Dokumentasi Wawancara
			2.4.4	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab KTT/PJO	Tinjauan Dokumentasi
			2.4.5	Ketersediaan Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten	Tinjauan Dokumentasi
			2.4.6	Ketersediaan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknis	Tinjauan Dokumentasi

			2.4.7	Pelaksanaan Jumlah Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas Operasional dan Pengawas Teknis	Tinjauan Dokumentasi
			2.4.8	Ketersediaan dan Kewenangan Bagian K3 dan Bagian KO Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>
			2.4.9	Penetapan Tanggung Jawab/ <i>Job Description</i> terkait Keselamatan Pertambangan untuk Pekerja	Tinjauan Dokumentasi
			2.4.10	Pemberian Dukungan dan Kewenangan kepada Pekerja untuk Menyatakan Keberatan Bekerja jika Syarat Keselamatan Pertambangan Diragukan	Kuesioner <i>Focus Group Discussion</i>
			2.4.11	Penerapan Mekanisme Pemilihan Perwakilan Pekerja pada Komite Keselamatan Pertambangan	Kuesioner <i>Focus Group Discussion</i>
			2.4.12	Persepsi Manajemen terhadap Pengelolaan Pekerja Tambang	Kuesioner/ Wawancara
2.5	Manajemen Strategi dan Operasi Keselamatan Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif	2.5.1	Formulasi Strategi Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>
			2.5.2	Penjabaran dan Penyelarasan Strategi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>
			2.5.3	Ruang Lingkup Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>
			2.5.4	Efektivitas Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
2.6	Informasi, Komunikasi, Pendampingan, Konsultasi	Kualitatif Kuantitatif	2.6.1	Kesesuaian Induksi Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
			2.6.2	Jumlah Pertemuan Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi

Keselamatan Pertambangan	2.6.3	Kualitas Pertemuan Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi Wawancara
	2.6.4	Jumlah Kampanye Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
	2.6.5	Efektivitas Kampanye Keselamatan Pertambangan	Kuesioner <i>Focus Group Discussion</i>
	2.6.6	Efektivitas Komunikasi Keselamatan Pertambangan Eksternal dengan Mitra Kerja (<i>Customer</i> , Kontraktor, Sub Kontraktor, dll)	Kuesioner Wawancara
	2.6.7	Efektivitas Komunikasi Vertikal antara Pimpinan Unit Kerja dengan Anggota	Kuesioner Wawancara
	2.6.8	Efektivitas Komunikasi Horisontal antar Rekan Kerja	Kuesioner Wawancara
	2.6.9	Efektivitas Komunikasi antar Kelompok Kerja	Kuesioner Wawancara
	2.6.10	Efektivitas Komunikasi antar Gilir Kerja/ <i>Shift</i>	Kuesioner Wawancara
	2.6.11	Kehandalan Fasilitas dan Media Penunjang Komunikasi Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi Observasi
	2.6.12	Jumlah <i>Mentoring, Coaching, dan Counselling</i> untuk Pekerja dari Pimpinan Tim Kerja	Tinjauan Dokumentasi
	2.6.13	Efektivitas <i>Mentoring, Coaching, dan Counselling</i> untuk Pekerja dari Pimpinan Tim Kerja	Kuesioner <i>Focus Group Discussion</i>
	2.6.14	Ketersediaan Ruang dan Akses Informasi Keselamatan Pertambangan dari Pekerja	Kuesioner <i>Focus Group Discussion</i>

			2.6.15	Proteksi Pelapor dan Mekanisme Penanganan Pelaporan dalam Pengaduan Pelanggaran Keselamatan Pertambangan (<i>Whistleblowing System</i>)	Kuesioner <i>Focus Group Discussion</i>
			2.6.16	Penjangkauan Pemangku Kepentingan Eksternal	Tinjauan Dokumentasi Wawancara
			2.6.17	Inventarisasi Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan	Tinjauan Dokumentasi Wawancara
			2.6.18	Efektivitas Komunikasi Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
2.7	Pengendalian Mutu Keselamatan Pertambangan dalam Kegiatan Operasional	Kualitatif Kuantitatif	2.7.1	Jumlah Penetapan Tata Cara Kerja Baku untuk Operasi Kerja	Tinjauan Dokumentasi
			2.7.2	Efektivitas Tata Cara Kerja Baku untuk Operasi Kerja	Observasi Wawancara
			2.7.3	Kesesuaian Penetapan Rencana Kerja Operasional Harian	Tinjauan Dokumentasi Wawancara
			2.7.4	Kesesuaian Penerapan Pemeriksaan Kesiapan Operasional Harian	Tinjauan Dokumentasi Observasi
			2.7.5	Kesesuaian Pemberian Izin Masuk Lokasi Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi Wawancara
			2.7.6	Kesesuaian Pemberian Lisensi dan Surat Izin Pengoperasian Peralatan	Tinjauan Dokumentasi Wawancara
			2.7.7	Kesesuaian Pemberian Izin Kerja Khusus	Tinjauan Dokumentasi
			2.7.8	Kesesuaian Penetapan Area, Aktivitas, dan Kontrol Kritis dalam aspek Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>
			2.7.9	Kesesuaian Penetapan Distribusi dan Komposisi Area Pengawasan	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>
			2.7.10	Jumlah Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pengawas Operasional Langsung	Tinjauan Dokumentasi

			2.7.11	Kesesuaian dan Keandalan Hasil Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pengawas Operasional Langsung	Tinjauan Dokumentasi Wawancara
			2.7.12	Jumlah Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pengawas Operasional Jenjang Menengah	Tinjauan Dokumentasi
			2.7.13	Kesesuaian dan Keandalan Hasil Inspeksi, Pemeriksaan, oleh Pengawas Operasional Jenjang Menengah	Tinjauan Dokumentasi Wawancara
			2.7.14	Jumlah Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pihak Internal di Luar Penanggung Jawab Area (Silang)	Tinjauan Dokumentasi
			2.7.15	Kesesuaian dan Keandalan Hasil Inspeksi, Pemeriksaan, Pengujian oleh Pihak Internal di Luar Penanggung Jawab Area (Silang)	Tinjauan Dokumentasi Wawancara
			2.7.16	Efektivitas Inspeksi Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
2.8	Penjaminan Mutu Keselamatan Pertambangan melalui Audit Internal SMKP	Kualitatif Kuantitatif	2.8.1	Dasar Pelaksanaan Audit Internal SMKP	Tinjauan Dokumentasi Analisis
			2.8.2	Kesesuaian Metodologi Audit Internal SMKP	Tinjauan Dokumentasi Analisis
			2.8.3	Keberhasilan Pencapaian Tujuan Audit Internal SMKP	Tinjauan Dokumentasi Analisis
			2.8.4	Jumlah <i>Opportunity for Improvement</i> (OFI) dari Hasil Audit Internal SMKP	Tinjauan Dokumentasi
			2.8.5	Penyelesaian Rencana Tindak Lanjut Audit Internal SMKP	Tinjauan Dokumentasi
ANALISIS DAN STATISTIK KECELAKAAN KERJA, PENYAKIT AKIBAT KERJA, KEJADIAN AKIBAT PENYAKIT TENAGA KERJA, KEJADIAN BERBAHAYA					

3.1	Analisis Terhadap Data Kasus Keselamatan Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif	3.1.1	Integritas Data Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi Analisis
			3.1.2	Ruang Lingkup Analisis dan Pengolahan Data Kasus Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi Analisis
			3.1.3	Maturitas Hasil Analisis Data Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi Analisis
3.2	Investigasi Kasus Keselamatan Pertambangan	Kualitatif	3.2.1	Jumlah Kasus Keselamatan Pertambangan yang Diinvestigasi	Tinjauan Dokumentasi
			3.2.2	Pengumpulan Data dan Informasi terkait Kasus Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi Analisis
			3.2.3	Paradigma Investigasi Kasus Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>
			3.2.4	Teknik Analisis Kasus Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
			3.2.5	Penetapan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan atas Kasus Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
			3.2.6	Realisasi Pelaksanaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan atas Kasus Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
			3.2.7	Jumlah Kasus Keselamatan Pertambangan Serupa dan Berulang dalam 2 Tahun Terakhir	Tinjauan Dokumentasi
3.3	Statistik Kinerja Keselamatan Pertambangan Berdasarkan Indikator Tertinggal	Kuantitatif	3.3.1	Pencapaian <i>Accident Frequency Rate</i>	Tinjauan Dokumentasi
			3.3.2	Pencapaian <i>Accident Severity Rate</i>	Tinjauan Dokumentasi
			3.3.3	Jumlah Kejadian Berbahaya	Tinjauan Dokumentasi
			3.3.4	Pencapaian <i>Morbidity Frequency Rate</i>	Tinjauan Dokumentasi
			3.3.5	Pencapaian <i>Absence Severity Rate</i> (termasuk Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja)	Tinjauan Dokumentasi
			3.3.6	Frekuensi Penyakit Akibat Kerja	Tinjauan Dokumentasi

3.4	Pembelajaran Organisasi	Kualitatif Kuantitatif	3.4.1	Pembelajaran Retrospektif dari Pengelolaan Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>
			3.4.2	Jumlah Perbaikan Berbasis Pembelajaran Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>
UPAYA PENGENDALIAN YANG DILAKUKAN					
4.1	Pengendalian Risiko Keselamatan Pertambangan Berbasis Tata Kelola	Kualitatif Kuantitatif	4.1.1	Dasar Pengelolaan Risiko Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>
			4.1.2	Ketuntasan Siklus Manajemen Risiko	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>
			4.1.3	Ruang Lingkup Manajemen Risiko	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>
			4.1.4	Efektivitas Manajemen Risiko	Tinjauan Dokumentasi
4.2	Manajemen Kesehatan Kerja Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif	4.2.1	Dasar Pengembangan Program Kesehatan Kerja Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi Wawancara
			4.2.2	Realisasi Program Pokok: Kesehatan Kerja	Tinjauan Dokumentasi
			4.2.3	Efektivitas Program Kesehatan Kerja	Tinjauan Dokumentasi
4.3	Manajemen Lingkungan Kerja Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif	4.3.1	Dasar Pengembangan Program Lingkungan Kerja Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi Wawancara
			4.3.2	Realisasi Program Pokok: Lingkungan Kerja	Tinjauan Dokumentasi
			4.3.3	Efektivitas Program Lingkungan Kerja	Tinjauan Dokumentasi
4.4	Manajemen Rekayasa dan Desain Proses	Kualitatif Kuantitatif	4.4.1	Kesesuaian Penerapan Rekayasa Pertambangan: Keandalan Desain Kegiatan Operasional Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi Observasi <i>Focus Group Discussion</i>
			4.4.2	Kesesuaian Penerapan Rekayasa Pertambangan: Keandalan Metode Kegiatan Operasional Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi Observasi <i>Focus Group Discussion</i>

			4.4.3	Kesesuaian Penerapan Rekayasa Pertambangan: Kesesuaian Penggunaan Peralatan dan Perangkat Keras untuk Kegiatan Operasional Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi Observasi <i>Focus Group Discussion</i>
			4.4.4	Kesesuaian Penerapan Rekayasa Pertambangan: Kesesuaian Penggunaan Perangkat Lunak untuk Kegiatan Operasional Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi Wawancara
			4.4.5	Efektivitas Perancangan dan Rekayasa Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
4.5	Manajemen Aset Keselamatan Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif	4.5.1	Pengadaan dan Pembelian Aset Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
			4.5.2	Inventarisasi Aset Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>
			4.5.3	Manajemen Rantai Pasokan	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>
			4.5.4	Manajemen Integritas Aset: Jumlah Pengujian Kelayakan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan (SPIP)	Tinjauan Dokumentasi
			4.5.5	Manajemen Integritas Aset: Realisasi <i>Commissioning</i>	Tinjauan Dokumentasi
			4.5.6	Manajemen Integritas Aset: Jumlah Pemeliharaan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan (SPIP)	Tinjauan Dokumentasi
			4.5.7	Nilai <i>Physical Availability</i>	Tinjauan Dokumentasi
			4.5.8	Nilai <i>Mechanical Availability</i>	Tinjauan Dokumentasi
			4.5.9	Realisasi Program Pokok: Keselamatan Operasi	Tinjauan Dokumentasi

			4.5.10	Efektivitas Program Keselamatan Operasi	Tinjauan Dokumentasi
4.6	Manajemen Kehandalan Pekerja dalam Pengelolaan Keselamatan Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif	4.6.1	Pemenuhan Kelaikan Kerja (<i>Fitness for Duty</i>): Kesiapan Psikologi dan Fisiologis Pekerja	Tinjauan Dokumentasi
			4.6.2	Efektivitas Seleksi dan Penempatan Pekerja	Tinjauan Dokumentasi
			4.6.3	Pemenuhan Kompetensi Pekerja sesuai Standar Kompetensi Kerja	Tinjauan Dokumentasi
			4.6.4	Efektivitas Pemenuhan Kompetensi Kerja	Tinjauan Dokumentasi
			4.6.5	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
			4.6.6	Pendekatan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aspek Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>
			4.6.7	Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan Aspek Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
			4.6.8	Retensi Pengetahuan dan Peningkatan Kinerja Pekerja Pasca Pendidikan dan Pelatihan	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>
			4.6.9	Retensi Pengetahuan dan Peningkatan Kinerja Pekerja Pasca Sertifikasi	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>
			4.6.10	Kesesuaian Penetapan <i>Roster</i> dan <i>Shift</i> /Gilir Kerja Pekerja	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>
			4.6.11	Pernyataan Pekerja terkait Kepuasan Kerja (<i>Job Satisfaction</i>) dan Kesejahteraan Mental (<i>Mental Well-Being</i>) dalam Bekerja Berdasarkan Hasil Survei	Kuesioner Wawancara
4.7	Manajemen Perubahan	Kualitatif Kuantitatif	4.7.1	Dasar Manajemen Perubahan	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>
			4.7.2	Kebermanfaatan Manajemen Perubahan	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>

			4.7.3	Daya Tanggap Organisasi atas Perubahan dari Eksternal	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>
			4.7.4	Efektivitas Kajian Teknis Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
			4.7.5	Efektivitas Manajemen Perubahan	Tinjauan Dokumentasi
4.8	Manajemen Keadaan Darurat	Kualitatif Kuantitatif	4.8.1	Efektivitas Tim Tanggap Darurat	Tinjauan Dokumentasi
			4.8.2	Efektivitas Manajemen Keadaan Darurat	Tinjauan Dokumentasi
4.9	Manajemen Perusahaan Jasa Pertambangan	Kuantitatif	4.9.1	Kesesuaian Persyaratan, Seleksi, dan Penetapan Perusahaan Jasa Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
			4.9.2	Kesesuaian Penetapan Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
			4.9.3	Kesesuaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Jasa Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
4.10	Manajemen Dokumen dan Rekaman Keselamatan Pertambangan	Kualitatif Kuantitatif	4.10.1	Manajemen Dokumentasi Keselamatan Pertambangan	Tinjauan Dokumentasi
			4.10.2	Efektivitas Manajemen Dokumentasi	Tinjauan Dokumentasi
			4.10.3	Manajemen Pengetahuan	Tinjauan Dokumentasi <i>Focus Group Discussion</i>

G. Panduan Penyusunan Program Peningkatan Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan

Hasil dari penilaian tingkat pencapaian kinerja Keselamatan Pertambangan tersebut wajib menjadi salah satu pertimbangan bagi perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan untuk menyusun program Keselamatan Pertambangan yang spesifik dan khusus, di luar program pokok yang wajib dilakukan, dalam rangka upaya meningkatkan kinerja penerapan Keselamatan Pertambangan secara berkelanjutan sesuai tujuan yang ditetapkan dalam berbagai kondisi dan perubahan di internal maupun eksternal.

Program dapat difokuskan untuk:

1. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja indikator yang sudah baik
2. Memperbaiki kinerja indikator yang kurang baik
3. Meningkatkan kinerja Keselamatan Pertambangan secara umum

Capaian dari tiap item pengukuran dianalisis secara terintegrasi untuk menemukan hubungan antar item pengukuran yang mempengaruhi kinerja Keselamatan Pertambangan secara umum, sehingga dapat direkomendasikan program peningkatan kinerja Keselamatan Pertambangan yang spesifik.

Rekomendasi program peningkatan kinerja Keselamatan Pertambangan tersebut juga dapat dibuat untuk perusahaan secara umum maupun khusus untuk departemen/bagian/seksi/satuan kerja tertentu berdasarkan hasil analisis.

Komite Keselamatan Pertambangan wajib mempertimbangkan rekomendasi program peningkatan kinerja Keselamatan Pertambangan tersebut dalam menetapkan dan mengesahkan Program Keselamatan Pertambangan tahun berikutnya. Program peningkatan kinerja Keselamatan Pertambangan yang telah ditetapkan dan disahkan tersebut juga wajib dimuat di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Keselamatan Pertambangan tahun berikutnya, sehingga wajib ditetapkan target pencapaian program dalam periode 1 (satu) tahun.

Kriteria keberhasilan minimum dari implementasi program peningkatan kinerja Keselamatan Pertambangan tersebut adalah tercapainya peningkatan pencapaian dari setiap item pengukuran, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kinerja Keselamatan Pertambangan secara umum.

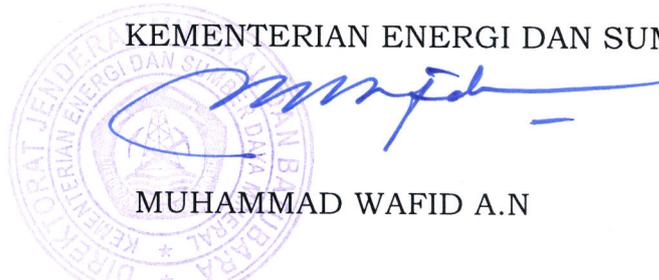
Komite Keselamatan Pertambangan melakukan pengukuran pencapaian program yang ditetapkan dengan menggunakan parameter tertentu sebagai dasar penilaian efektivitas dan keberhasilan program peningkatan kinerja Keselamatan Pertambangan.

H. Penutup

Dengan ditetapkannya petunjuk teknis ini yang merupakan pegangan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemegang IUP, IUPK, IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak/Perjanjian, KK, PKP2B, atau IUJP dalam melaksanakan ketentuan terkait Penetapan Tingkat Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan pada Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga meningkatkan kinerja pemegang izin di bidang pengelolaan Keselamatan Pertambangan untuk terciptanya penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (*Good Mining Practice*).

Plt. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

The image shows a circular official stamp of the Director General of Mineral and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources. The stamp contains the text 'DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA' and 'KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

MUHAMMAD WAFID A.N